



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018 yang memuat target, arah kebijakan dan strategi pencapaiannya;
 - b. bahwa Tim Koordinasi Daerah Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/13 Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018, telah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara sistematis, melibatkan semua pemangku kepentingan, universalitas, terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 91);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda yang memuat tujuan dan sasaran global sampai tahun 2030.
5. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2018
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.

10. Pemangku kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB.
11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi.
12. Pemangku kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB.
13. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD TPB, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
14. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB yang telah selesai

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. RAD TPB;
- b. Pemantauan Dan Evaluasi;
- c. Pelaporan; dan
- d. Pembiayaan;

BAB III RAD TPB

Pasal 3

RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target TPB dan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan.

Pasal 4

(1) Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Kondisi Pencapaian Dan tantangan Pelaksanaan TPB Daerah;
- c. BAB III : Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB Daerah;
- d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. BAB V : Penutup.

Lampiran.

(2) Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RAD TPB digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RAD TPB dan penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka menengah dan jangka pendek; serta acuan bagi organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, filantropi, pelaku usaha, pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RAD TPB.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Gubernur menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan untuk mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB;
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (4) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam BAB IV Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diserahkan kepada Gubernur dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB;
- (2) Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Apabila diperlukan Gubernur sewaktu-waktu dapat meminta laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 74

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 74 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PELAKSANAAN
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017-2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Nawa Cita dan RPJMD Jawa Tengah 2013-2018

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah dirumuskan pada tingkat global melibatkan para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015. Agenda tersebut mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk termasuk penghapusan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership* dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang selaras.

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi, sebagaimana ditunjukkan tabel 1.1.

Tabel 1. 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

TUJUAN SDGs	
1.	Tanpa Kemiskinan
2.	Tanpa Kelaparan
3.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4.	Pendidikan Berkualitas
5.	Kesetaraan Gender
6.	Air Bersih dan Sanitasi Layak
7.	Energi Bersih dan Terjangkau
8.	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9.	Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10.	Berkurangnya Kesenjangan
11.	Kota dan Permukiman Berkelanjutan
12.	Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
13.	Penanganan Perubahan Iklim
14.	Ekosistem Lautan
15.	Ekosistem Daratan
16.	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
17.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Sumber: Rencana Aksi Nasional SDGs 2017-2019

Mendasarkan urutan waktu, TPB/SDGs dirumuskan di tingkat global pada akhir tahun 2015, sejalan dengan waktu penyusunan RPJMN 2015-2019. Hal tersebut memudahkan pengarusutamaan/ *mainstreaming* TPB/SDGs ke dalam

dokumen RPJMN 2015-2019, sehingga sebanyak 94 target dari 169 target TPB/SDGs telah selaras dengan RPJMN. Sebagai tindak lanjut, telah disusun Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan untuk Jawa Tengah, perumusan TPB/SDGs di tingkat global pada akhir tahun 2015 dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 berada pada posisi tahun ke-2 dan tahun ke-4 pelaksanaan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Mengingat hal tersebut maka pengarusutamaan/*mainstreaming* tujuan dan target TPB/SDGs dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (*red: dokumen terakhir Perubahan RPJMD Jawa Tengah 2013-2018*) dimungkinkan belum sepenuhnya selaras terhadap target dan indikator TPB/SDGs Global dan Nasional.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa terdapat 233 indikator TPB/SDGs yang mempunyai disagregasi pada wilayah administrasi provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Dari 233 indikator, terdapat 192 yang dimungkinkan sebagai indikator TPB/SDGs Jawa Tengah. Dari 192 indikator TPB/SDGs Jawa Tengah, 116 indikator sudah tercantum dan 76 indikator belum tercantum dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA dan Dokumen/Laporan Teknis lainnya). Hal tersebut perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai bentuk dukungan dan komitmen dalam pencapaian target dan indikator TPB/SDGs.

Selain mempertimbangkan keselarasan antara target dan indikator, juga memperhatikan keselarasan agenda pembangunan daerah terhadap agenda nasional dan TPB/SDGs serta isu strategis daerah terhadap nasional dan global.

Keselarasan Agenda Pembangunan Jawa Tengah yang termuat dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 terhadap RPJMN Tahun 2015-2019 dan TPB/SDGs sebagaimana ditunjukkan tabel 1.2 :

Tabel 1. 2.Keselarasan Agenda 18 (RPJMD Jateng 2013-2018) terhadap Agenda Nawa Cita (RPJMN 2015-2019) dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Agenda 18 (RPJMD Jateng 2013-2018)	Agenda Nawa Cita (RPJMN 2015-2019)	Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
A. Pendidikan Politik Masyarakat, mencakup: a. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat; b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.	A. Nawacita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, mencakup: a. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif b. Memperkuat sistem pertahanan c. Memperkuat jati diri sebagai negara maritim d. Meningkatkan	• Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun • Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia • Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan • Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara • Tujuan 14 : Melestarikan

Agenda 18 (RPJMD Jateng 2013-2018)	Agenda Nawa Cita (RPJMN 2015-2019)	Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
	kualitas perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri e. Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran f. Memperkuat peran dalam kerja sama global dan regional g. Meminimalisasi dampak globalisasi h. Membangun industri pertahanan nasional i. Membangun Polri yang profesional j. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan.	dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan • Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan akses keadilan untuk semua dan Membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan • Tujuan 17 : Kemitraan untuk pencapaian tujuan
B. Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi, mencakup: a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur c. Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat daerah d. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi e. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah. C. Memperkuat Sistem Pelayanan Publik, mencakup: a. Pembinaan Eks Penyandang	B. Nawa Cita 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, mencakup: a. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik b. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan c. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan d. Penyempurnaan dan peningkatan	

Agenda 18 (RPJMD Jateng 2013-2018)	Agenda Nawa Cita (RPJMN 2015-2019)	Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
Penyakit Sosial b. Perencanaan Pembangunan Daerah c. Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi.	kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) e. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. C. Nawacita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, mencakup: a. Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi c. Pemberantasan tindakan penembangan liar, perikanan liar, dan Penambangan Liar d. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba e. Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah f. Melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal D. Nawacita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	
D. Mewujudkan Desa Mandiri, mencakup: a. Peningkatan Ketahanan Pangan b. Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi	E. Nawa Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka	• Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun • Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi

Agenda 18 (RPJMD Jateng 2013-2018)	Agenda Nawa Cita (RPJMN 2015-2019)	Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
Pangan c. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan d. Pengembangan Agribisnis e. Pemasaran Pariwisata f. Peningkatan Ekspor, Promosi, dan Efisiensi Impor g. Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal h. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM.	negara kesatuan, mencakup : a. Meletakkan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris b. Memeratakan pembangunan antar wilayah terutama Kawasan Timur Indonesia c. Menanggulangi kemiskinan F. Nawa Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, mencakup : a. Meningkatkan kedaulatan pangan b. Membangun ketahanan air c. Membangun kedaulatan energi d. Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana e. Mengembangkan ekonomi maritim dan kelautan	yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan • Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia • Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua • Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan • Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua • Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. • Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. • Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. • Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara • Tujuan 11 : Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan



Agenda 18 (RPJMD Jateng 2013-2018)	Agenda Nawa Cita (RPJMN 2015-2019)	Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
E. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja, mencakup: - Peningkatan kesempatan kerja; - Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; - Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. F. Rakyat Sehat, mencakup: - Pelayanan kesehatan; - Pelayanan KB; - Promosi dan pemberdayaan. G. Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak, mencakup : - Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak; - Pelebagaan pengarusutamaan gender dan anak; - Pelayanan KB. H. Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah, mencakup : - Pendidikan Menengah; - Pendidikan Khusus.	G. Nawa Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, mencakup : - Membangun kependudukan dan keluarga berencana - Membangun pendidikan: melaksanakan Program Indonesia Pintar - Membangun kesehatan: Melaksanakan Program Indonesia Sehat - Meningkatkan kesejahteraan rakyat marjinal: Melaksanakan Program Indonesia Kerja - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penghidupan yang berkelanjutan H. Nawacita 8 : Melakukan Revolusi Karakter Bangsa I. Nawa Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	- Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun - Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan - Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia - Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua - Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan - Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua - Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. - Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
I. Pembangunan Infrastruktur, mencakup : Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	J. Nawacita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, mencakup : Membangun konektivitas	- Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun - Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta

Agenda 18 (RPJMD Jateng 2013-2018)	Agenda Nawa Cita (RPJMN 2015-2019)	Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
b. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan c. Pembangunan Perumahan d. Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas e. Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi f. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Serta Jaringan Pengairan Lainnya g. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan b. Membangun transportasi umum masal perkotaan c. Membangun perumahan dan kawasan permukiman d. Meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur e. Memperkuat investasi f. Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan g. Meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi h. Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional i. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional j. Meningkatkan daya saing tenaga kerja k. Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016 K. Nawa Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, mencakup : a. Meningkatkan kedaulatan pangan	meningkatkan pertanian berkelanjutan • Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia • Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua • Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan • Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua • Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. • Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. • Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. • Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara • Tujuan 14 : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk

Agenda 18 (RPJMD Jateng 2013-2018)	Agenda Nawa Cita (RPJMN 2015-2019)	Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
	b. Membangun ketahanan air c. Membangun kedaulatan energi d. Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana e. Mengembangkan ekonomi maritim dan kelautan f. Memperkuat sektor keuangan g. Memperkuat kapasitas fiskal negara	pembangunan berkelanjutan • Tujuan 17 : Kemitraan untuk pencapaian tujuan
J. Pembangunan Lingkungan Jawa Tengah Ijo Royo-royo, mencakup: a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	L. Nawa Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, mencakup : a. Meningkatkan kedaulatan pangan b. Membangun ketahanan air c. Membangun kedaulatan energi d. Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana e. Mengembangkan ekonomi maritim dan kelautan f. Memperkuat sektor keuangan g. Memperkuat kapasitas fiskal negara	• Tujuan 13 : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya • Tujuan 14 : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan • Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
K. Meningkatkan Peran dan Fungsi Seni dan Budaya Jawa, mencakup : a. Pelestarian dan pengembangan	M. Nawa Cita 8 : Melakukan Revolusi Karakter Bangsa N. Nawa Cita 9 : Memperteguh	• Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun • Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang

Agenda 18 (RPJMD Jateng 2013-2018)	Agenda Nawa Cita (RPJMN 2015-2019)	Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
kesenian dan cagar budaya; b. Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

Keselarasan Isu Strategis Jawa Tengah yang termuat dalam dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 terhadap RPJMN Tahun 2015-2019 dan SDGs sebagaimana ditunjukkan tabel 1.3.

Tabel 1. 3. Keselarasan Isu Strategis RPJMD Perubahan Jateng 2013-2018 terhadap RPJMN 2015-2019 dan SDGs

Isu Strategis RPJMD Perubahan Jateng 2013-2018	Isu Strategis RPJMN 2015-2019	Isu SDGs
A. Isu Strategis Jateng 6: Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah, mencakup: a. Penataan struktur kelembagaan; b. Disharmonisasi peraturan perundangan. c. Manajemen SDM, peningkatan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur; d. Budaya kerja pemerintah; e. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan; f. Keterbatasan aparatur dalam mewujudkan kamtramtibmas untuk penanganan konflik daerah dan isu terorisme.	A. Isu Strategis Nasional 1 : Stabilitas Politik dan Keamanan, mencakup: a. Konsolidasi demokrasi nasional guna memperkuat lembaga demokrasi dalam memelihara keanekaragaman; b. Meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme; c. Meningkatkan kepercayaan kepada aparaturn penegak hukum khususnya Polri; d. Memperkuat pertahanan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. B. Isu Strategis Nasional 2 : Tata Kelola Birokrasi Efektif dan Efisien, mencakup: a. Peningkatan integritas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,	• Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Isu Strategis RPJMD Perubahan Jateng 2013-2018	Isu Strategis RPJMN 2015-2019	Isu SDGs
g. Optimalisasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi; h. Kemampuan Pendapatan.	pembangunan dan pelayanan publik; b. Mewujudkan bentuk pola hubungan antar lembaga yang terbaik sebagai konsekuensi pelaksanaan demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi. C. Isu Strategis Nasional 3 : Pemberantasan Korupsi, mencakup: a. Mewujudkan efektifitas penegakan hukum yang di dalamnya memerlukan perbaikan kualitas dan integritas antara penegak hukum serta penyempurnaan regulasi dan berbagai peraturan perundang-undangan; b. Mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi serta kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan anti korupsi. D. Isu Strategis Nasional 4 : Pertumbuhan Ekonomi, mencakup: a. Ketersediaan infrastruktur untuk memperluas peluang investasi dan menekan biaya logistik; b. Penguatan struktur ekonomi meliputi	

Isu Strategis RPJMD Perubahan Jateng 2013-2018	Isu Strategis RPJMN 2015-2019	Isu SDGs
	sektor primer, sekunder, tersier secara terpadu; c. Reformasi peraturan- perundangan yang saling tumpang tindih dan kontradiksi; d. Peningkatan penerapan dan penguasaan teknologi untuk meningkatkan daya saing; e. Menggali sumber- sumber penerimaan dan mengefektifkan pengeluaran pembangunan	
B. Isu Strategis Jateng 1 : Pengurangan Kemiskinan, mencakup: a. Peningkatan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan); b. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan, pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, peningkatan kemampuan dan keterampilan serta akses usaha produktif masyarakat miskin. C. Isu Strategis Jateng	E. Isu Strategis Nasional 5 : Percepatan Pemerataan Keadilan, mencakup: a. Memacu penurunan angka kemiskinan yang mengalami pelambatan; b. Menciptakan pertumbuhan inklusif dengan memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak- banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik dan ramah keluarga miskin; c. Memperbesar investasi padat karya untuk meningkatkan pendapatan penduduk; memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro melalui dukungan penguatan teknologi, pemasaran, permodalan dan akses pasar;	• Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun • Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan • Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia • Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua • Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan • Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk

Isu Strategis RPJMD Perubahan Jateng 2013-2018	Isu Strategis RPJMN 2015-2019	Isu SDGs
2 : Pengurangan Pengangguran, mencakup: a. Adanya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian; b. Upaya perlindungan pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani, nelayan, masyarakat terkena PHK, anak putus sekolah dan sektor UMKM; c. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha; d. Pemberdayaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar D. Isu Strategis Jateng 4 : Perwujudan Kedaulatan Pangan, mencakup: a. Perlindungan dan penataan ulang sumber sumber produksi pangan; b. Pemeliharaan dan pengembangan pertanian berbasis bahan baku, sumberdaya dan kearifan lokal; c. Pemenuhan cadangan pangan; d. Keberpihakan terhadap produsen pangan kecil;	d. Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal khususnya ditujukan bagi penduduk kurang mampu dan pekerja rentan termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial; e. Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dengan memperluas pemenuhan hak dan kebutuhan dasar; f. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian dengan meningkatkan produktifitas pertanian petani miskin, usaha perikanan tangkap dan budidaya usaha skala mikro; g. Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi dalam rangka menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap goncangan kenaikan harga. F. Isu Strategis Nasional 7: Peningkatan Kualitas SDM, mencakup: a. Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat melalui upaya peningkatan promotif dan preventif; pelayanan kesehatan ibu dan	semua • Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. • Tujuan 14 : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan

Isu Strategis RPJMD Perubahan Jateng 2013-2018	Isu Strategis RPJMN 2015-2019	Isu SDGs
e. Pengembangan pola konsumsi diversifikasi produk aneka pangan lokal.	anak; perbaikan gizi; pengendalian penyakit menular maupun tidak menular; pengawasan obat dan makanan serta akses dan mutu pelayanan kesehatan; pemenuhan sarpras dan tenaga kesehatan serta peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); b. Pembangunan pendidikan dengan mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat; meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan; meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat serta pembentukan watak dan kepribadian siswa melalui internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter; c. Memperkukuh karakter jati diri bangsa; d. Mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan; e. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan	

Isu Strategis RPJMD Perubahan Jateng 2013-2018	Isu Strategis RPJMN 2015-2019	Isu SDGs
	perlakuan salah lainnya. G. Isu Strategis Nasional 9 : Kelautan, mencakup: - Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan memperkuat penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional; - Mengembangkan industri kelautan, industri perikanan, perniagaan laut dan peningkatan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut, serta menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut.	
E. Isu Strategis Jateng 3 : Pembangunan Infrastruktur, mencakup: - Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah selatan; - Belum memadainya akses pariwisata; - Pengembangan dan pembenahan sarana angkutan masal; - Peningkatan rasio elektrifikasi utamanya pada wilayah yang belum terlayani pasokan jaringan listrik; - Pemenuhan ketersediaan sarana prasarana air; - Pemenuhan sarana prasarana	H. Isu Strategis Nasional 8 : Kesenjangan Antar Wilayah, ditunjukkan: - Terdapatnya daerah tertinggal; - Kesenjangan antara wilayah desa dan kota; - Sebaran demografi yang tidak seimbang; - Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. I. Isu Strategis Nasional 6 : Keberlanjutan Pembangunan, mencakup: - Mewujudkan kesamaan dan meluasnya pemahaman oleh berbagai pemangku kepentingan pada seluruh aspek kehidupan; - Pengembangan data dan ukuran	- Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua - Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. - Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. - Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara - Tujuan 11 : Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan - Tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan

Isu Strategis RPJMD Perubahan Jateng 2013-2018	Isu Strategis RPJMN 2015-2019	Isu SDGs
teknologi informasi; g. Daya Tampung dan Daya Dukung LH. F. Isu Strategis Jateng 5 : Perwujudan Kedaulatan Energi, mencakup: a. Ketergantungan terhadap energi fosil; b. Pemanfaatan energi baru terbarukan; c. Pengembangan budaya hemat energi.	pembangunan serta pencerminannya ke dalam kegiatan konkrit; c. Pengembangan dan penerapan kegiatan ramah lingkungan dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan penurunan limbah; d. Pengembangan tata kelola yang mampu mendorong sumber daya dan teknologi bersih termasuk pengendalian pencemaran dan upaya penegakan hukum.	konsumsi yang berkelanjutan • Tujuan 13 : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya • Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati • Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan akses keadilan untuk semua dan Membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

1.2. SDGs menyempurnakan MDGs

TPB/SDGs merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari MDGs dengan target dan tujuan yang lebih ambisius. Salah satu contoh adalah target kemiskinan: pada MDGs mensyaratkan untuk menurunkan kemiskinan setengah dari angka *baseline*, namun TPB/SDGs lebih berat yaitu mensyaratkan tanpa kemiskinan.

Pelaksanaan MDGs di Jawa Tengah belum sepenuhnya menunjukkan hasil menggembirakan. Dari 7 Tujuan MDGs dan 50 indikator MDGs, terdapat 22 indikator MDGs yang sudah tercapai dan 28 indikator MDGs yang belum tercapai. Indikator TPB/SDGs yang sudah tercapai antara lain : Laju PDB per tenaga kerja, Gizi buruk, Kunjungan neonatal pertama, Pemakaian kontrasepsi (CPR), Prevalensi TB, Rasio kawasan tutupan lahan, Proporsi tangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman, Air minum dan sanitasi layak dan Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan. Sedangkan indikator MDGs yang belum tercapai antara lain: (a) Tingkat kemiskinan; salah satunya disebabkan oleh penentuan target kinerja tahun 2015 yang terlalu tinggi, yaitu menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk, dengan tingkat pendapatan kurang dari US\$ 1 per hari (UNDP); (b) APM SD/MI/Sederajat akan sulit dicapai dengan

adanya kecenderungan orang tua yang menyekolahkan putra-putrinya pada bangku SD/MI sebelum usia 7 tahun sehingga mengurangi kesempatan anak usia 7 tahun untuk mendapat pendidikan; (c) Angka Melek Huruf (AMH) hasil perhitungan antara BPS dan Dinas Pendidikan berbeda karena perbedaan dalam metode pengambilan data. Metode survei yang digunakan oleh BPS belum mampu menunjukkan data *by name by address* selain itu indikator Angka Melek Huruf sudah tidak dipakai dan diganti dengan Harapan Lama Sekolah; (d) Angka Kesehatan Ibu (AKI) diprediksi tidak akan tercapai dikarenakan penentuan target terlalu tinggi yaitu menurunkan AKI hingga $\frac{3}{4}$ dalam kurun waktu 1990-2015; (e) Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi dan proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS. Data yang diperoleh dari survei yang dilakukan Pemerintah Pusat dilaksanakan setiap 3 tahun sekali dan data saat ini data *Rapid Survey* Tahun 2012; serta (f) Jumlah emisi CO₂ dan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) antara lain disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, penggunaan mesin pengatur suhu udara dan sistem pendingin.

Selanjutnya, target indikator MDGs yang telah tercapai agar dipertahankan, dan target indikator yang belum tercapai diupayakan tercapai pada pelaksanaan Agenda TPB/SDGs.

1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian SDGs

Indonesia berkomitmen terhadap pelaksanaan pencapaian target TPB/SDGs, demikian pula dengan Jawa Tengah. Dukungan Jawa Tengah terhadap pelaksanaan TPB/SDGs antara lain ditunjukkan melalui pembentukan Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs Jawa Tengah segera setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Beberapa kegiatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka persiapan pelaksanaan TPB/SDGs, antara lain: Sosialisasi TPB/SDGs tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pembahasan tujuan, target dan indikator TPB/SDGs dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) bersama akademisi dan para pakar serta *stakeholder*; Pertemuan teknis dengan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja serta Pleno bersama OPD Provinsi dalam rangka persiapan penyusunan RAD TPB/SDGs Jawa Tengah.

1.4. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) merupakan pembangunan yang bersifat universal dan inklusif. Universal, karena tidak hanya dilaksanakan oleh negara kurang berkembang namun juga negara maju untuk seluruh bangsa dunia. Inklusif, artinya manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh segala lapisan dan kelompok masyarakat meliputi masyarakat rentan/miskin, disabilitas, anak-anak, dewasa, perempuan dan laki-laki.

Penetapan tujuan dan target dalam TPB/SDGs mempunyai keterkaitan yang komprehensif antar pilarnya yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum tata kelola. Tujuan akhir yang diharapkan dalam pencapaian TPB/SDGs yaitu: Menghilangkan kemiskinan, Menghilangkan kelaparan dan Berkurangnya kesenjangan. Untuk mempercepat pencapaian tujuan akhir tersebut terdapat tujuan-tujuan yang menjadi akselerasi/ pemercepat yaitu Kehidupan sehat sejahtera, Pendidikan berkualitas, Kesetaraan gender, Pekerjaan layak dan

pertumbuhan ekonomi, Kota pemukiman yang berkelanjutan, Penanganan perubahan iklim serta Perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Sedangkan tujuan-tujuan yang lain merupakan katalisator/daya ungkit yaitu: Air bersih dan sanitasi layak, Energi bersih dan terjangkau, Industri inovasi dan infrastruktur, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, Ekosistem lautan, Ekosistem daratan dan Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Inklusif, tidak hanya dimaknai dari sisi penerima manfaat pembangunan, namun dimaknai juga bagi pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan dalam mewujudkan TPB/SDGs bukan hanya pemerintah (eksekutif dan legislatif) namun juga melibatkan filantropi dan pelaku usaha, Akademisi dan Pakar, Organisasi Masyarakat Sipil bahkan Media. Setiap unsur tersebut memiliki peran masing-masing namun saling terkait. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, pengalokasian anggaran dan evaluasi terhadap program/kegiatan yang mendukung pencapaian target TPB/SDGs. Organisasi Masyarakat Sipil memberikan advokasi, membangun kesadaran masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian target TPB/SDGs. Filantropi dan pelaku usaha berperan untuk melakukan advokasi pada para pelaku usaha dan sektor bisnis. Peran akademisi bertumpu pada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat mengupayakan terwujudnya pencapaian TPB/SDGs.

TPB/SDGs merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja, sehingga perlu peran serta aktif seluruh pihak dalam fasilitasi, koordinasi, advokasi, sosialisasi dan diseminasi guna mewujudkan sinergitas pencapaian TPB/SDGs. Pembagian pola peran menjadi sangat penting dalam pelaksanaan TPB/SDGs, demikian halnya dengan pembiayaan yang dialokasikan untuk perwujudan pencapaian TPB/SDGs yang tidak hanya bersumber dari APBD namun juga sumber lainnya.

1.5. Pembiayaan TPB/SDGs

Jawa Tengah mengupayakan sumber-sumber pendanaan antara lain : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) : Sejalan dengan isu strategis Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu Pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Pembangunan infrastruktur, Perwujudan kedaulatan pangan, Perwujudan kedaulatan energi, Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas daerah, maka beberapa target-target TPB/SDGs sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Tengah. Sehingga sebagian besar pembiayaan APBD diarahkan juga untuk mendukung pencapaian target TPB/SDGs. Sumber-sumber APBD dari unsur Pendapatan yaitu PAD, Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum dan Khusus), Lain-lain Pendapatan yang Sah (Dana penyesuaian, Dana Insentif Daerah dan Pendapatan Lainnya). Pendapatan tersebut akan terus dioptimalkan untuk dukungan pencapaian target TPB/SDGs.

Selain itu, sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, Pemerintah Provinsi juga bertanggung jawab untuk memperhatikan permasalahan pembangunan Kabupaten/Kota utamanya yang terkait dengan percepatan pencapaian target pembangunan. Untuk itu, terdapat mekanisme Bantuan Keuangan setiap tahunnya yang diberikan kepada Kabupaten/Kota sebagai bentuk dana stimulan terhadap program/kegiatan pencapaian target

Jawa Tengah. Mekanisme lain yaitu hibah dan bansos juga merupakan upaya lain dalam percepatan perwujudan target pembangunan Jawa Tengah. Pengentasan kemiskinan masih menjadi fokus utama di Jawa Tengah, sehingga seluruh program/kegiatan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diarahkan untuk hal tersebut.

Hal lain yang merupakan sumber pembiayaan dari Pemprov Jateng yaitu pengumpulan dana zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jateng yang dikoordinir oleh BAZDA. Dana tersebut digunakan untuk upaya percepatan penurunan kemiskinan.

Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) : Melalui Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan dari Pusat, maka pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal dan layanan dasar menjadi prioritas. Penyediaan sarpras kesehatan dan pendidikan yang memadai dan sesuai standar senantiasa diupayakan untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hal tersebut sejalan dengan Tujuan 3 “Kehidupan Sehat dan Sejahtera”, Tujuan 4 “Pendidikan Berkualitas” dan Tujuan 6 “ Air Bersih dan Sanitasi Layak”.

Non Pemerintah dari Masyarakat : Pengumpulan dana tidak hanya dilakukan oleh aparat pemerintah daerah, namun juga dari masyarakat. Sinergis dengan pemerintah daerah, beberapa organisasi masyarakat juga melakukan kegiatan penggalangan dana untuk bedah rumah, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan yang lainnya. Selain itu, pengumpulan dana juga diperoleh melalui kegiatan sosial keagamaan seperti zakat, infaq dan sodaqah.

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJLSP): Beberapa perusahaan besar di Jawa Tengah ikut berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan, salah satunya melalui Forum CSR. Dari forum CSR keterlibatan perusahaan dalam sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi, pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pengelolaan lingkungan tercatat hampir sekitar Rp. 655.000.000.000,00

1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Jawa Tengah 2017-2018

Penyusunan dokumen RAD TPB/SDGs Jawa Tengah Tahun 2017-2018 melalui serangkaian proses dan tahapan sebagai berikut :

- a. Diawali dari pembentukan Tim Sekretariat TPB/SDGs Jawa Tengah beserta dukungan pilarnya (Surat Keputusan Kepala Bappeda) dan Tim Koordinasi serta Kelompok Kerja TPB/SDGs per Pilar (Surat Keputusan Gubernur).
- b. Tahap selanjutnya adalah Rapat Pleno Tahapan dan Tata Cara Penyusunan TPB/RAD SDGs Pertama yang dilaksanakan pada bulan ke-empat tahun 2018. Pleno dihadiri oleh OPD Provinsi dan *Stakeholder* dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan pleno lebih ke arah pentahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs serta menekankan pentingnya dukungan lintas sektor serta para pemangku kepentingan guna mewujudkan pelaksanaan TPB/SDGs di Jawa Tengah.
- c. Berikutnya, dimulai penyusunan Draft RAD yang dilaksanakan melalui *working group* per pilar. Pelaksanaan *working group* untuk pemerintah dan

non pemerintah dilakukan secara terpisah. Pembahasan pada *working group* menggunakan *tool* berupa matrik isian, yaitu Matrik 1, 2, 3, 4 dan 5. Matrik 1 berisi tentang indikator-indikator daerah yang sesuai dengan TPB/SDGs disertai target dan realisasi dari tahun dasar (*baseline*) 2015 hingga 2018. Matrik 2 memuat tentang program/kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi terkait dan Kabupaten/Kota dalam pencapaian target dan indikator TPB/SDGs. Matrik 3, menyampaikan program/kegiatan non pemerintah dalam mendukung capaian target dan indikator TPB/SDGs. Matrik 4, digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan tentang capaian indikator daerah yang sesuai dengan TPB/SDGs selama kurun waktu 5 tahun yang lalu (2013 sampai 2017). Dan terakhir Matrik 5, untuk menuangkan permasalahan, tantangan dan peluang serta arah kebijakan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah.

- d. Mekanisme yang sama dilakukan juga untuk memperoleh data dan informasi serta masukan dari Kabupaten/Kota. Melalui Rapat Pleno Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RAD TPB/SDGs Kedua pada bulan Juni tahun 2018, disampaikan matrik-matrik isian 1, 2, 3, 4 dan 5 kepada Kabupaten/Kota.
- e. Setelah mendapatkan masukan dari kegiatan *working group* dan Rapat Pleno Kedua, selanjutnya Tim Sekretariat TPB/SDGs, Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs dan Kelompok Kerja TPB/SDGs utamanya dari unsur fungsional melakukan penyusunan narasi, agar menjadi satu kesatuan dokumen yang utuh dan komprehensif.
- f. Pembahasan demi pembahasan dilakukan untuk penyempurnaan Draft RAD TPB/SDGs Jateng 2017-2018 menjadi Draft Final RAD TPB/SDGs Jawa Tengah 2017-2018, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Bappenas c.q. Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs untuk direview.

1.7. Sistematika RAD TPB/SDGs Jawa Tengah 2017-2018

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Jawa Tengah terdiri atas lima bab, yaitu:

Bab pertama tentang pendahuluan menjelaskan mengenai keselarasan Agenda TPB/SDGs dengan Nawa Cita dan RPJMD Perubahan Jawa Tengah Tahun 2013-2018 serta Isu Strategis TPB/SDGs dengan Nawa Cita dan RPJMD Perubahan Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Selain itu, memuat bagaimana TPB/SDGs menyempurnakan MDGs dan juga komitmen Jawa Tengah dalam melaksanakan TPB/SDGs. Bagaimana keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Jawa Tengah sesuai dengan perannya masing-masing dan pembiayaan TPB/SDGs serta potensi pembiayaan lainnya. Pentahapan dan proses penyusunan RAD juga menjadi satu bagian penting yang dibahas di bab pertama.

Bab kedua menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Jawa Tengah untuk beberapa indikator utama dari setiap Tujuan. Bab ini menjadi gambaran akan data dasar (*baseline*) tahun 2015 dan capaian hingga tahun 2017 yang menjadi tolak ukur dalam penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDGs hingga tahun 2018.

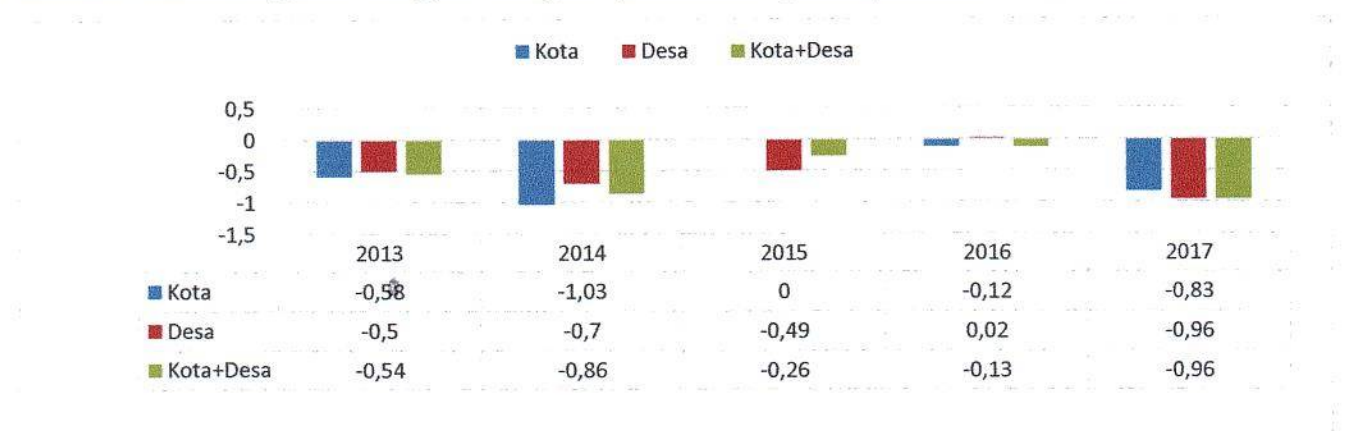
BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN
PELAKSANAAN TPB/SDGs

2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan

Dimanapun Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi. Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan meskipun masih dibawah kemiskinan nasional. Dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan nasional, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga mengalami penurunan dari 14,56% pada tahun 2013 menjadi 12,23% pada tahun 2017 (BPS, angka September). Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 4,73 juta penduduk pada tahun 2013 menjadi 4,19 juta penduduk atau turun sebanyak 507,38 ribu jiwa yang berarti secara rata-rata, jumlah penduduk miskin menurun 126 ribu jiwa/tahun.

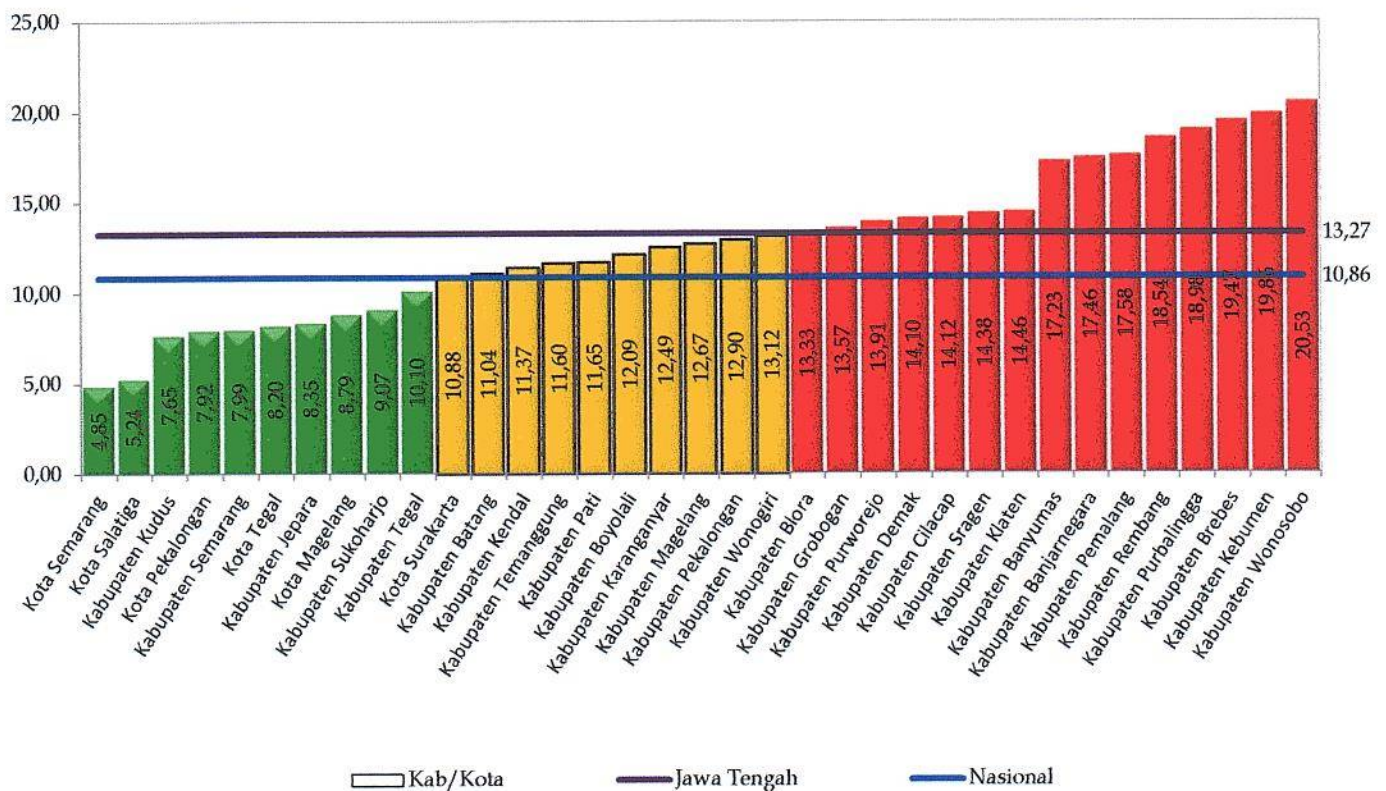
Penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah mengalami laju penurunan angka kemiskinan yang semakin meningkat. Selama kurun waktu 2013-2017, rata-rata laju penurunan angka kemiskinan sebesar 0,55%. Laju penurunan angka kemiskinan tertinggi dicapai pada tahun 2017 dengan penurunan sebesar 0,96%, sementara laju penurunan terendah sebesar 0,13% terjadi pada tahun 2016. Laju penurunan angka kemiskinan di wilayah perdesaan cenderung lebih lambat dibandingkan dengan wilayah perkotaan pada periode 2013-2017.



Sumber: BPS 2013-2017, diolah

Gambar 2. 1. Laju Penurunan Angka Kemiskinan, 2015-2017

Persebaran tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 ditampilkan pada Gambar 2.2. dari 35 Kabupaten/Kota terdapat 15 Kabupaten/Kota yang berada di atas garis kemiskinan Propinsi Jawa Tengah dan Nasional, antara lain Blora 13,04%, Grobogan 13,27%, Demak 13,41%, Purworejo 13,81%, Cilacap 13,94%, Sragen 14,02%, Klaten 14,15%, Banyumas 17,05%, Banjarnegara 17,21%, Pemalang 17,37%, Rembang 18,35%, Purbalingga 18,80%, Brebes 19,14%, Kebumen 19,60% dan Wonosobo 20,32%.

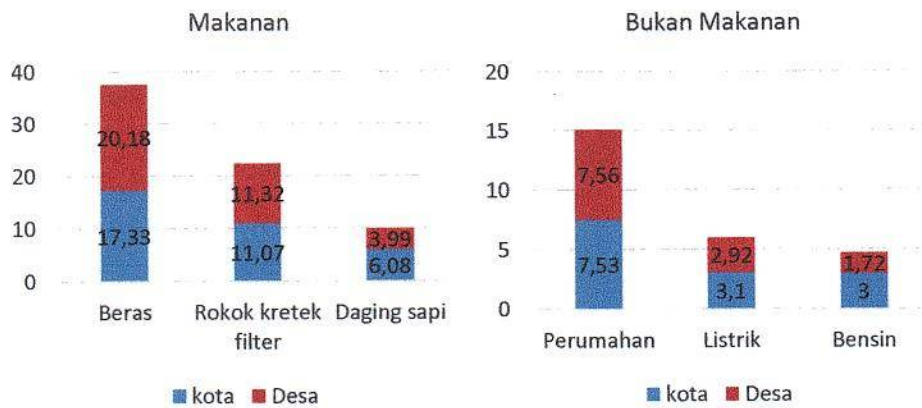


Sumber: TKPKD, 2017

Gambar 2. 2. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017

Perkembangan Garis Kemiskinan di Jawa Tengah kondisi September 2017 sebesar Rp. 338.815,- per kapita per bulan, meningkat 4,98% dibandingkan dengan September 2016 yang mencapai Rp.322.748,- per kapita per bulan. Pada daerah perkotaan Garis Kemiskinan September 2017 sebesar Rp. 339.692,- per kapita per bulan atau naik 5,23% dari kondisi September 2016 (Rp.322.799,- per kapita per bulan). Garis Kemiskinan di perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 4,70% menjadi sebesar Rp. 337.657,- per kapita per bulan dibandingkan dengan September 2016 yaitu sebesar Rp.322.489,- per kapita per bulan.

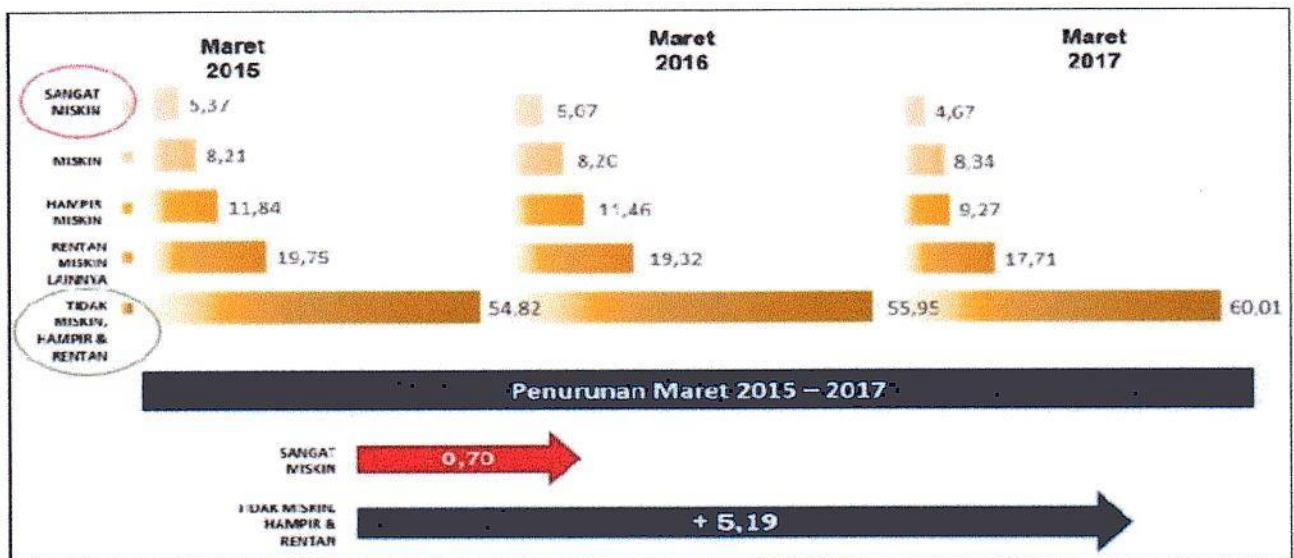
Garis kemiskinan dipengaruhi oleh komoditi makanan dan bukan makanan. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Sumbangan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan pada September 2017 sebesar 73,38%. Kondisi ini hampir sama dengan kondisi Maret 2017 yaitu sebesar 73,41%. Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan di perkotaan dan perdesaan yang dapat berpengaruh terhadap kenaikan garis kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter dan daging sapi. Di daerah perdesaan kebutuhan akan beras dan rokok filter lebih tinggi jika dibanding daerah perkotaan, sementara konsumsi daging sapi lebih tinggi di kota. Komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap Garis Kemiskinan di daerah perkotaan dan perdesaan yaitu biaya perumahan listrik dan bensin. Baik di desa maupun dikota kebutuhan akan biaya perumahan dan listrik hampir setara, sementara kebutuhan bensin di kota lebih tinggi (Gambar 2.3).



Sumber: TKPKD, 2017

Gambar 2. 3. Komoditi Makanan dan Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah September 2017

Upaya penanggulangan kemiskinan antara lain melalui program-program perlindungan sosial yang selama ini telah banyak diberikan kepada masyarakat miskin, namun kinerja penurunan kemiskinan masih melambat. Dampak program penanggulangan kemiskinan terhadap penduduk dalam kategori sangat miskin berkurang sebanyak 0,70% dan terhadap penduduk tidak miskin bertambah sebesar 5,19%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program penanggulangan kemiskinan lebih banyak menyasar kepada kelompok penduduk tidak miskin dan hampir miskin dibandingkan dengan penduduk miskin (TKPKD, 2017).

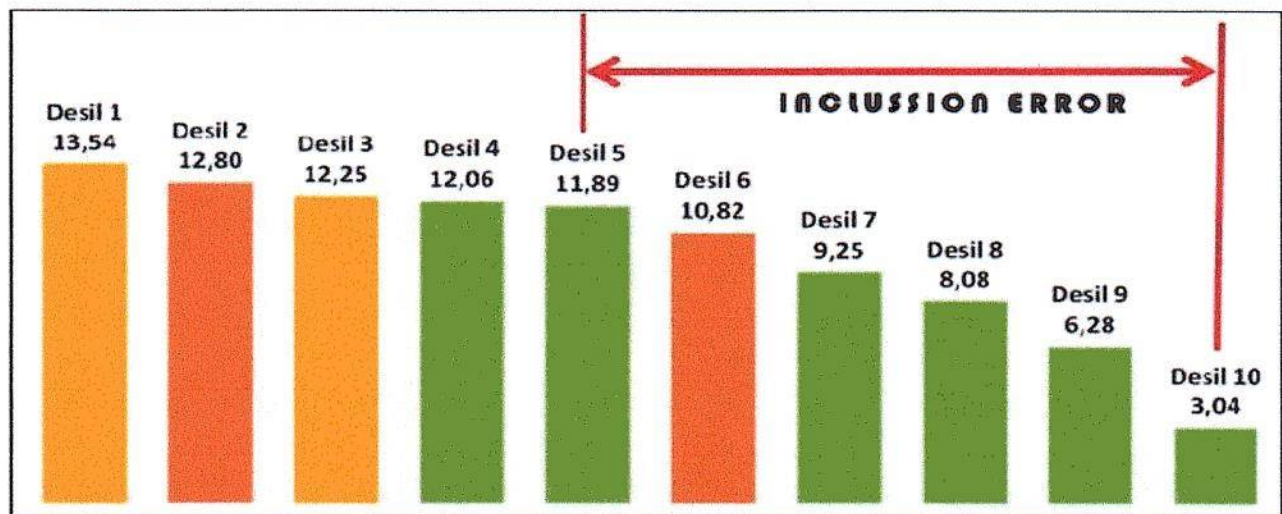


Sumber : TKPKD Jawa Tengah , 2017

Gambar 2. 4.Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan data dari TKPKD Jawa Tengah 2017, beberapa faktor melambatnya penurunan kemiskinan di Jawa Tengah jika dilihat dari ketepatan program perlindungan sosial selama ini sebagai berikut: 1) Penerima Bantuan Raskin/Rastra. Rata-rata masyarakat miskin yang menerima raskin/rastra selama empat bulan terakhir (periode Mei – Agustus 2017) mencapai 6%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih ada RT yang tidak miskin tetapi menerima raskin. Ada kecenderungan petugas untuk membagi rata raskin

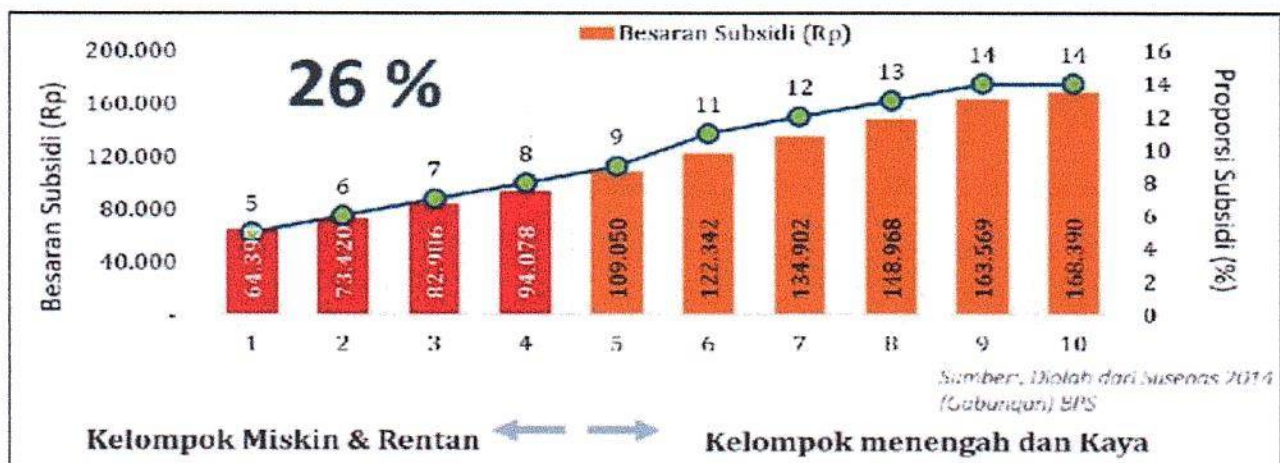
kepada RT yang dianggap memerlukan (meskipun mereka tidak tergolong miskin). Persebaran penerima raskin/rastra dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Sumber: TKPKD Jawa Tengah, 2017

Gambar 2. 5.Penerima Rastra Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

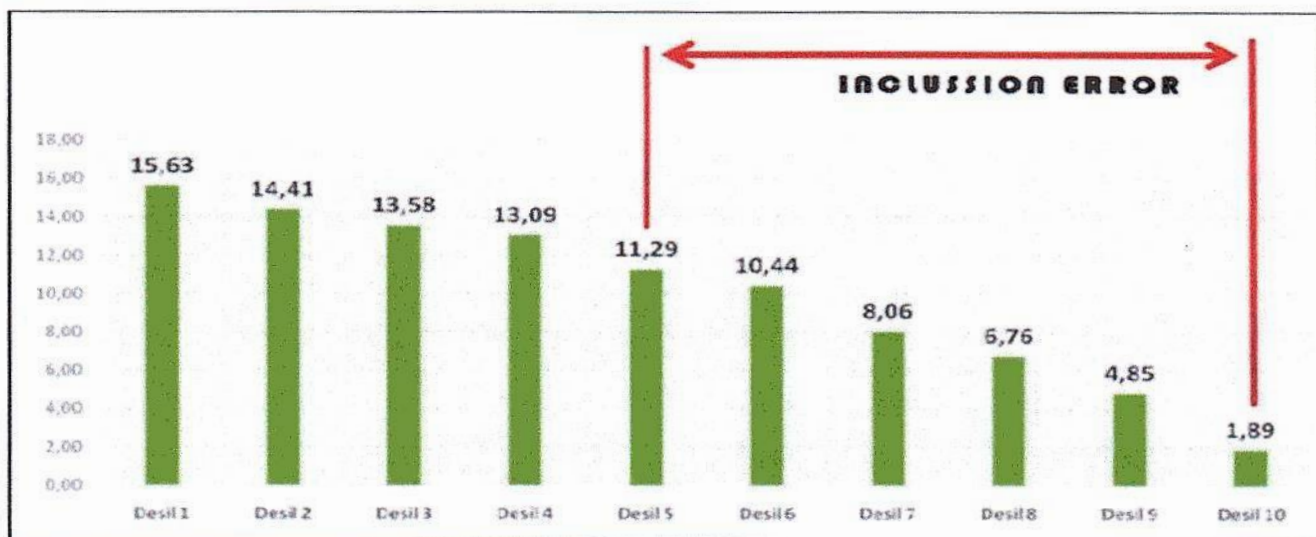
Pada Gambar 2.5. menunjukkan bahwa penduduk yang tidak berhak menerima raskin/rastra (desil 5 – desil 10) masih menerima bantuan raskin/rastra (inclusion error). Perlu adanya pengawalan terhadap bantuan raskin agar tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, 2)Penerima Subsidi Listrik. Penerima subsidi listrik lebih banyak menyasar kepada kelompok menengah dan kaya dengan rata-rata subsidi yang diterima desil 10 lebih dari 2,5 kali dari yang diterima oleh kelompok desil 1. Persebaran penerima subsidi listrik dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Sumber : TKPKD Jawa Tengah, 2017

Gambar 2. 6. Penerima Subsidi Listrik

Pada Gambar 2.6 menunjukkan bahwa masyarakat miskin dan rentan miskin hanya menerima 26% dari subsidi listrik, namun masyarakat menengah dan kaya juga menerima subsidi listrik dengan alokasi yang lebih banyak yaitu sebesar 74%. Hal tersebut membuktikan bahwa program subsidi listrik dari pemerintah selama ini masih kurang tepat sasaran (*inclusion error*). 3) Penerima Bantuan Siswa Miskin. Persebaran penerima bantuan siswa miskin di Jawa Tengah dengan tingkat kesejahteraan desil 1 – desil 10 dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Sumber : TKPKD Jawa Tengah, 2017

Gambar 2. 7. Penerima Bantuan Siswa Miskin

Siswa miskin pada desil 5 – desil 10 masih menerima bantuan walaupun dengan persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan desil 1 – desil 4. Hal tersebut menggambarkan bahwa alokasi bantuan siswa miskin masih belum tepat sasaran atau masih terjadi inclusion error. 4) Pengguna LPG. Persebaran penggunaan LPG 3 Kg di Jawa Tengah dengan tingkat kesejahteraan desil 1 – desil 10 dapat dilihat pada Gambar 2.8.



Sumber : TKPKD Jawa Tengah, 2017

Gambar 2. 8. Pengguna LPG 3 Kg

Pada Gambar 2.8 menunjukkan bahwa penggunaan LPG subsidi 3 kg pada kelompok miskin dan rentan miskin sebesar 25%, sedangkan pada kelompok menengah dan kaya sebesar 75%. Hal tersebut mengakibatkan kurang tepatnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah dan juga menimbulkan kelangkaan Gas LPG 3Kg.

Sistem Perlindungan Sosial Nasional. Untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah memberikan sejumlah program kesejahteraan sosial terutama dibidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Sampai dengan Mei 2016, jumlah peserta JKN di Jawa Tengah adalah 21.948,445 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.152.727 juta jiwa (69 %) peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN. Sementara, peserta PBI JKN dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 570.409 juta jiwa

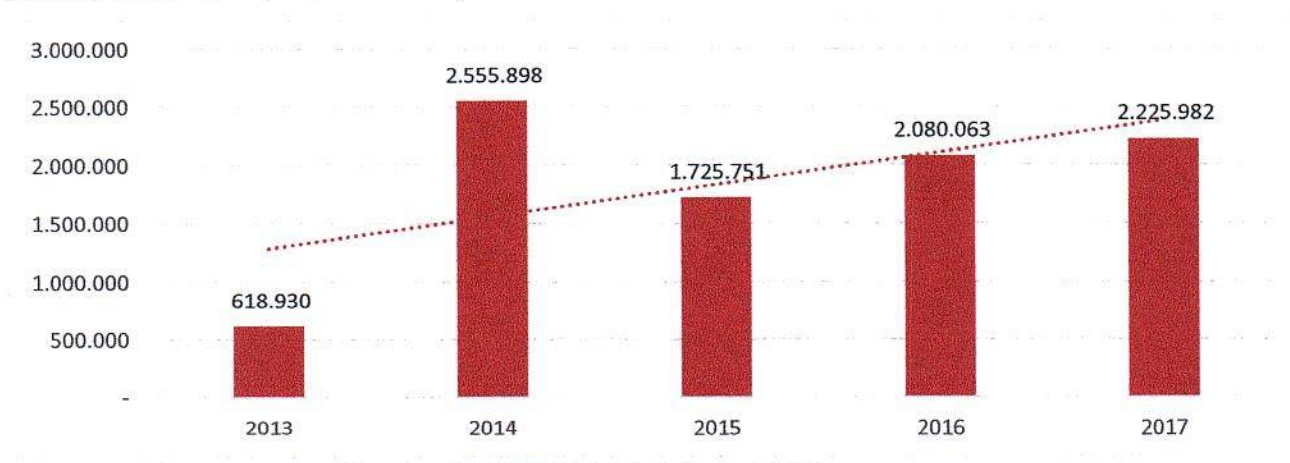
(2,5%). Secara kumulatif, peserta JKN yang dibiayai oleh pemerintah sebagai penerima bantuan iuran (APBN dan APBD) mencapai 15.723.136 juta jiwa peserta atau hampir 71,63 % dari total peserta. Sementara Pekerja Penerima Upah (PPU) JKN hanya mencapai 4.145.758 juta atau 19 % (Gambar 2.8). Untuk tahun 2017 terjadi peningkatan kepesertaan BPJS kesehatan penerima upah non bantuan iuran. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan adalah rendahnya peserta yang termasuk dalam kategori mandiri, hanya sekitar 28 % dari seluruh peserta aktif. Sementara itu masih terdapat 35 % penduduk di Jawa Tengah yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.



Sumber : BPJS, dikutip dari BPS, 2016-2017

Gambar 2. 9.Kepesertaan BPJS Kesehatan

Jumlah peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada Desember 2017 sekitar 2.2 juta pekerja. Kepesertaan tersebut mengalami peningkatan sangat signifikan sekitar 360 % dibandingkan dengan tahun 2013. Namun, tingkat kepesertaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (PU, BPU & Jakons) relatif rendah yaitu sekitar 38,7% dari seluruh pekerja aktif (buruh/karyawan/pegawai) atau 13,5 % dari seluruh pekerja baik disektor formal dan informal diatas umur 15 tahun di Jawa tengah. Tantangan bagi penyediaan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan adalah memperluas cakupan kepesertaan pada sektor informal yaitu dalam kelompok pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri (Gambar 2.9).



Sumber : BPJS dikutip dari BPS 2016 dan 2017

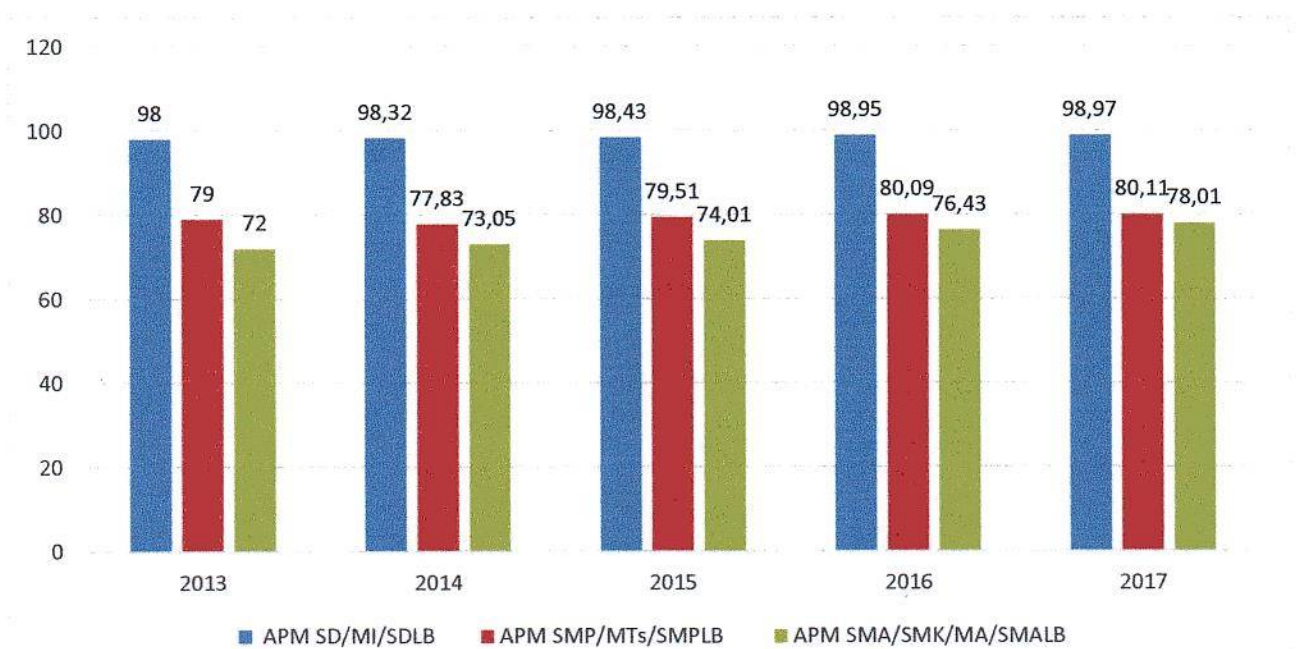
Gambar 2. 10. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (PU, BPU & Jakons) di Jawa Tengah



Akses Terhadap Pelayanan Dasar. Akses pelayanan kesehatan di Jawa Tengah mengalami penurunan pada beberapa aspek. Jumlah peserta program keluarga harapan dari tahun 2015 sampai dengan 2017 sebesar 12.764 anggota rumah tangga (ART). Persentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2017 sebesar 94,3 %. Peserta KB aktif pada tahun 2015 sebesar 78,24 %, meningkat menjadi 78,64 % atau 0,4% pada tahun 2017, namun mengalami penurunan sebesar 1.75% pada tahun 2017 menjadi 76,89 %. Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menunjukkan tren penurunan dari 98,5 % pada tahun 2016 menjadi 97,6 % pada tahun 2017. Jumlah peserta penyandang disabilitas miskin pada tahun 2015 sebesar 785, meningkat menjadi 800 pada tahun 2016, selanjutnya mengalami penurunan menjadi 500 pada tahun 2017. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Jawa Tengah pada aspek pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dan pelayanan persalinan pada fasilitas kesehatan.

Aksesibilitas penduduk terhadap kebutuhan dasar perumahan mengalami peningkatan. Pada aspek pemenuhan kebutuhan sumber air minum yang layak di daerah perdesaan meningkat menjadi 72,8% pada tahun 2017. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 68%. Sementara di daerah perkotaan meningkat dari 75,76 % pada tahun 2015 menjadi 80,98% pada tahun 2017. Akses terhadap sanitasi layak tahun 2016 mencapai 77% (no data??); Kemudian juga adanya peningkatan kawasan permukiman kumuh yang tertangani dari tahun 2015 sebesar 14,03 % menjadi 16,62 % pada tahun 2017, sementara kawasan kumuh kewenangan provinsi (10-15 ha), dari tahun 2012-2016 telah tertangani 272,92 ha atau 15,57%. Dari indikator yang ditampilkan menunjukkan kecenderungan yang positif. Meskipun demikian, terdapat permasalahan jika ditinjau dari aspek kewilayahan, karena masih terjadi kesenjangan aksesibilitas kebutuhan dasar perumahan antara Kabupaten/Kota, perkotaan dan perdesaan. Aksesibilitas perumahan yang layak huni di Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dari 78,67% pada tahun 2015 menjadi 79,63 % pada tahun 2016 dan kembali meningkat menjadi 80,31 pada tahun 2017 atau meningkat 1.64 %. Pemenuhan kebutuhan penerangan yang bersumber dari listrik PLN juga mengalami peningkatan menjadi 96,3% pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 85,29% pada tahun 2013.

Pembangunan pendidikan adalah bidang pembangunan yang menempati posisi strategis dalam pengentasan kemiskinan terutama untuk pengembangan sumber daya manusia berkualitas sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Di lihat dari presentase Angka Partisipasi Murni (APM) pada tiap jenjang pendidikan cenderung mengalami peningkatan. Pada kelompok pendidikan dasar SD/MI/ sederajat mengalami peningkatan, dari 98,60 % pada tahun 2013 menjadi 98,97 % pada tahun 2017. Demikian pula untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat dari 79 % pada tahun 2013 menjadi 80,11% pada tahun 2017. Sementara untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ sederajat dari 55 pada tahun 2013 menjadi 64,02 pada tahun 2017 (Gambar 2.10).

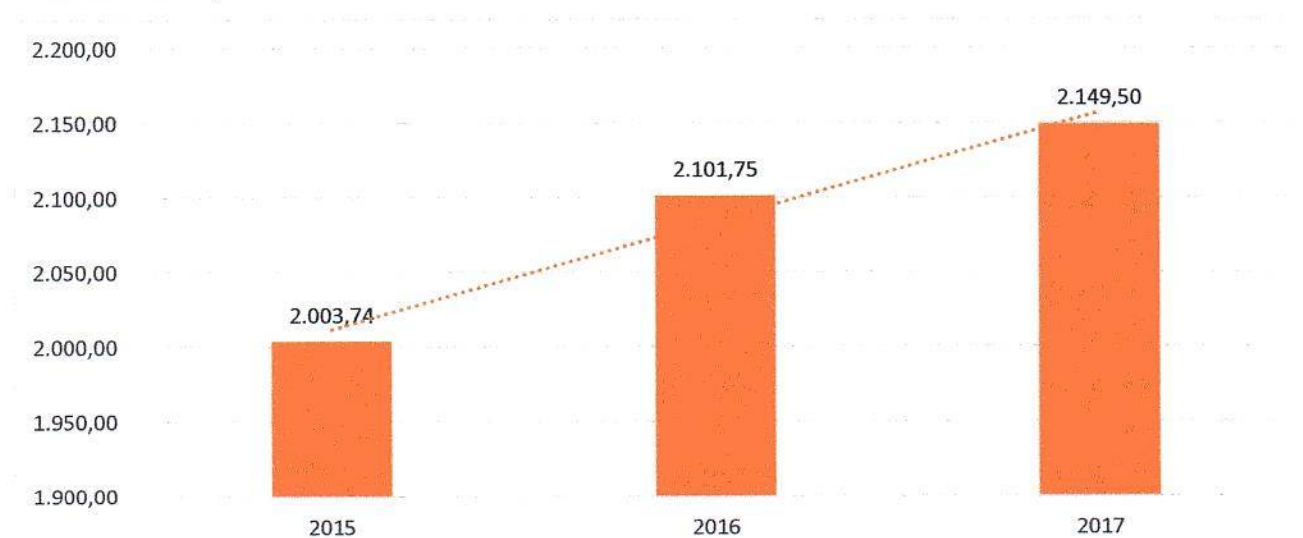


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 11. Persentase Angka Partisi Murni (APM) Tahun 2013-2017

2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

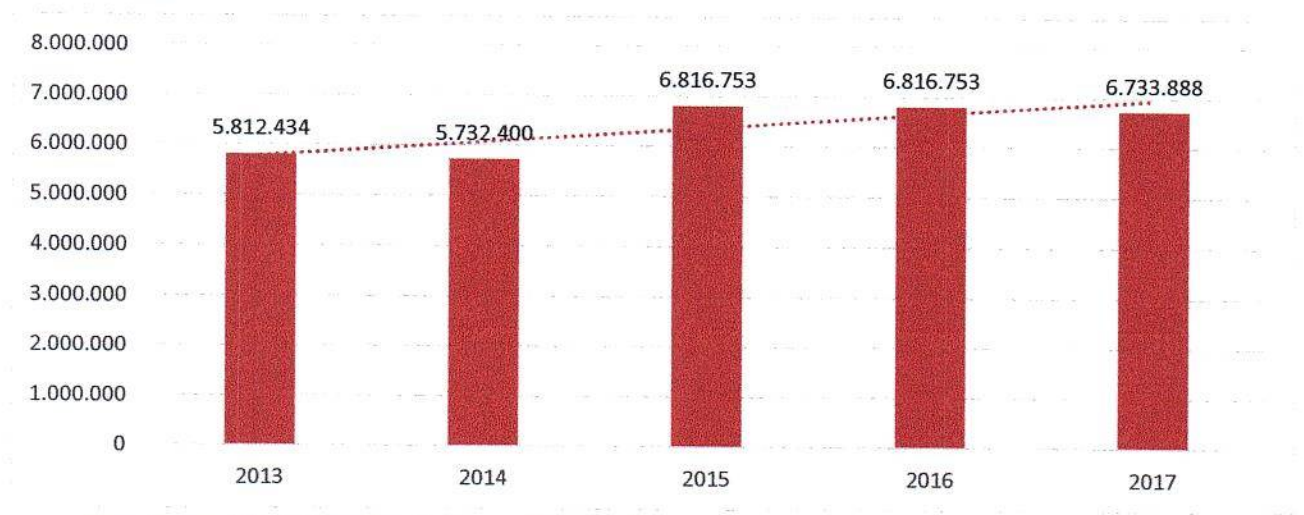
Menghilangkan Kelaparan. Berdasarkan data *Food Security and Fulnerability Atlas* (FSVA) terdapat 41 kecamatan di Jawa Tengah yang menjadi prioritas I rawan pangan. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari atau penduduk sangat rawan pangan pada tahun 2016 sebesar 15 %. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari atau penduduk sangat rawan pangan, selama tahun 2015-2017 cenderung menurun. Pada tahun 2015, proporsi tersebut adalah sebesar 2.003,74 dan terus meningkat pada tahun 2017 menjadi 2.149,50 (Gambar 2.11).



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2018

Gambar 2. 12. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari

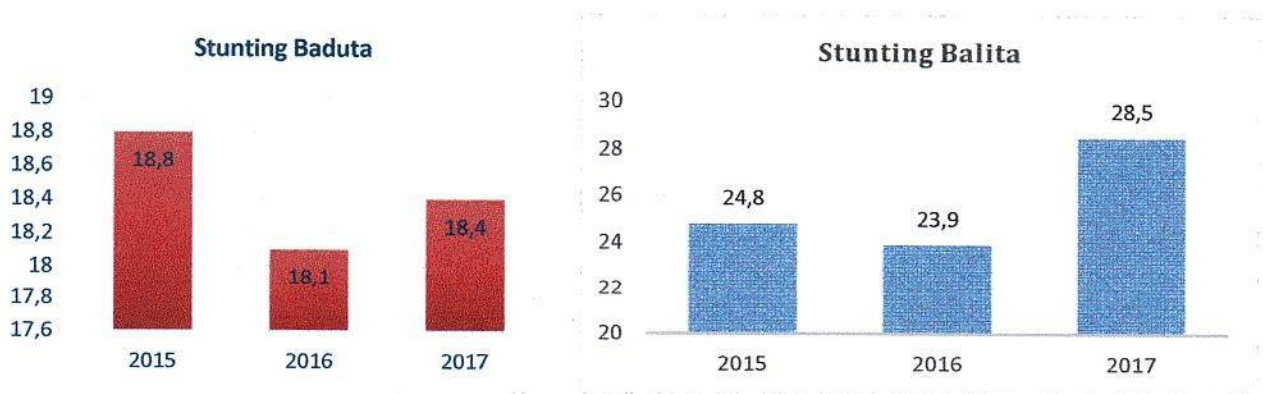
Ketersediaan pangan utama beras pada tahun 2013 sebesar 5.812.848 ton, meningkat menjadi 6.733.888 ton pada tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 16% (Gambar.12). Beras juga merupakan cakupan konsumsi pangan tertinggi yaitu sebesar 99,11 kg/kapita/tahun (2016), melebihi dari kondisi ideal yang ditetapkan. Sementara konsumsi kelompok pangan yang lain (umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah) masih di bawah standar ideal. Hal ini menunjukkan ragam konsumsi pangan di Jawa Tengah masih sangat tergantung pada beras.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 13. Ketersediaan Pangan Utama Beras Tahun 2013 -2017

Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi. Kasus gizi buruk di Jawa Tengah selama lima tahun terakhir (2013-2017) fluktuatif, pada tahun 2013 mencapai 964 dan turun menjadi 922 pada tahun 2015, selanjutnya kembali meningkat tajam menjadi 982 pada tahun 2016, pada tahun 2017 sedikit mengalami penurunan. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun (0-23 bulan) pada tahun 2015 sebesar 18,8% mengalami penurunan pada 2017 sebesar 18,4% (Gambar 2.13). Sebaliknya, pada periode yang sama untuk anak balita (0-59 bulan) mengalami peningkatan 0,37%. Prevalensi gizi buruk pada tahun 2015 sebesar 0.04 %, menurun menjadi 0.03% pada tahun 2016 dan 2017. Salah satu faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi status gizi balita adalah status gizi ibu hamil dan pola pemberian ASI eksklusif. Prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 12,62 % pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan nasional yaitu 54,9% (Sirkesnas, 2016).Cakupan ASI eksklusif dari 76,82% pada tahun 2013 menjadi 54,4% pada tahun 2017. Penurunan angka cakupan disebabkan karena peningkatan populasi bayi terutama pada tahun 2015.

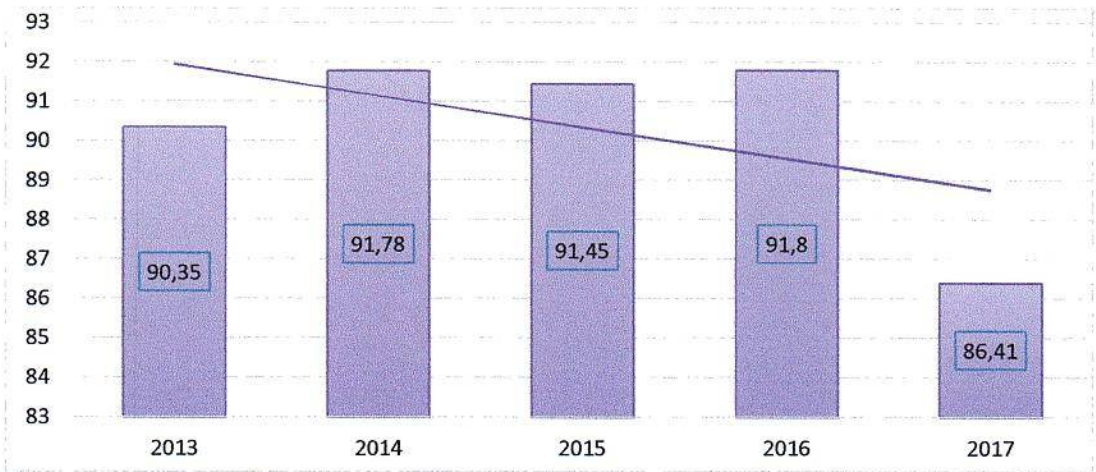


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 14. Pravelensi Stunting di Jawa Tengah Tahun 2015-2017

Permasalahan kekurangan gizi pada anak erat kaitannya dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Rendahnya ketahanan pangan rumah tangga dapat menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas asupan gizi anak. Faktor lain yang mempengaruhi adalah buruknya pola asuh terutama pemberian makanan bayi dan balita yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orangtua, buruknya kondisi lingkungan seperti akses sanitasi dan air bersih, dan rendahnya akses pada fasilitas kesehatan.

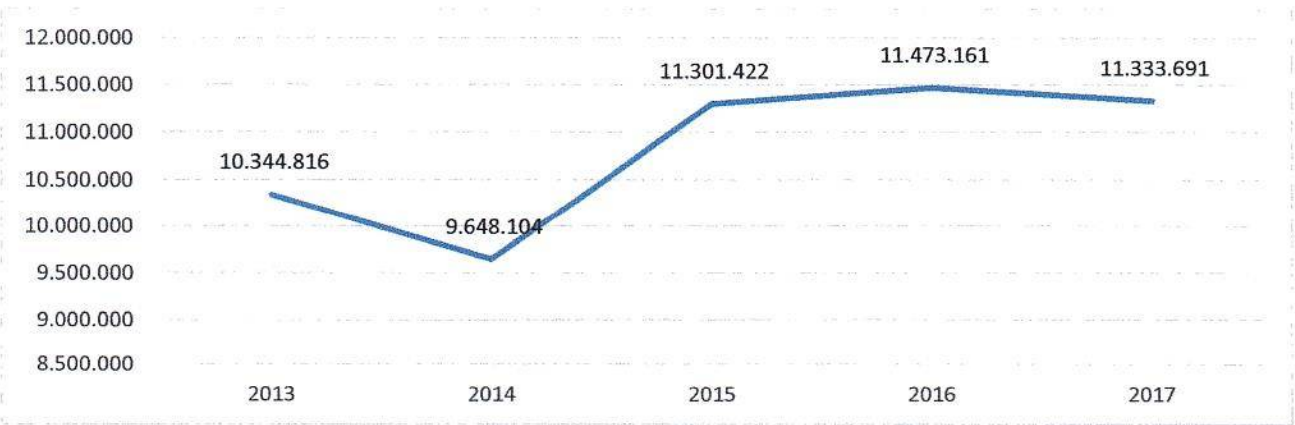
Kualitas konsumsi pangan masyarakat diukur dengan skor Pola Pangan Harapan/PPH (*Desirable Dietary Pattern*). Skor PPH ideal adalah 100 yang menggambarkan komposisi kelompok pangan utama yang dapat memenuhi kebutuhan kalori dan zat gizi lainnya untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. PPH mengalami kecenderungan meningkat dari 2013 sampai 2016, namun turun pada Tahun 2017 menjadi 86,41. Meskipun demikian, skor PPH Jateng masih lebih tinggi dibandingkan PPH nasional yang berada pada kisaran 85. Pangan bersumber padi-padian dan kacang-kacangan sudah sesuai dengan standar namun pangan lainnya seperti umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah masih di bawah standar (Gambar 2.14).



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2018

Gambar 2. 15.Skor PPH Tahun 2013-2017

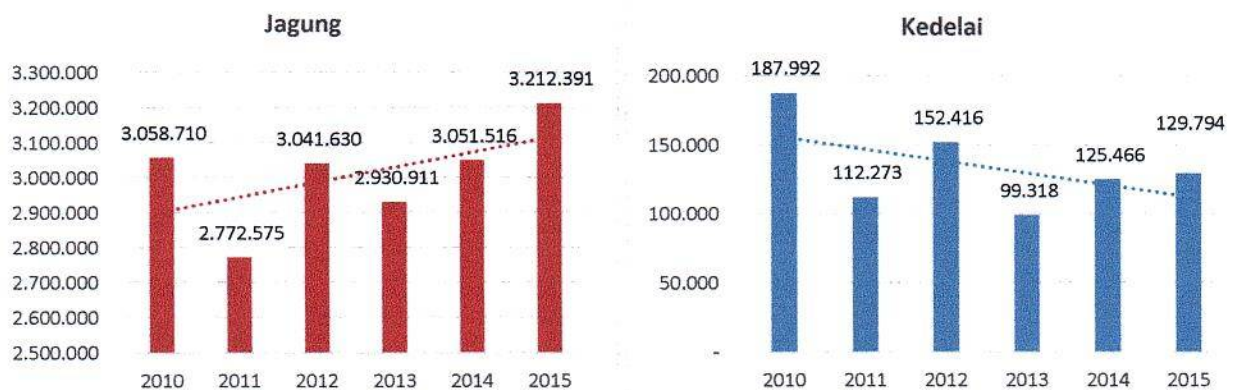
Mengandalkan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan. Pada periode 2013-2017, produksi padi fluktuatif dengan kecenderungan meningkat sebesar 9,5%. Produksi jagung dari tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan 5%, sebaliknya produksi kedelai cenderung menurun dari 187.992 pada tahun 2010 menjadi 129.794 pada tahun 2015 atau mengalami penurunan sebesar 30% (Gambar 2.16).



Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 16.Produksi Padi tahun 2013 -2017

Dalam penyediaan pangan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi sebagai berikut: Permasalahan dari aspek ketersediaan pangan, di Jawa Tengah saat ini ketersediaan pangan cukup, bahkan surplus, kecuali untuk gula dan kedelai masih membutuhkan upaya peningkatan. Dari sisi aksesibilitas, pangan dapat dijangkau masyarakat dan harga relatif stabil kecuali untuk komoditas cabai dan bawang merah; Terbatasnya infrastruktur pedesaan; Di beberapa daerah masih terjadi kasus kerawanan pangan (transien dan kronis). Tantangan yang dihadapi antara lain, adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dapat mempengaruhi pencapaian produksi pangan, sehingga berimplikasi terhadap ketersediaan pangan; Terbatasnya lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat rendah; Potensi bencana alam cukup tinggi. Oleh karena itu, arah kebijakan kedepan adalah dengan, 1) Meningkatkan ketersediaan pangan melalui koordinasi sinergi lintas sektor dalam penyediaan pangan; 2) Meningkatkan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; 3) Meningkatkan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala; 4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan melalui kemandirian pangan di tingkat rumah tangga.



Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2018

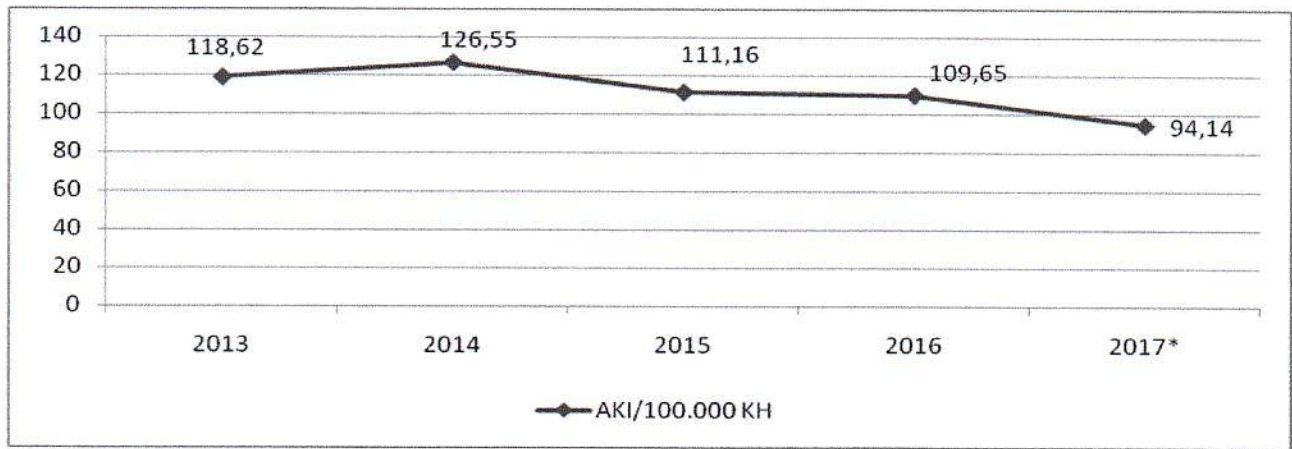
Gambar 2. 17. Produksi pangan utama jagung dan kedelai tahun 2010-2015

Permasalahan dari sisi konsumsi masih perlu peningkatan baik dari kuantitas (jumlah) maupun kualitas (keberagaman) sehingga dapat memenuhi standar kebutuhan konsumsi manusia untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Tantangan yang dihadapi adalah ketersediaan pangan yang B2ASA masih belum merata; kurangnya pengetahuan tentang pentingnya konsumsi pangan B2SA sejak usia dini. Maka kebijakan diarahkan untuk 1) Kampanye/Gerakan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA); 2) Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga; 3) Prioritas kegiatan pada lokasi *stunting*.

2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI). Salah satu upaya kunci yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi AKI adalah memastikan setiap persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 keduanya sudah mencapai 99% dan 97,6% berturut-turut. Angka Kematian Ibu (AKI) selama tiga tahun terakhir (2015-2017)

mengalami penurunan sebesar 22,58 kematian per 100.000 kelahiran hidup (Dinkes, 2017) yang berarti penurunan sebesar 1,12% setiap tahun (*Annual Reduction Rate/ARR*). Target RPJMD pada tahun 2017 sebesar 117 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup telah tercapai. Sementara, target TPB/SDGs AKI yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 artinya AKI masih menjadi prioritas untuk diturunkan.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 2. 18. Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan. Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4 Tahun 2013- 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2013	2014	2015	2016	2017*
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1	98,99	99,6	98,58	99,21	98,94
2	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K4	92,13	93,11	93,05	93,27	92,53

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKBa) mengalami penurunan. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 sebesar 10, turun menjadi 9,99 pada tahun 2016 dan kembali turun menjadi 8,93 pada tahun 2017. Pada tahun 2015, Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 sebesar 11,64 turun sebesar 10,47 pada tahun 2017, meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2016 yaitu 11,8 namun masih sesuai dengan target dalam RPJMD. Sementara itu, Cakupan jumlah neonatal yang tertangani pada tahun 2015 sebesar 87,63% mengalami penurunan penanganan menjadi 86,27%, pada tahun 2017 cakupan penanganan kembali mengalami peningkatan menjadi 88,22% dan masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD. AKB sudah diatas target TPB/SDGs sebesar 12 per

1.000 kelahiran hidup pada 2030, demikian pula dengan Angka Kematian Balita dimana target TPB/SDG sebesar 25 per 1.000 KH. Cakupan *Universal Child Immunization* (UCI) desa atau seluruh anak di desa itu telah dimunisasi mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir dari 99,95 % pada tahun 2015 menjadi 99,71% pada tahun 2016 dan kembali turun 99,94% pada tahun 2017, meskipun demikian sudah sesuai dengan target RPJMD.

Tabel 2. 2. Angka Kematian Bayi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No	Tahun	Capaian	
		Per 1.000 kh	Kasus
1	2013	10,41	5.865
2	2014	10,08	5.666
3	2015	10	5.571
4	2016	9,99	5.485
5	2017	9,6	4.843

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Selain pemberian asupan gizi yang seimbang pada usia balita, perlu diperhatikan pula pemenuhan gizi pada bayi usia 0-6 bulan yaitu terhadap kebutuhan ASI Eksklusif. Tabel berikut menunjukkan kondisi pemenuhan ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan.

Tabel 2. 3. Persentase Bayi Usia 0-6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Bayi	Jumlah Bayi yang diberi ASI Eksklusif	Cakupan (%)
2013	263.170	202.165	76,82
2014	263.049	159.571	60,66
2015	556.900	342.994	61,59
2016	555.313	291.206	54,22
2017	464.647	252.784	54,40

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Mengakhiri Epidemi Penyakit Menular. Kasus HIV/AIDS menunjukkan kecenderungan meningkat, data BPS menunjukkan kasus HIV/AIDS pada tahun 2015 mencapai 1467/1296 yang tersebar diseluruh Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jawa Tengah juga masuk dalam 10 besar propinsi dengan kasus HIV tertinggi di Indonesia. Jumlah penderita HIV/AIDS tertinggi berada di Kota Semarang sebesar 116/558, Sragen 62/130, Grobogan 65/101, Pati 47/70, Batang 99/16 dan Jepara 82/48. Jumlah penderita Tuberkolosis di Jawa Tengah pada tahun 2015 adalah 39.638 dengan jumlah pravelensi tertinggi ada di Kota Semarang, Banyumas, Cilacap dan Brebes masing-masing diatas 2 ribu orang. Angka kesakitan malaria di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 0,06 pada tahun 2015 dengan jumlah penderita 2.190 orang menjadi 0,03 pada tahun 2016 dan 2017 dan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD. Jumlah penderita tertinggi terdapat di Kabupaten Purworejo mencapai 1. 411 atau 64% dari total penderita. Sementara angka penemuan kasus baru kusta cenderung mengalami peningkatan dari 5,3 pada tahun 2015 menjadi 5,6 per

100.000 penduduk pada tahun 2017. Angka kasus filaria yang ditangani sudah menunjukkan hasil menggembirakan dengan 100 % penanganan.

Tabel 2. 4. Kondisi Penyakit Menular Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	CDR TB (%)	CR TB (%)	HIV / AIDS	
					Kasus HIV	Kasus AIDS
2013	45,52	1,21	58,46	81,39	1.045	993
2014	33,28	1,44	56	87,01	1.399	1.081
2015	47,9	1,56	117	>85	1.467	1.296
2016	43,4	1,46	118	68	1.402	1.867
2017*	17,34	1,25	121	NA	2.033	1.296

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM). Proporsi kasus hipertensi di fasyankes cukup tinggi yaitu sebesar 23,4% pada tahun 2015, namun demikian terdapat kecenderungan menurun menjadi 18,84% dan sudah sesuai dengan target RPJMD. Jumlah penyalahgunaan narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2016 baru mencapai 12% dari target yang ditetapkan dan meningkat menjadi 42% pada tahun 2017. Demikian pula dengan jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi, pada tahun 2015 baru mencapai 120 orang, sementara untuk 2016 baru 45% dan 2017 sebesar 67%, meskipun terlihat terjadi peningkatan capaian namun adanya rasionalisasi target yang semula 1180 tahun 2016 menjadi 510 pada tahun 2017. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan dari 1,94% pada tahun 2015 menjadi 1,16% pada tahun 2017. Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan juga masih belum memenuhi target RPJMD atau baru mencapai 72% pada tahun 2017 atau dengan jumlah 184 orang. Badan Narkotika Nasional juga memberikan bantuan kepada Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA untuk tahun 2016 tercatat 4 lembaga dan 2017 meningkat menjadi 19 lembaga penerima bantuan. Permasalahan mendasar yang menjadi penyebab adalah 1) kurang sadarnya penyalahguna narkoba yang mengakses layanan, 2) kurangnya lembaga rehabilitasi narkoba/NAPZA di Jawa Tengah baik milik pemerintah/ masyarakat, 3) masih rendahnya kualitas layanan lembaga rehabilitasi narkoba/NAPZA yang ada di Jawa Tengah baik milik pemerintah/ masyarakat. Tantangan kedepan yang perlu diperhatikan adalah, 1) Pemahaman dampak penggunaan narkoba, 2) mendorong berdirinya lembaga rehabilitasi narkoba/NAPZA, 3) peningkatan kualitas layanan. Untuk mencapainya maka arah kebijakan yang diperlukan 1) sosialisasi program rehabilitasi, 2) dukungan anggaran untuk lembaga rehabilitasi narkoba/NAPZA, 3) dukungan anggaran peningkatan kemampuan dan asistensi peningkatan mutu layanan.



Tabel 2. 5. Kondisi Penyakit Tidak Menular Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017

Tahun	Jenis PTM		
	Diabetes Milletus	Hipertensi	Kanker
2013	110.860	427.220	8.011
2014	95.340	337.220	576
2015	100.448	324.320	5.801
2016	30.432	96.968	1.215
2017*	94.890	262.327	4.099

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Berdasarkan data BKKBN di Jawa Tengah, angka kelahiran total (*total fertility rate*/TFR) pada tahun 2015 sebesar 2,42 jumlah anak per 1.000 WUS (15-49 tahun), mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 2,27 sedikit selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu 2,46 pada tahun 2017 dan melebihi target yang ditetapkan di RPJMD. Sementara itu, angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR) pada tahun 2015 sebesar 34 kelahiran Per 1000 perempuan (15-19 tahun), namun pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan, berturut-turut 25,61 dan 24 atau rata-rata baru mencapai 79% dari target RPJMD. Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan sesuai target RPJMD. Dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan reproduksi, angka pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate*/CPR) semua cara meningkat dari 78,24 (2015) menjadi 78, 64% (2016). Sementara itu, angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern sepanjang 3 tahun terakhir 2015-2017 mengalami penurunan, dari 25,7 tahun 2015 menjadi 14,2 % tahun 2017. Namun, capaian tersebut menurun pada tahun 2017 menjadi 76, 89%. *Unmet need* atau kebutuhan pelayanan kesehatan yang tidak terpenuhi di Jawa Tengah meningkat dari 10,48% pada tahun 2015 menjadi 11,71% pada tahun 2017 sementara RPJMD menargetkan 9,25% pada tahun 2017 target tersebut belum tercapai sehingga perlu merumuskan terobosan-terobosan program yang efektif dan efisien. Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan partisipasi pendidikan perempuan untuk mencegah pernikahan dini; 2) peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan 3) peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi terutama bagi anak usia sekolah.

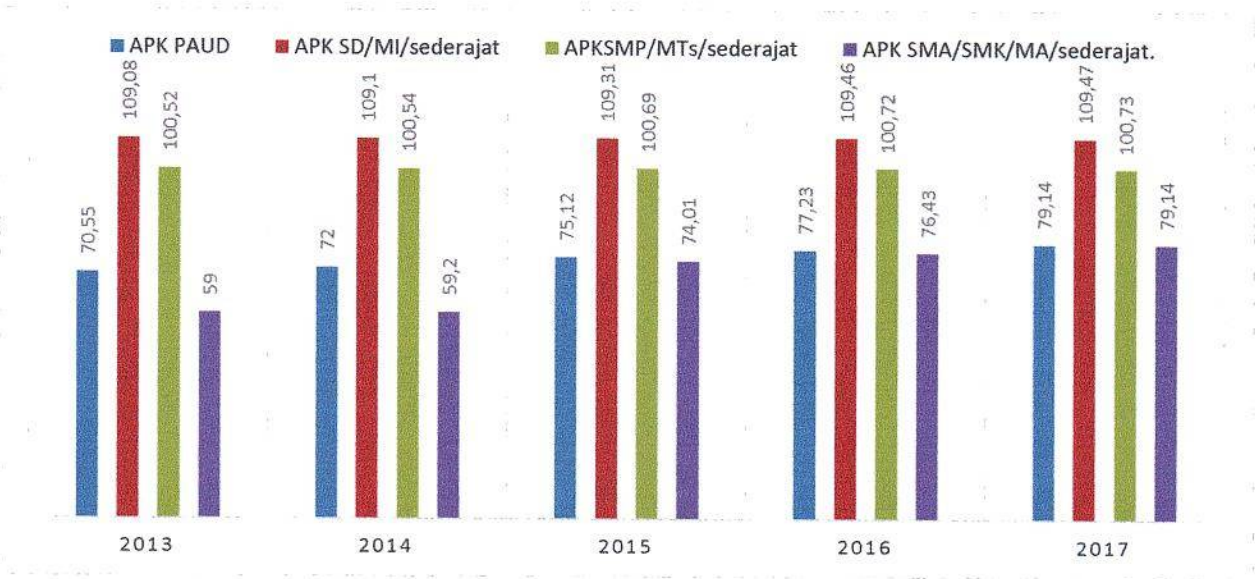
Mencapai Cakupan Kesehatan Universal. Jumlah penduduk yang tercakup dalam Jamianan Kesehtana Nasional (JKN) di Jawa Tengah perlu terus ditingkatkan. Sampai dengan tahun 2016, sebanyak 22,65 juta penduduk telah menjadi peserta. Pelaksanaan cakupan kesehatan universal perlu diarahkan pada upaya pemerataan pelayanan kesehatan antarwilayah. Upaya ke depan diantaranya: 1) menjangkau kepesertaan JKN dari pekerja informal dan pekerja penerima upah; 2) memperluas kerja sama BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta/mandiri; dan 3) meningkatkan akses pada fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah.

Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin. Tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin

meningkat. Distribusi dan kualitas tenaga kesehatan berdasarkan data BPS 2017 sudah cukup merata di setiap Kabupaten/Kota dan menjangkau sampai ke pelosok desa. Terdapat 273 Rumah Sakit, 206 Rumah Bersalin, 875 Puskesmas/*Public Health Center*, 48.831 Posyandu Maternal, 1.166 Klinik/Balai Kesehatan, 931 Polindes. Jumlah dan jenis sarana distribusi obat yang diawasi di Jawa Tengah, sampai dengan Mei 2017 meliputi 322 PBF/Perusahaan Besar Farmasi, 3.438 apotik dan pelayan obat terdiri dari 87 toko obat, 35 GFK, 58 Rumah Sakit milik pemerintah dan 224 Rumah Sakit milik swasta.

2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

Partisipasi pendidikan penduduk Jawa Tengah. Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 3-6 tahun, tingkat partisipasi pendidikan terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat partisipasi PAUD usia 3-6 tahun sebesar 0,5% dari 70,55% (2013) menjadi 79,14% (2017). Peningkatan partisipasi PAUD ini tidak terlepas dari tingginya peran dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, tingkat pendidikan penduduk pada jenjang pendidikan dasar sampai SMA terus meningkat. Partisipasi pendidikan pada jenjang SD/MI/ sederajat sudah mencapai lebih dari 100%, pada tahun 2017 sudah mencapai 109,47%. Demikian pula untuk APK SMP/MTs/ sederajat terus mengalami peningkatan mencapai lebih dari 100,73% pada tahun 2017. Tingkat partisipasi jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat juga mengalami peningkatan cukup signifikan dari 59% (2013) menjadi 79,14% (2017) atau 20%. Gambar 2.17. menampilkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat hingga jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat.



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 19. Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan Usia Dini (PAUD) sampai dengan SMA/SMK/MA/ sederajat 2015-2017

Disparitas pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Akses masyarakat terhadap pendidikan di Jawa Tengah sudah cukup merata yang ditunjukkan dengan persentase penduduk usia 7-24 tahun perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2016, Persentase Penduduk Usia 7–24 tahun menurut jenis kelamin dan partisipasi sekolah di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan antara laki-laki dan perempuan memiliki rasio yang setara yaitu 1,011, rasio tertinggi ditingkat PT

yang mencapai 1,5, sementara ditingkat pendidikan dasar 0,95 (Tabel 2.6). Presentase laki-laki yang bersekolah 70,76% hampir sama dengan perempuan yaitu 69.96%. Demikian pula untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) antara laki-laki dan perempuan hampir setara, rasio sebagian besar mencapai 1.

Tabel 2. 6.Persentase Penduduk Usia 7 –24 tahunmenurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan

Jenis kelamin	Tidak/Belum pernah sekolah	Masih Sekolah					Tidak sekolah lagi	Jumlah
		SD	SMP	SMA	PT	Jumlah		
laki-laki	0,42	36,33	16,45	13,62	3,55	69,96	29,62	100,00
Perempuan	0,43	34.63	17,04	13,78	5,31	70,76	28,82	100,00
Grup total	0,42	35,49	16,74	13,70	4,42	70,35	29,23	100,00

Sumber : Susenas, 2016

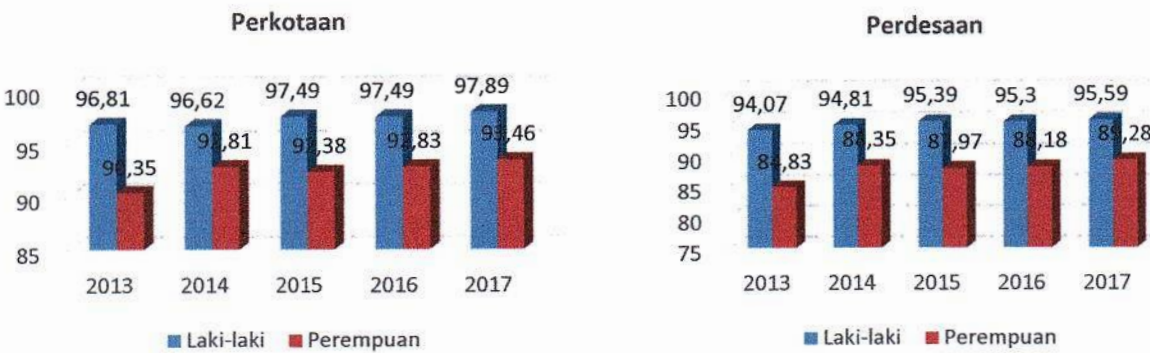
Angka Partisipasi Sekolah (APS) dengan capaian yang cukup tinggi berada pada usia 7-12 tahun, yaitu 99,58. Sedangkan capaian rendah ditunjukkan oleh penduduk usia 16-18 tahun, yaitu masih berkisar pada 67,95%.

Tabel 2. 7.Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun

Jenis kelamin	APS		
	7-12 th	13-15 th	16-18 th
laki-laki	99,57	94,65	68,09
Perempuan	99,59	96,17	67,8
Grup total	99,58	95,41	67,95

Sumber : Susenas, 2016

Angka Melek Huruf. Selama lima tahun terakhir (2013-2017), jumlah penduduk laki-laki baik di pedesaan maupun diperkotaan yang melek huruf menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Sementara angka melek huruf di perkotaan rata-rata lebih tinggi jika dibanding di perdesaan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan laju peningkatan capaiannya maka terdapat kecenderungan peningkatan angka melek huruf di pedesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, angka melek huruf selama lima tahun terakhir di perkotaan untuk penduduk laki-laki meningkat 1,09%, sementara di pedesaan 1,52%. Untuk penduduk perempuan diperkotaan pada tahun 2013 sejumlah 90,35% meningkat menjadi 93,46% pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 3,11 %, pada periode yang sama di pedesaan meningkat dari 84,83 menjadi 89,28 atau meningkat sebesar 4,45 %.

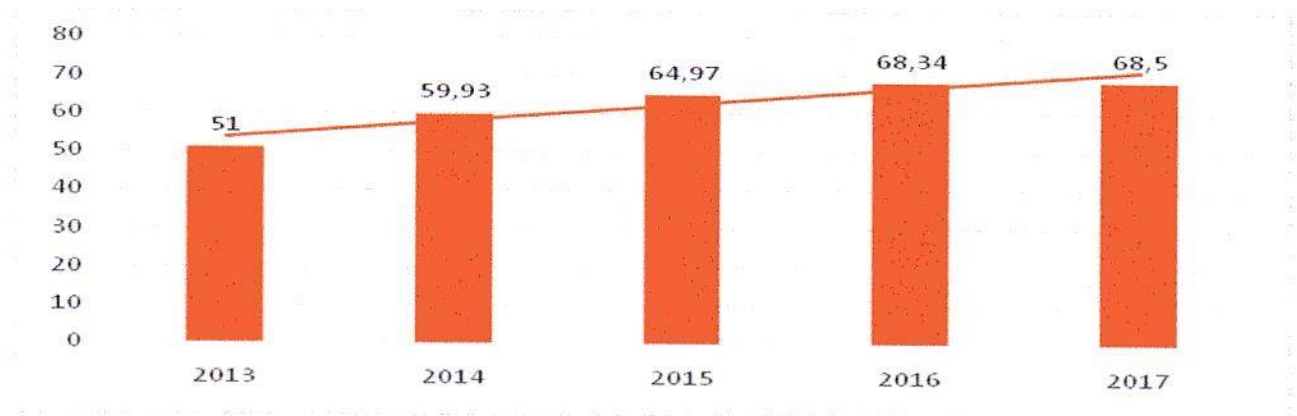


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 20. Angka Melek Huruf Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Perkotaan + Perdesaan Tahun 2013-2017

4

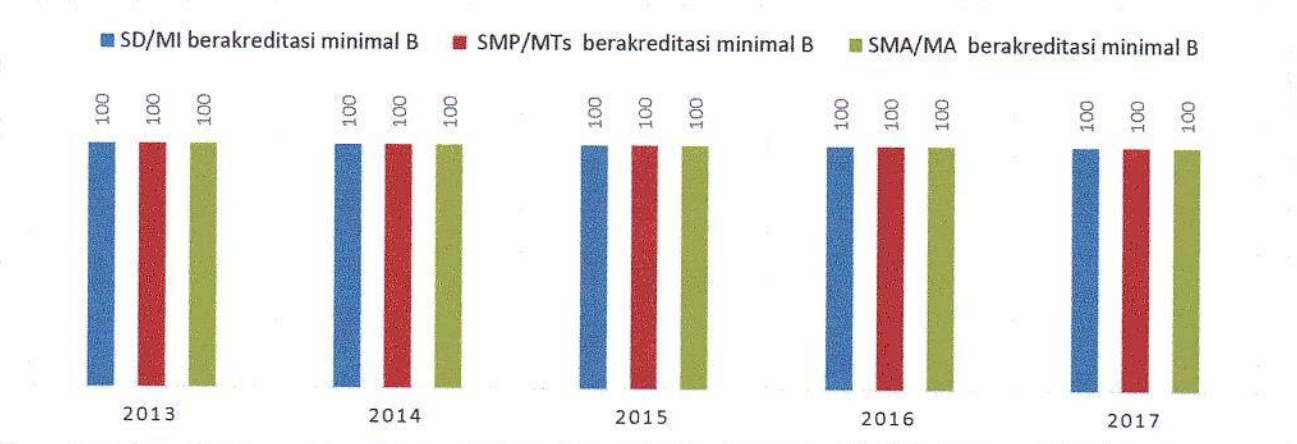
Kualitas Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan. Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan proses pengembangan diri guru secara terus menerus untuk membangun kualitas pembelajaran yang lebih baik. Persentase pendidik SMA/SMALB/MA/SMK bersertifikat pendidik di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi dari tahun 2013 ke 2016 sebesar 17,5 % atau rata-rata 4,37% per tahun, dengan laju peningkatan tertinggi ada di tahun 2014, yaitu 9%. Dari gambaran ini, diharapkan bahwa guru yang berkualitas akan semakin meningkat.



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 21.Persentase pendidik SMA/SMALB/MA/SMK bersertifikat pendidik di Jawa Tengah

Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2013-2017), persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MAN yang terakreditasi sudah mencapai 100 %.

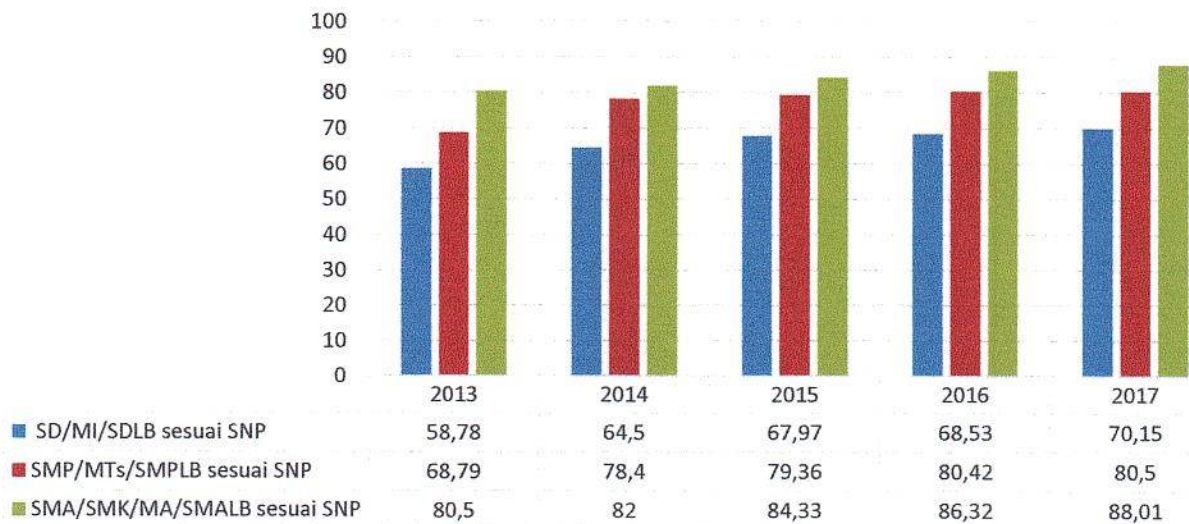


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 22.Persentase pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MAN yang terakreditasi di Jawa Tengah

Untuk mendukung peningkatan pendidikan yang inklusif maka peningkatan kualitas sarana prasana menjadi sangat penting. Presentase ruang kelas baik dijenjang pendidikan dasar, menengah dan atas selama lima tahun terakhir (2013-2017) mengalami peningkatan, dengan laju peningkatan tertinggi ada di jenjang pendidikan menengah 11,71%, pendidikan dasar 11,71 % dan pendidikan atas 7,51%. Namun dilihat dari presentasinya sarpras di SMA lebih baik yaitu mencapai 88%, diikuti SMP 80,5% dan SD 70,15% pada tahun 2017.



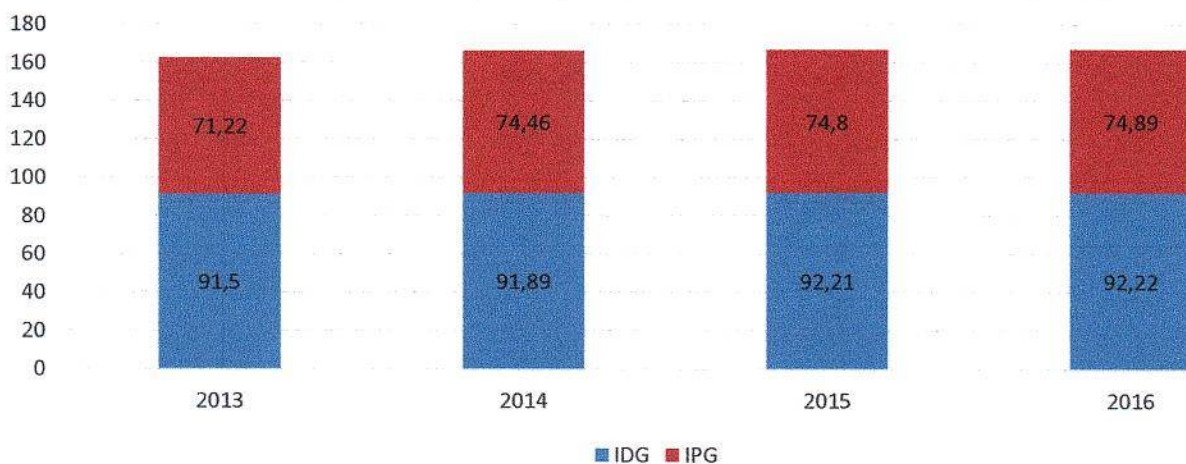


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

Gambar 2. 23.Ketersediaan Sarpras Tahun 2013-2017

2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

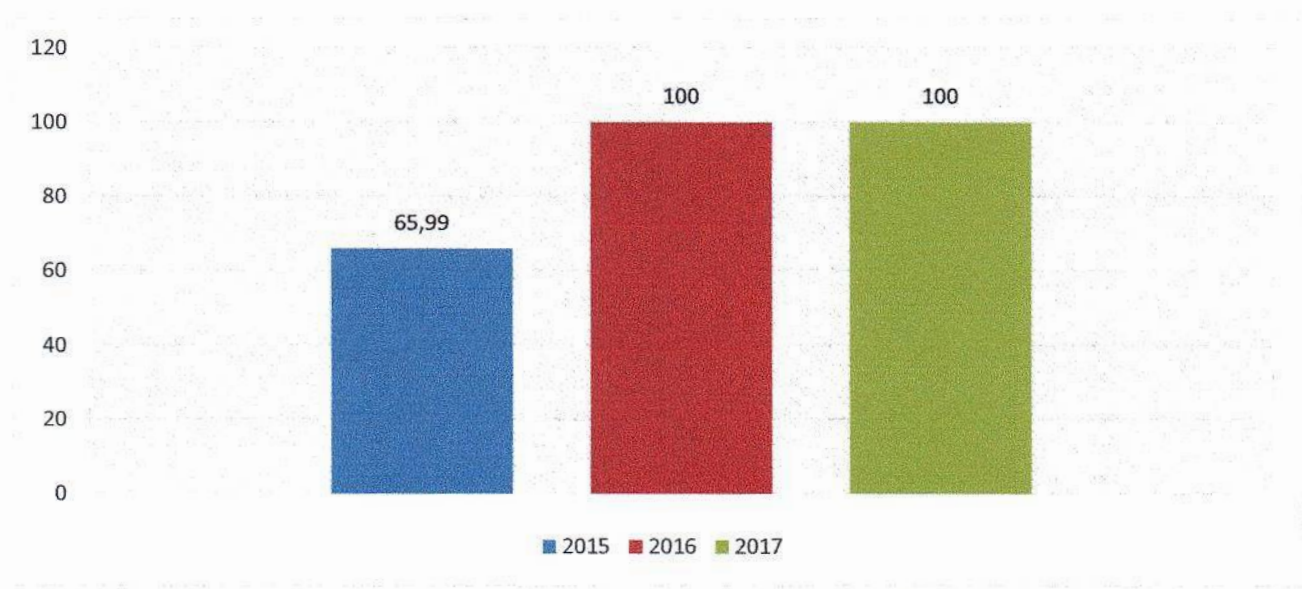
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah dua indeks penting untuk melihat capaian pembangunan kesetaraan gender. Jawa Tengah meraih capaian perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun untuk kedua indeks tersebut. IPG pada tahun 2016 mencapai 92,22% naik 0,7 % dari Tahun 2013. Sementara untuk IDG pada tahun 2016 mencapai 74,89 naik 3,67 % dari Tahun 2013. Capaian IPG dan IDG Jawa Tengah berada diatas rata-rata nasional, pada tahun 2016 IPG nasional pada angka 90,82 dan IDG 71,39. Jika dibandingkan dengan Provinsi di Jawa Bali, IPG Jawa Tengah beradad posisi ke empat setelah DKI, DIY dan Bali. Sementara IDG menempati posisi tertinggi.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 24.Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Jawa Tengah

Rasio Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJMD, Rencana Strategis OPD menunjukkan kecenderungan meningkat bahkan selama 2 tahun terakhir 2016 dan 2017 sudah mencapai 100% dari sebelumnya 65,99% pada Tahun 2015 atau meningkat cukup signifikan 34%.

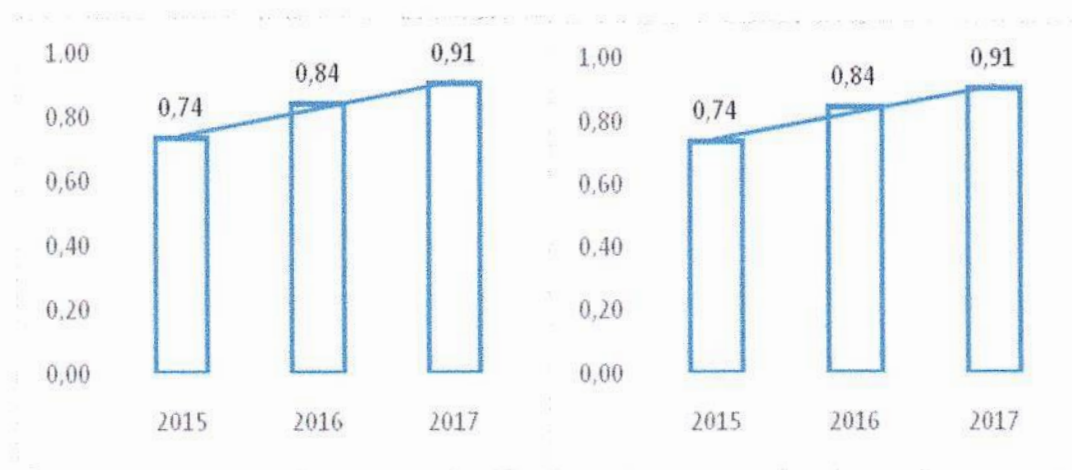


Sumber : DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 25. Rasio Kebijakan Responsif Gender dalam RPJMD

Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Kekerasan terhadap anak menjadi fenomena yang terus berkembang. Hal ini ditunjukkan dari prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan juga cenderung meningkat selama tiga tahun terakhir sebesar 1,7%, atau rata-rata 0,57 % per tahun dari 0,74 pada tahun 2015 menjadi 0,91 tahun 2017. Oleh karena itu

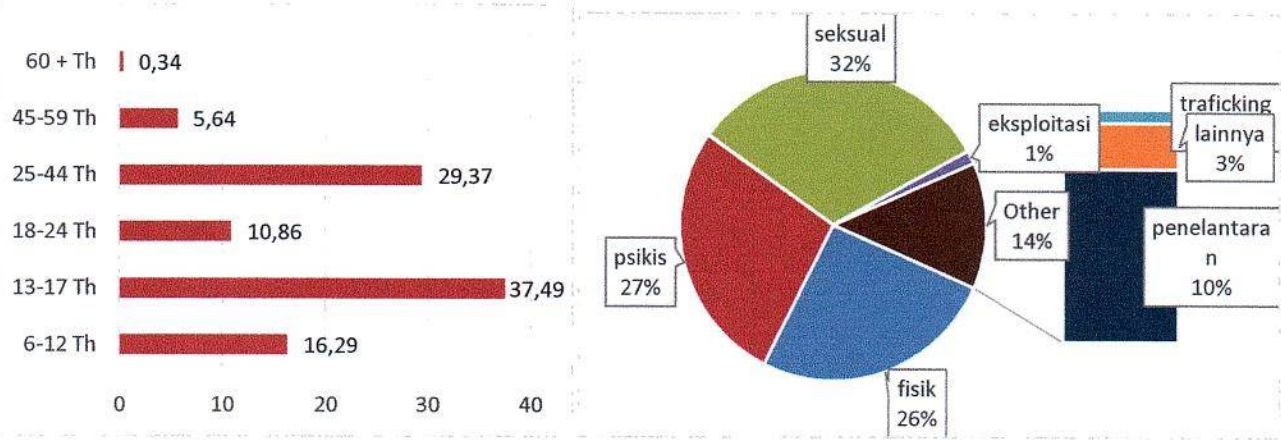
anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus dan penanganan secara khusus yang melibatkan orang tua, keluarga, pemerintah, dan peran serta masyarakat. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan terlayani selama tiga tahun terakhir sudah mencapai 100%.



Sumber : DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 26. Prevalensi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan dan Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Terlaporkan Terlayani Tahun 2015-2017

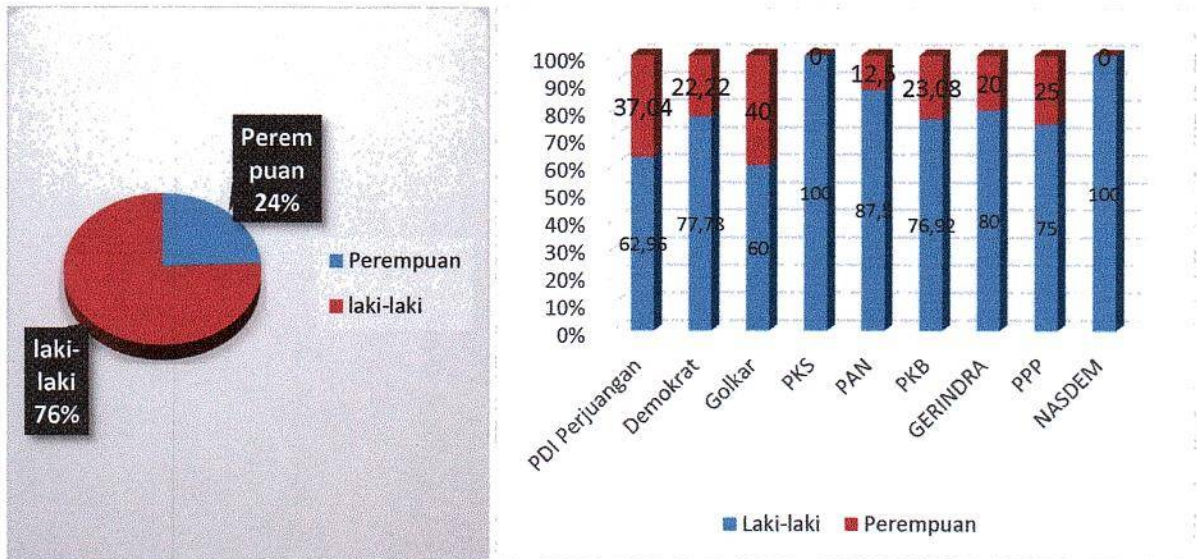
Sementara jika dilihat dari kelompok umur, kekerasan terhadap perempuan paling banyak dialami oleh perempuan pada kelompok umur 13-17 Tahun. Dengan jenis kekerasan fisik, psikis dan seksual menjadi jenis kekerasan terbesar terhadap perempuan sebagai korban kekerasan.



Sumber : DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 27.Kekerasan Terhadap Perempuan pada Berbagai Kelompok Umur dan Jenis Kekerasan

Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, serta Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin. Demokrasi memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh warga negara termasuk perempuan untuk dipilih sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif. Pada Pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah baru mencapai 24% (BPS 2016). Apabila dilihat menurut masing-masing partai, peran perempuan rata-rata masih lebih kecil dibanding laki-laki, PKS dan Nasdem masih 100% didominasi oleh laki-laki. Persentase perempuan sebagai pengambil keputusan di Pemerintah juga masih rendah yang ditunjukkan oleh persentase pejabat perempuan eselon I adalah 15,6% sedangkan di eselon II adalah 22,28% (BKN, 2016). Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan kapasitas bagi: 1) perempuan kader partai politik; 2) perempuan sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat; 3) perempuan calon kepala daerah; 4) perempuan anggota legislatif yang terpilih; dan 5) perempuan sebagai kepala daerah. Tantangan lain dalam meningkatkan keterwakilan perempuan adalah melakukan “affirmative action” terutama melalui terobosan politik.



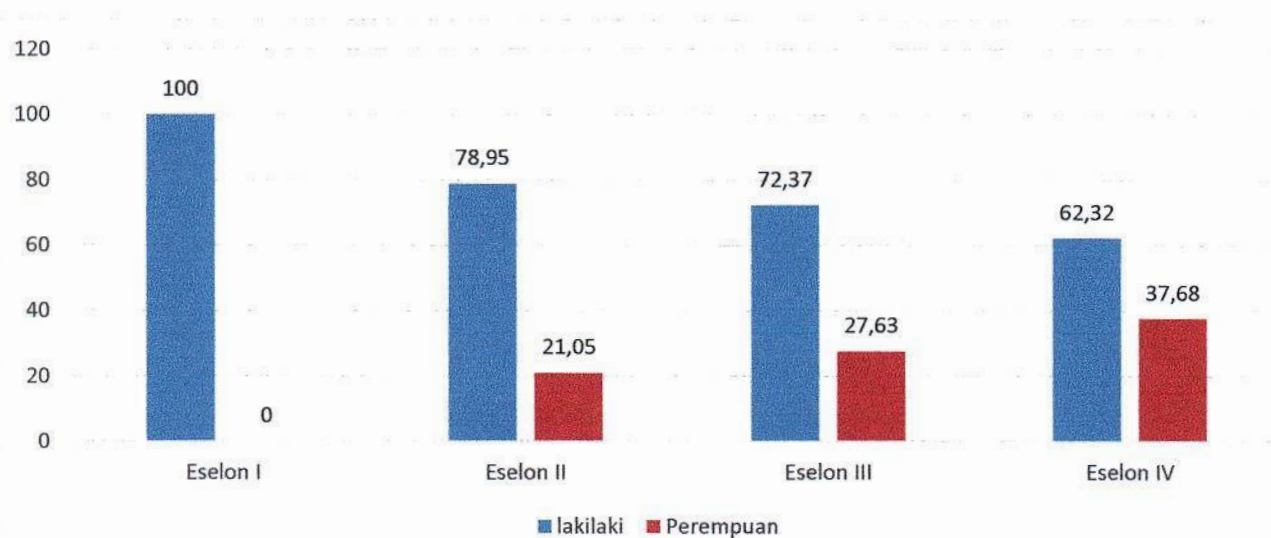
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016

Gambar 2. 28. Keterwakilan Perempuan di DPRD

Secara umum keterwakilan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi dari tahun 2016 sampai 2017 menunjukkan peningkatan dari 47,72% menjadi 49,3%. Jumlah keterwakilan perempuan sebagai pejabat di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah masih sangat rendah, untuk pejabat



eselon I 100% didominasi oleh laki-laki, sementara pejabat eselon IV sampai II keterwakilan perempuan menunjukkan kecenderungan penurunan, semakin tinggi eselon semakin menurun jumlah PNS perempuan. Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan kapasitas bagi: 1) perempuan kader partai politik; 2) perempuan sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat; 3) perempuan calon kepala daerah; 4) perempuan anggota legislatif yang terpilih; dan 5) perempuan sebagai kepala daerah. Tantangan lain dalam meningkatkan keterwakilan perempuan adalah melakukan “*affirmative action*” terutama melalui terobosan politik.



Gambar 2. 29. Gambaran Laki-laki – Perempuan dalam Pejabat Eselon

Menghapus Semua Praktik Berbahaya. Prevalensi perkawinan usia anak (<20 tahun) tergolong sangat rendah, namun mengalami kenaikan dalam 2 tahun terakhir. Data tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,01%, meningkat menjadi 2,19 dan menjadi 1,11 tahun 2017. Rendahnya preferensi perkawinan usia anak berkorelasi positif dengan meningkatnya pendidikan perempuan (BPS). Sejak tahun 2015, APK perempuan terhadap laki-laki pada jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat terus meningkat mencapai 78,01 pada tahun 2017.

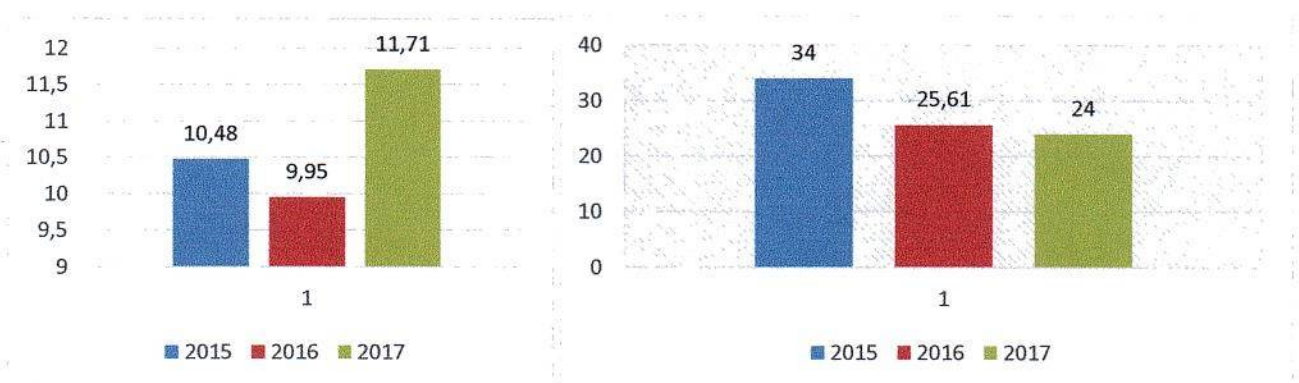


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 30. Prevalensi Perkawinan Usia Anak dan APK

Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak Reproduksi. *Unmet Need* pelayanan KB meningkat dari 10,48 % pada tahun 2015 menjadi 11,71% pada tahun 2017. Sejalan dengan pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern

justro menunjukkan *trend* menurun dari 34% menjadi 24% pada periode yang sama.



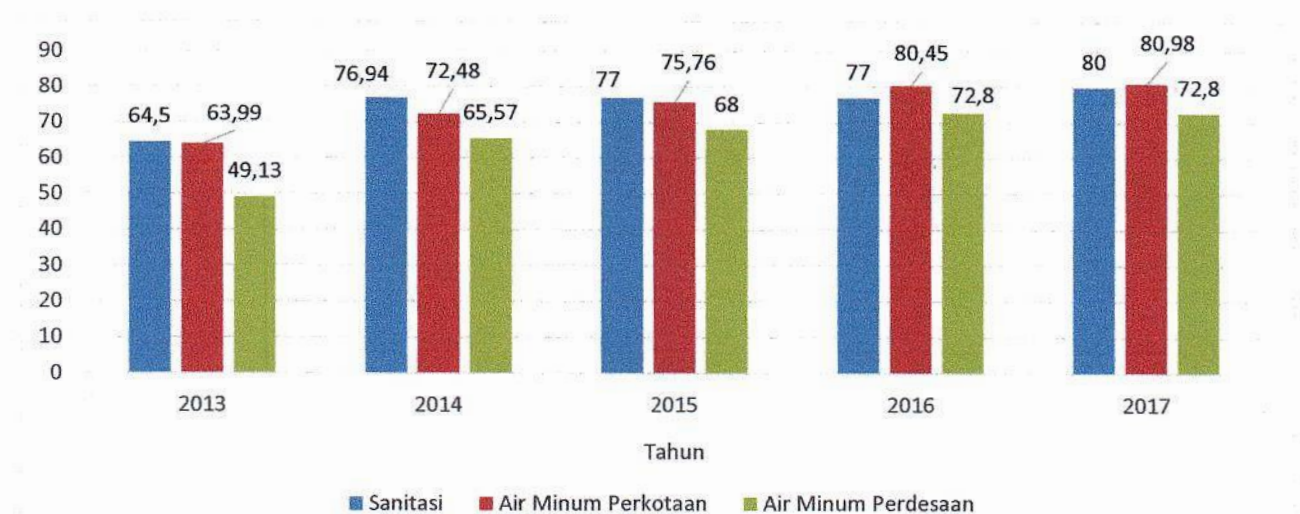
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 31. *Unmet Need* pelayanan KB dan pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS)

Untuk menjamin perempuan mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi, pendidikan dan pelayanan kepada remaja sepanjang tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama. Selanjutnya, untuk pelaksanaannya telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tantangan yang dihadapi adalah pelaksanaan advokasi dan KIE yang efektif responsif gender yang dapat meningkatkan kesertaan ber-KB. Tantangan lainnya adalah peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah serta manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi.

2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

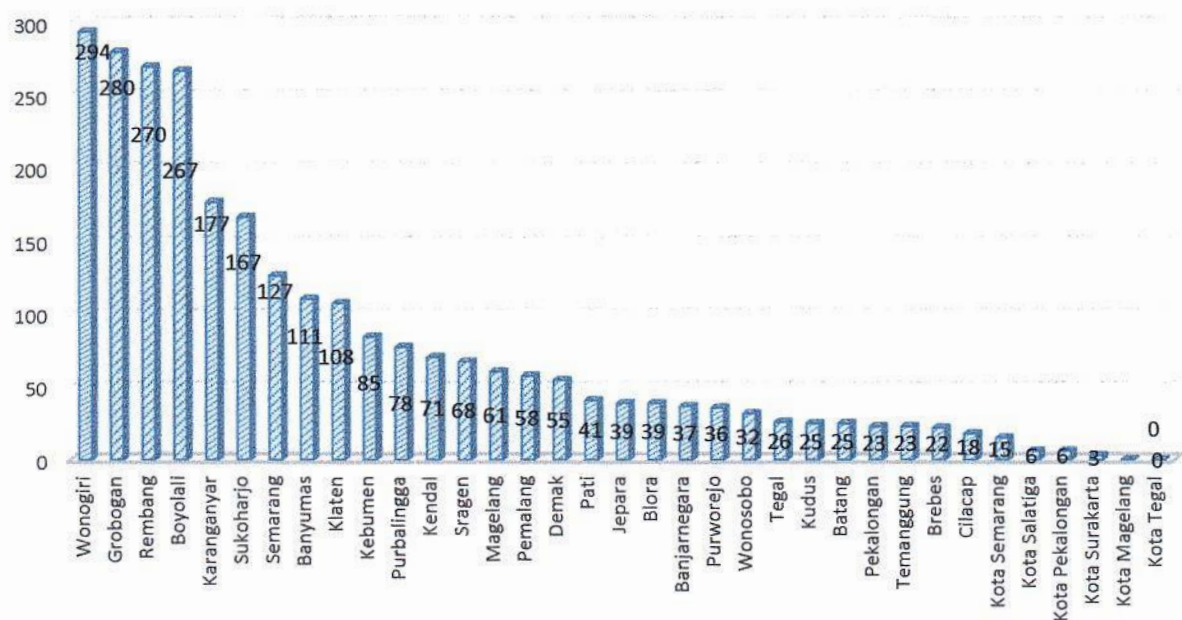
Air Bersih dan Sanitasi Layak bukan hal baru di Jawa Tengah. Terutama untuk sanitasi yang telah digaungkan sejak tahun 2010 oleh Pemerintah Pusat dan diikuti Pemerintah Daerah melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2010-2015. Momentum ini juga sudah dilakukan saat pelaksanaan MDGs tahun 2011-2015. Sejalan dengan hal tersebut, RPJMD Jawa Tengah 2013-2018 menyatakan bahwa air bersih dan sanitasi layak sebagai salah satu permasalahan pembangunan daerah dalam rumpun infrastruktur. Air bersih (dalam hal ini air minum layak) dan sanitasi layak termasuk dalam infrastruktur fisik untuk layanan dasar, guna menunjang aktivitas kehidupan masyarakat. Saat ini, penyediaan air minum dan sanitasi layak belum menjangkau seluruh masyarakat Jawa Tengah. Tahun 2015 merupakan tahun terakhir pelaksanaan MDGs, dengan target cakupan air minum layak perkotaan sebesar 75% dan perdesaan sebesar 52,8%. Hasil yang menggembirakan ditunjukkan melalui capaian tahun 2015 untuk cakupan air minum layak perkotaan sebesar 75,76% dan perdesaan sebesar 68% sudah melampaui target MDGs. Demikian pula dengan cakupan sanitasi layak tahun 2015 sebesar 77% telah melampaui target MDGs sebesar 72%. Namun demikian, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menyelesaikan pemenuhan cakupan air minum layak bagi 19,02% masyarakat perkotaan dan 27,2% masyarakat perdesaan serta sanitasi bagi 20% masyarakat.



Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 32. Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Layak Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Sejalan dengan peningkatan cakupan sanitasi layak, Pemerintah menggalakkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF). *Open Defecation Free* (ODF) merupakan suatu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan dengan desa/kelurahan yang 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat.



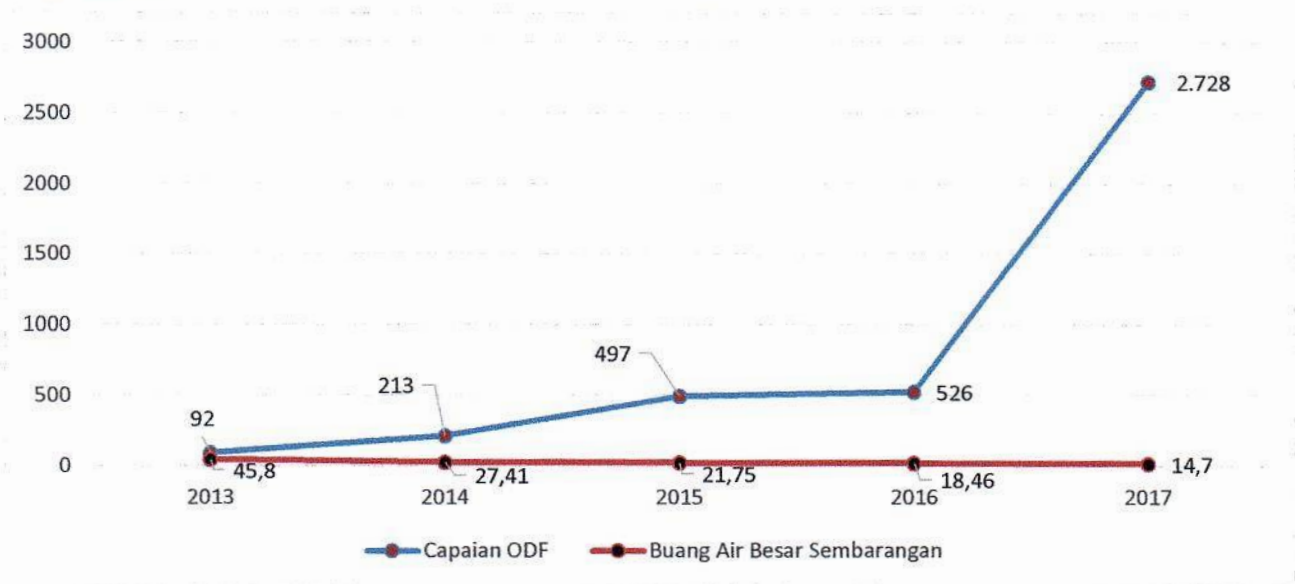
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 33. Desa/Kelurahan yang Telah Diverifikasi sebagai ODF Tahun 2017

Pada tahun 2017, 80% desa/kelurahan di Jawa Tengah telah dipicu untuk pelaksanaan ODF, terdapat di 7 Kabupaten/Kota yaitu: Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo, Kota Surakarta, Boyolali, Rembang dan Kota Semarang. Tahun 2016, Kabupaten Grobogan menjadi kabupaten pertama yang meraih status “Bebas Buang Air Besar Sembarangan” untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara pelaksanaan program ODF dengan penurunan perilaku Buang Air Bebas Sembarangan (BABS). Hal tersebut ditunjukkan pada gambar di atas, dimana semakin banyak cakupan intervensi

ODF yang diberikan, maka akan menurunkan jumlah perilaku masyarakat terhadap BABS. Berikut ini gambar persandingan antara capaian pelaksanaan ODF dengan perilaku BABS di Jawa Tengah pada tahun 2017.

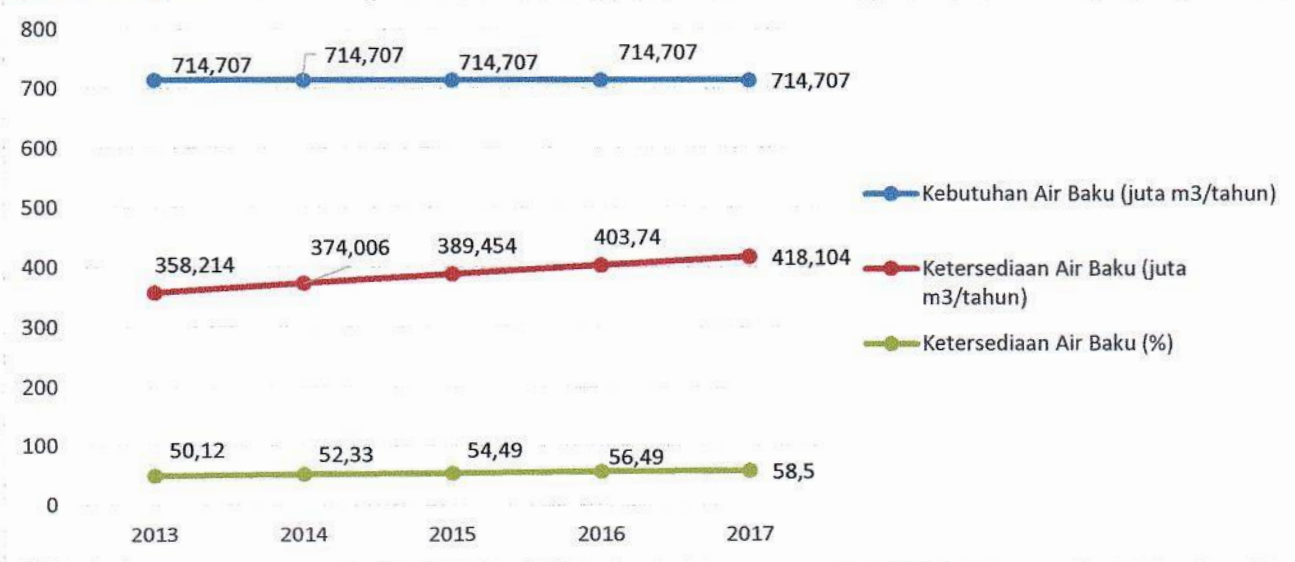


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 34. Persandingan Capaian ODF dengan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Tahun 2017

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemenuhan cakupan air minum dan sanitasi layak yaitu : (1) Penyediaan pasokan air bersih baik di perkotaan dan perdesaan, (2) Sistem penyediaan air minum dan sanitasi, (3) Penurunan kualitas sumber air baku, (4) Kesadaran masyarakat akan kualitas lingkungan masih kurang, (5) Keterbatasan lahan di perkotaan berdampak pada belum optimalnya sistem pengolahan tinja individual serta (6) Peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang belum diikuti dengan peningkatan penyediaan sarana prasarana pembuangan air limbah.

Pemenuhan kebutuhan akan ketersediaan air baku di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ditunjukkan dengan peningkatan persentase tingkat ketersediaan air baku pada tahun 2017 menjadi 58,50%, dibandingkan tahun 2016 sebesar 56,49%.



Sumber : Dinas PU SDA Taru Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 35. Pemenuhan Ketersediaan Air Baku Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Kebutuhan akan air baku masih melebihi ketersediaan, walaupun pemerintah sudah berusaha meningkatkan ketersediaan air baku setiap tahunnya. Ketersediaan air baku meningkat sebesar 14,364 juta m³ pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya 403,74 juta m³. Selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air baku mencapai 296,603 juta m³/tahunnya.

Dalam rangka pemenuhan terhadap air bersih, maka sumber air baku harus mencukupi dan berkualitas. Potensi air yang ada di Jawa Tengah sebesar 64,012 x 10⁹ m³/tahun, diperoleh dari wilayah-wilayah sungai Cimanuk Cisanggarung, Pemali Comal, Bodri Kuto, Jratun Seluna, Bengawan Solo Hulu, Progo Opak Serang Hulu dan Serayu Bogowonto. Namun demikian, hanya 2 sungai yang menjadi kewenangan provinsi yaitu Pemali Comal dan Bodri Kuto.



Sumber : Dinas PU SDA Taru Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 36. Potensi Sumber Daya Air di Jawa Tengah Tahun 2017

Pemulihan dan pemeliharaan sumber air dan ekosistemnya dapat dilakukan melalui penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS). Upaya lain yang dilakukan antara lain pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah. Sampai dengan tahun 2015 sudah dilakukan pengendalian dan penegakan hukum dalam penggunaan air tanah bagi 500 obyek sumur, sedangkan tahun 2016 sebanyak 473 dan 550 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat serius dalam menangani pengendalian penggunaan air tanah.

Selain itu, internalisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) ke dalam RTRW telah dilakukan oleh Pemprov Jateng. RTRW Provinsi Jawa Tengah disusun dengan memperhatikan/ mempertimbangkan 21 RPDAST yang telah disusun, terdiri dari : 1 RPDAST yang diampu BPDAS Solo, 8 RPDAST yang diampu BPDAS Serayu Opak Progo dan 12 RPDAST yang diampu BPDAS Pemali Jratun. Sedangkan jumlah DAS prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan hingga tahun 2015 sejumlah 11, dan terus ditambahkan sejumlah 8 DAS pada tahun 2016 dan 6 DAS tahun 2017. Pemulihan kawasan DAS juga dapat dilakukan melalui pengembangan hutan serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), hingga tahun 2015 sudah mencapai luasan 13.225 ha, meningkat pada tahun 2016 dan 2017 seluas 13.305 ha dan 13.325 ha.

Keberadaan dan kondisi sungai sebagai salah satu sumber air baku adalah hal yang penting. Kondisi sungai di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami peningkatan, dari 51,66% pada tahun 2013 meningkat menjadi 52,06%. Namun demikian, berdasarkan hasil informasi status mutu air dan hasil analisis kualitas air tahun 2012-2017, kondisi sungai Garang, Serayu, Pemali, Lusi, Kupang, Sambong, Tuntang, Serang, anak Sungai Bengawan Solo, Wulan, Luk Ulo, Bogowonto, Gung, dan Babon status mutu airnya adalah dalam kategori tercemar ringan sampai sedang.

2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

Peningkatan daya saing perekonomian Jawa Tengah menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian. Salah satu titik berat peningkatan daya saing perekonomian diarahkan pada ketahanan energi khususnya pasokan energi primer dan optimalisasi penggunaan gas dan batubara, serta menghindari ketergantungan berlebihan pada impor atau pada jenis energi tertentu. Dalam rangka mencapai ketahanan energi, sisi penyediaan maupun permintaan harus mendapat perhatian yang sama. Pada sisi penyediaan perlu dilakukan optimalisasi pasokan minyak bumi, gas, batubara serta peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi. Optimalisasi penyediaan energi dapat dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas infrastruktur energi. Pada sisi pemanfaatan, perlu terus digalakkan dan ditingkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor.

Dengan sistem interkoneksi Jawa – Madura – Bali, kebutuhan energi di Jawa Tengah tidak hanya dipenuhi dari pembangkit yang ada di Jawa Tengah, akan tetapi juga dipasok dari pembangkit yang ada di Jawa Barat maupun Jawa Timur.

Sektor konsumsi energi listrik di Jawa Tengah dibagi menjadi 4 sektor, yaitu rumah tangga, bisnis/komersial, industri, dan publik (sosial, pemerintah, dan PJU). Konsumsi energi listrik di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 8. Perkembangan Konsumsi Energi Listrik per Sektor Tahun 2007 – 2016 (dalam GWh)

Tahun	Rumah Tangga	Bisnis	Industri	Publik	Total
2007	5.763	1.165	4.256	876	12.058
2008	5.984	1.343	4.466	896	12.689
2009	6.461	1.509	4.527	935	13.432
2010	6.873	1.632	4.891	1.024	14.419
2011	7.322	1.715	5.236	1.057	15.330
2012	7.912	1.834	5.738	1.129	16.614
2013	8.532	2.007	6.476	1.200	18.215
2014	9.311	2.154	6.898	1.278	19.642
2015	9.817	2.339	6.901	1.360	20.418
2016	10.378	2.585	7.228	1.493	21.683

Sumber : RUKD Tahun 2017, Dinas ESDM Prov. Jateng, 2017

Sektor yang paling banyak mengkonsumsi energi listrik di Jawa Tengah pada kurun waktu 2007 – 2016, adalah sektor rumah tangga (47,63%), industri (34,42%), bisnis (11,11%), dan publik (6,84%). Rata-rata pertumbuhan konsumsi energi listrik tahun 2007 – 2016 untuk sektor rumah tangga di Jawa Tengah

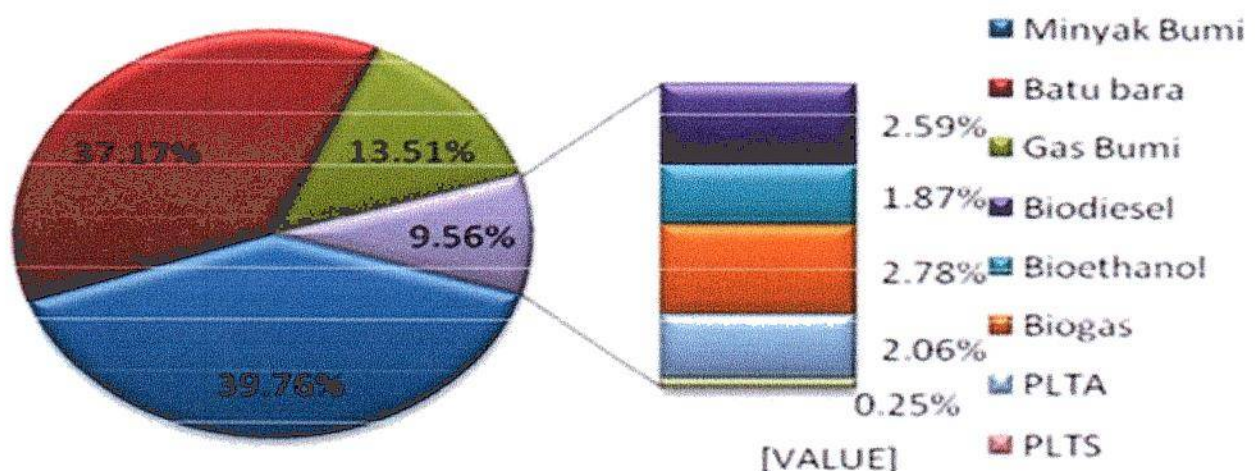


sebesar 6,77% per tahun, sedangkan untuk sektor bisnis sebesar 9,30 % per tahun, sektor industri sebesar 6,13% per tahun, dan sektor publik sebesar 6,13% per tahun.

Konsumsi energi listrik di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan, hal ini juga mempengaruhi pertumbuhan beban puncak di Jawa Tengah setiap tahunnya. Pertumbuhan beban puncak akan mempengaruhi kebutuhan gardu induk di Jawa Tengah. Hal ini diperlukan untuk menjamin keandalan dari sistem tenaga listrik di Jawa Tengah. Pembebanan maksimal dari trafo GI maksimal 80% dari kapasitas maksimal trafo. Total kapasitas trafo pada GI di saluran transmisi pada tahun 2016 sebesar 12.037 MVA, beban maksimal yang dapat dipikul oleh trafo dengan pembebanan 80% sebesar 9.629,60 MVA. Pada tahun 2017 diperkirakan beban puncak di Jawa Tengah sebesar 3.479 MVA, sehingga kebutuhan trafo pada gardu induk sampai dengan kondisi saat ini masih surplus dibanding dengan konsumsi listrik di Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pemanfaatan sumber daya energi nasional yang diarahkan untuk ketenagalistrikan adalah sebagai berikut : (a) Sumber energi terbarukan dari jenis energi aliran dan terjunan air, energi panas bumi (termasuk skala kecil /modular), energi gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, energi angin, energi sinar matahari, biomassa dan sampah; (b) Sumber energi baru berbentuk padat dan gas; (c) Gas bumi, batubara.

Melaksanakan amanat Kebijakan Energi Nasional, selain pembangkit yang terinterkoneksi dengan sistem transmisi dan distribusi, di Provinsi Jawa Tengah sudah terbangun pembangkit listrik dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan / EBT lokal, (PLTMH, PLTS SHS/komunal yang digunakan untuk daerah yang letaknya jauh dari pusat pembangkit. Disamping pengembangan EBT, kebijakan lain yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pelaksanaan konservasi energi terutama di sektor rumah tangga, bisnis, dan umum. Konservasi energi dapat dilaksanakan dengan mengganti peralatan dengan peralatan hemat energi, dan menerapkan pola hidup hemat energi.



Sumber : RUKD Tahun 2017, Dinas ESDM Prov. Jateng, 2017

Gambar 2. 37.Bauran Energi Jawa Tengah Tahun 2017

Dari diagram energi mix pembangkit listrik di Jawa Tengah pada tahun 2016 di atas, dapat terlihat bahwa sumber energi yang paling banyak digunakan adalah batubara (87,99%); EBT (6,25%); gas bumi (3,92%), dan minyak bumi

(1,84%). Sumber energi EBT yang sudah banyak dimanfaatkan berupa potensi terjunan air, panas bumi, dan intensitas matahari. Porsi penggunaan EBT untuk pembangkit listrik di Jawa Tengah, terdiri dari : (a) Pembangkit Hidro (PLTA, PLTM, PLTMH) sebesar 88,8%; (b) Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) sebesar 11,04%; (c) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 0,16%.

Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan meminimalisir konsumsi BBM, maka perlu digalakan pengembangan energi terbarukan yang potensinya tersebar luas di provinsi Jawa Tengah. Setidaknya target nasional, yaitu pemanfaatan EBT paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050 dapat tercapai, sehingga dapat mensubstitusi penggunaan energi dari fosil.

Pencapaian pembangunan terkait dengan energi, terlihat dari pencapaian indikator Rasio Elektrifikasi (RE) yang menunjukkan jumlah KK yang sudah berlistrik. RE Jawa Tengah semakin meningkat dari tahun ke tahun, sampai dengan tahun 2017, RE Jawa Tengah telah mencapai sebesar 96,3%. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, antara lain dengan pembangunan jaringan listrik pedesaan dan pemasangan sambungan listrik murah bagi masyarakat miskin.

Tabel 2. 9. Rasio Elektrifikasi dan Upaya Peningkatan Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No	Uraian	Sampai dengan Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Elektrifikasi (%)	85,29	88,37	91,10	93,51	96,3
2	Pembangunan jaringan tegangan menengah (JTM)	32,228	41,962	51,10	53,77	60,09
3	Pembangunan jaringan tegangan rendah (JTR) (kms)	33,098	41,147	50,36	50,90	55,93

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2018

Jawa Tengah memiliki banyak potensi energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti energi fosil. Sumber energi terbarukan yang banyak dikembangkan di Jawa Tengah berupa energi surya, terjunan air, panas bumi, bioethanol, biofuel, biomassa, biogas, dan gas rawa. Berikut pemanfaatan energi terbarukan yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat JawaTengah.

Dalam rangka mendukung kedaulatan energi, diperlukan peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi diantaranya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), gas rawa dan biogas.

Program upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan RBT dalam bauran energi di Jawa Tengah diantara lain dengan pembangunan PLTMH, PLTS, demplot gas rawa dan bio gas. Perkembangan pemanfaatan EBT dan upayanya selama tahun 2012-2016 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2. 10.Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Tahun 2013-2017

No	Uraian	Sampai dengan Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi (%)	6,1	7,01	7,80	8,85	9,56
2	Pembangunan PLTMH (unit)	10	12	13	0	0
3	Pembangunan PLTS SHS (unit)	2.865	3.069	3.069	3.069	3.125
4	Pembangunan Demplot Gas Rawa (unit)	7	9	9	9	11
5	Pembangunan Demplot Biogas	55	65	74	84	120
6	Sambungan listrik murah	-	100	1.100	2.175	8.338

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2017

Selain itu dalam meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan dan meningkatkan akses listrik bagi masyarakat telah dibangun PLTS di Kepulauan Karimunjawa yaitu Pulau Parang dan Pulau Nyamuk dengan kapasitas 336 kwp (kilowatt peak) dan pemanfaatan sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang menjadi listrik *on-grid* PLN dengan kapasitas 1,3 MW.

Arah pembangunan Jangka Menengah tahap III RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 bidang energi adalah pengembangan sistem pembangunan kelistrikan yang diarahkan pada pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik daerah dan peningkatan kemampuan pelayanannya, yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber baru di wilayah potensial untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) termasuk penggunaan mikrohidro (pembangkit listrik mini) terutama di wilayah pedesaan.

Fokus pembangunan energi Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 adalah Pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; pengembangan listrik murah dan hemat; pengembangan energi baru terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomassa, gas rawa, mikro hidro dan tenaga surya; serta budaya hemat energi.

Tantangan pelaksanaan pembangunan energi di Jawa Tengah adalah penyediaan energi untuk industri, perlu penguatan kehandalan sistem dan sistem pasokan bagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam upaya mendorong investasi dan perlunya pemerataan ketersediaan listrik utamanya untuk Rumah Tangga Miskin, serta peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih rendah.

2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Ekonomi Jawa Tengah tahun 2017 tumbuh stagnan sebesar 5,27 persen. Selama rentang waktu 5 tahun, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berfluktuasi secara positif dari 5,14% tahun 2013 menjadi 5,27% pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 38. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (%)

Struktur perekonomian daerah Jawa Tengah tahun 2017 masih didominasi tiga lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan (35,54%); perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (13,68%); serta pertanian, kehutanan dan perikanan (12,03%). Pada tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga pada sektor perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil sepeda motor naik posisinya pada urutan kedua. Hal ini perlu mendapat perhatian karena penurunan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan belum diikuti dengan menguatnya sektor industri pengolahan sebagai pendukung utama pertumbuhan PDRB Jawa Tengah dari sisi kemandirian bahan baku produk industri.

Di sisi lain, sektor perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor diharapkan dapat menjadi pendukung pertumbuhan PDRB Jawa Tengah secara mantap dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang mampu berkontribusi pada belanja pemerintah dan masyarakat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 11. Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (%)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,84	14,78	15,55	15,06	12,03
B	Pertambangan dan Penggalian	1,94	2,12	2,30	2,51	2,70
C	Industri Pengolahan	35,21	35,84	35,08	34,90	35,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,009	0,09	0,09	0,09	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	10,01	10,1	10,23	10,24	10,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,97	13,50	13,36	13,43	13,68
H	Transportasi dan Pergudangan	2,85	2,97	3,14	3,05	3,26
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,95	3,01	3,06	3,18	3,28

Lapangan Usaha		Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
J	Informasi dan Komunikasi	3,11	3,07	3,02	3,03	3,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,82	2,76	2,82	2,93	3,01
L	Real Estate	1,6	1,63	1,66	1,66	1,71
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,33	0,34	0,36	0,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2,97	2,85	2,86	2,86	2,94
P	Jasa Pendidikan	4,04	4,18	4,15	4,27	4,48
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,78	0,81	0,83	0,85	0,89
R,S T,U	Jasa Lainnya	1,42	1,48	1,45	1,52	1,58
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Tahun 2017 dari sisi lapangan usaha didukung secara merata melalui sektor transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor informasi dan komunikasi.

Sedangkan laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha pada tahun 2017 terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 18,81 %; jasa perusahaan sebesar 11,23%; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,99%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 12.Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (%)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,15	0,95	5,60	2,13	1,46
B	Pertambangan dan Penggalan	6,17	6,66	3,05	18,73	5,19
C	Industri Pengolahan	5,45	6,61	4,81	4,09	4,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,31	6,50	2,43	7,57	5,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	3,45	1,63	2,17	6,51
F	Konstruksi	4,90	4,38	6,00	6,88	7,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,72	4,79	3,97	5,10	6,10
H	Transportasi dan Pergudangan	9,33	9,26	7,80	6,66	6,30
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	4,51	7,61	6,79	6,40	6,59
J	Informasi dan Komunikasi	7,99	13,00	9,53	8,31	13,27

Lapangan Usaha		Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,89	4,12	8,02	9,67	5,38
L	Real Estate	7,70	7,19	7,59	6,80	6,49
M,N	Jasa Perusahaan	12,12	7,97	8,49	10,62	8,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2,65	0,78	5,31	2,37	2,57
P	Jasa Pendidikan	9,53	9,37	7,55	7,64	7,15
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	7,12	11,37	6,61	9,86	8,6
R,S T,U	Jasa Lainnya	9,24	8,5	3,21	8,62	8,99
PDRB		5,14	5,27	5,47	5,28	5,27

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

PDRB Jawa Tengah tahun 2017 ditinjau dari pengeluaran, didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga, namun di sisi lain perlu untuk komponen pengeluaran pada konsumsi pemerintah utamanya pada belanja infrastruktur dan sarana pendukung perekonomian wilayah yang mampu mendorong pergerakan pada sektor riil dan meningkatkan konsumsi lembaga swasta dari sisi pembiayaan. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 13. Kontribusi PDRB Jawa Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2017 (%)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Konsumsi Rumah Tangga	62,70	61,84	61,35	60,98	61,05
2	Konsumsi Lembaga Swasta	1,12	1,17	1,13	1,12	1,12
3	Konsumsi Pemerintah	8,35	8,19	8,43	8,05	12,20
4	PMTB	29,18	29,76	30,53	30,55	32,70
5	Perubahan Inventori	4,92	2,93	1,41	0,75	-0,45
6	Ekspor	37,79	39,94	38,19	38,08	44,21
7	Impor	44,05	43,83	41,05	39,54	50,83
	PDRB Total	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Nilai PDRB Jawa Tengah tahun 2017 ADHK pada sektor industri pengolahan sebesar Rp. 308,820 trilyun; diikuti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp.129,342 Trilyun; kemudian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp.118,125 Trilyun. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 14. Nilai PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Tengah

LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016	2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	108.832.110	107.793.380	113.826.299	116.250.931	118.125.650

LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016	2017
B. Pertambangan dan Penggalan	14.594.164	15.566.648	16.040.765	19.044.524	20.373.380
C. Industri Pengolahan	254.694.118	271.526.773	284.575.766	296.227.398	308.820.970
D. Pengadaan Listrik dan Gas	813.604	866.488,30	887.584	954.806	976.550
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	549.040	567.980	577.261	589.805	628.210
F. Konstruksi	73.465.919	76.681.876	81.286.113	86.875.267	92.762.020
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	105.825.306	110.899.193	115.299.085	121.181.123	129.342.180
H. Transportasi dan Pergudangan	22.760.150	24.868.280	26.807.881	28.592.166	29.867.330
I. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	21.812.570	23.471.641	25.064.275	26.668.736	28.425.800
J. Informasi dan Komunikasi	26.663.583	30.130.161	33.001.271	35.742.555	40.485.500
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	19.311.454	20.106.851	21.719.194	23.820.513	24.877.930
L. Real Estate	12.853.218	13.776.863	14.822.295	15.829.477	16.856.960
M,N. Jasa Perusahaan	2.340.118	2.526.615	2.741.142	3.032.330	3.296.650
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20.912.828	21.075.646	22.194.694	22.720.443	23.304.540
P. Jasa Pendidikan	24.930.587	27.266.220	29.324.081	31.563.635	33.819.290
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.312.609	5.916.710	6.307.617	6.929.495	7.525.670
R,S,T,U. Jasa lainnya	10.983.732	11.917.818	12.300.030	13.360.350	14.561.840

LAPANGAN USAHA	2013	2014	2015	2016	2017
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	726.655.118	764.959.150	806.775.362	849.383.564	894.050.470

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Nilai PDRB Jawa Tengah Tahun 2017 ADHB pada sektor industri pengolahan sebesar Rp.414,988 trilyun; diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp.167,246 trilyun; kemudia perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp.161,416 trilyun. Secara rinci dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2. 15. Nilai PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah (juta rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	131.450.708	140.435.086	157.201.723	164.362.129	167.246.890
B. Pertambangan dan Penggalian	16.069.715	19.653.818	22.930.220	26.887.087	30.022.900
C. Industri Pengolahan	292.260.728	329.025.312	355.520.043	380.224.396	414.988.830
D. Pengadaan Listrik, Gas	768.193	842.921	906.760	1.049.548	1.128.080
E. Pengadaan Air	567.119	601.324	632.697	660.501	711.020
F. Konstruksi	83.050.225	93.449.794	103.406.448	112.256.139	122.936.710
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	115.983.876	124.942.793	134.953.302	146.221.632	161.416.890
H. Transportasi dan Pergudangan	23.658.240	27.668.161	31.820.374	33.958.395	38.027.790
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24.487.543	27.787.794	30.968.361	34.778.495	38.018.640
J. Informasi dan Komunikasi	25.807.431	28.403.004	30.511.263	33.075.351	39.125.740
K. Jasa Keuangan	23.426.201	25.534.862	28.846.471	32.595.994	35.219.060
L. Real Estate	13.319.138	15.037.136	16.749.472	18.172.329	19.836.980
M,N. Jasa Perusahaan	2.701.391	3.018.352	3.448.318	3.957.046	4.465.110
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	24.638.141	26.406.083	28.925.624	31.233.105	33.086.000

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Wajib					
P. Jasa Pendidikan	33.525.590	38.446.225	41.989.358	46.622.917	52.021.560
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.489.260	7.537.882	8.404.004	9.317.197	10.359.900
R,S,T,U. Jasa lainnya	11.812.509	13.680.625	14.636.521	16.658.649	18.436.730
Produk Domestik Regional Bruto	830.016.016	922.471.181	1.011.850.968	1.092.030.920	1.187.048.810

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

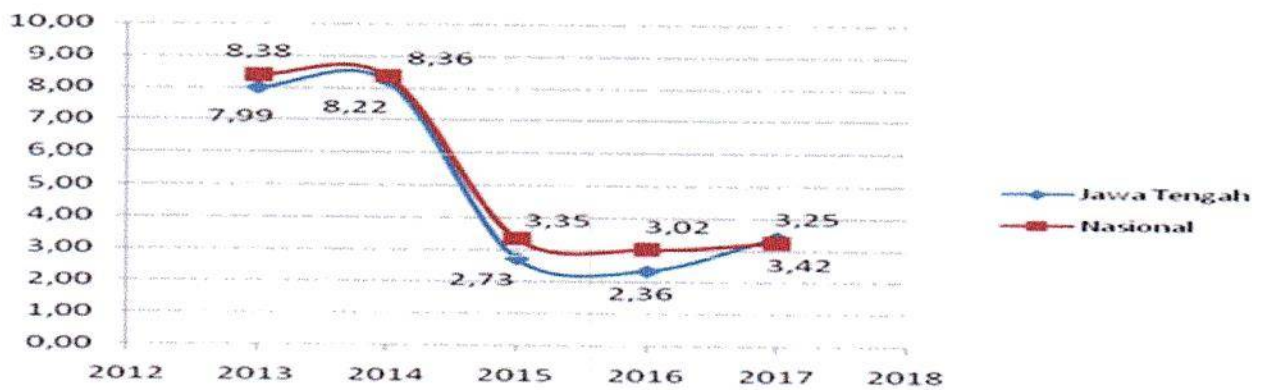
PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan pembangunan perekonomian pada suatu wilayah. Perkembangan PDRB per kapita di Jawa Tengah (ADHB dan ADHK) menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 PDRB per kapita ADHB senilai Rp.24.952.127,15 meningkat menjadi Rp.34.650.000,00 pada tahun 2017, sedangkan PDRB per kapita ADHK senilai Rp.21.844.868,71 pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp.26.141.800,00 pada tahun 2017. Secara rinci PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 16.PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (Rupiah)

Tahun	ADHB	ADHK Tahun 2010
2013	24.952.127,15	21844.868,71
2014	27.599.082,11	22.820.163,47
2015	30.025.166,49	23.882.443,78
2016	31.077.240,10	24.100.113,89
2017	34.650.000,00	26.141.800,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Angka inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2013-2017 memiliki tren menurun kemudian meningkat. Angka inflasi di Jawa Tengah tercatat pada tahun 2017 sebesar 3,42%, lebih tinggi jika dari angka inflasi tahun 2016 sebesar 2,36%. Meningkatnya inflasi tersebut antara lain disebabkan penyesuaian pada kelompok administered prices seperti penyesuaian tarif BBM dan BBM non subsidi, kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dan kenaikan barang kena cukai. Disamping itu kelompok inti seperti biaya pendidikan dan tarif komunikasi juga mengalami peningkatan. Sedangkan komoditas *volatile food* relatif terkendali.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.38. Inflasi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (%)

Berdasarkan kriteria Bank Dunia distribusi pendapatan penduduk Jawa Tengah dapat diukur menjadi tiga kelompok pendapatan. Sesuai kriteria Bank Dunia, pada tahun 2017 distribusi pendapatan penduduk Jawa Tengah tergolong merata dengan posisi ketimpangan rendah. Hal tersebut tampak dari angka 18,40% pendapatan dinikmati oleh 40% penduduk berpenghasilan rendah, sebesar 37,54% oleh 40% penduduk berpenghasilan menengah, dan sebesar 44,06% oleh 20% penduduk berpenghasilan tinggi.

Tabel 2. 17. Pemerataan Pendapatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah Menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2013-2017 (%)

No	Tahun	Kriteria Bank Dunia		
		40% Penduduk Pendapatan Rendah	40% Penduduk Pendapatan Menengah	20% Penduduk Pendapatan Tinggi
1	2013	18,38	34,55	47,07
2	2014	18,59	35,39	46,02
3	2015	18,64	34,82	46,54
4	2016	18,42	37,46	44,11
5	2017	18,40	37,54	44,06

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Kinerja pembangunan urusan penanaman modal ditunjukkan melalui indikator pertumbuhan proyek PMA dan PMDN; dan pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN. Jumlah proyek investasi di Jawa Tengah pada tahun 2013-2017 cenderung meningkat. Pada tahun 2016, sebanyak 2.068 proyek, dan meningkat lagi di tahun 2017 yaitu menjadi sebanyak 2.358 proyek, yang terdiri dari 955 proyek PMA dan 1.403 proyek PMDN.

Tabel 2. 18. Jumlah Proyek PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan LKPM Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Proyek			Pertumbuhan Proyek PMA dan PMDN (%)
	PMA	PMDN	Jumlah	
2013	148	145	293	16,73
2014	224	183	407	38,91
2015	608	873	1.481	263,88

Tahun	Jumlah Proyek			Pertumbuhan Proyek PMA dan PMDN (%)
	PMA	PMDN	Jumlah	
2016	1.060	1.008	2.068	39,64
2017	955	1.403	2.358	14,02

Sumber : DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2018

Seiring dengan meningkatnya realisasi proyek PMA dan PMDN maka realisasi nilai investasi PMA dan PMDN di Jawa Tengah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar Rp.38,183 Trilyun dengan nilai investasi PMDN sebesar Rp.24,07 Trilyun melebihi PMA sebesar Rp.14,113 Trilyun. Pada tahun 2017 capaian PMA sebesar Rp.31,673 Trilyun melebihi PMDN sebesar Rp.19,866 Trilyun. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 proyek PMA strategis dengan nilai investasi besar melakukan importasi peralatan utama/pokok yang nilainya cukup besar dari seluruh rencana investasi dan sekaligus menandakan bahwa proyek penanaman modal memasuki tahap penyelesaian.

Tabel 2. 19. Jumlah Nilai Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan LKPM Tahun 2013 – 2017

Tahun	Nilai Investasi (Rp Trilyun)			Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN(%)
	PMA	PMDN	Jumlah	
2013	4,389	12,594	16,983	113,09
2014	4,986	13,602	18,588	9,45
2015	10,63	15,411	26,041	40,1
2016	14,113	24,07	38,183	46,63
2017	31,673	19,866	51,539	34,98

Sumber : DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2018

Dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan pelayanan publik di Jawa Tengah dikeluarkan kebijakan dengan pemberian kemudahan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diukur dengan indikator Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan. Di samping itu juga adanya Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan, pengawalan (*end to end*), dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha melalui pembentukan Satuan Tugas pada tingkat nasional, Kementerian/Lembaga, daerah Provinsi, dan daerah Kabupaten/Kota.

Peningkatan dan penurunan nilai investasi di Jawa Tengah secara umum dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berpengaruh antara lain meliputi : (a) *Review* Tata Ruang yang tidak kunjung selesai sehingga menyebabkan kegamangan calon investor; (b) Kesulitan untuk memperoleh lahan industri selain lahan milik pribadi/hak milik juga maraknya spekulasi tanah; (c) Masih rumitnya penyelesaian perizinan karena adanya interlocking antar sektor selain kurangnya pemahaman ASN yang menangani perizinan.

Adapun faktor eksternal yang berpengaruh adalah : (a) Tahun politik menjadi salah satu aspek yang menjadi pertimbangan dunia usaha, karena

dikhawatirkan nantinya tidak ada kesinambungan kebijakan; (b) Persoalan pajak juga menjadi momok calon investor semenjak *tax amnesti* digulirkan yang justru menimbulkan masalah baru; (c) Daya beli masyarakat internasional yang menurun turut memberikan kontribusi kelesuan kegiatan usaha di dalam negeri.

2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Kewenangan provinsi terkait panjang jalan hanya (7,70%) dari total panjang jalan di Jawa Tengah 31.244,380 km. Sebagian besar (87,44%) merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan sisanya merupakan kewenangan Nasional (4,86%).

Tabel 2. 20. Kondisi Infrastruktur Jalan Mendasarkan Kewenangannya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Kewenangan Jalan	Kondisi Ruas Jalan								Total Panjang
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
	km	%	km	%	km	%	km	%	
Nasional	783,230	51,59	695,480	45,81	32,350	2,13	7,020	0,46	1.518,090
Provinsi	2.138,296	88,92	266,445	11,08	0,000	0,00	0,000	0,00	2.404,741
Kab/Kota*	15.092,700	55,24	5.164,359	18,90	3.773,939	13,81	3.289,231	12,04	27.319,809
Jumlah Jateng	18.014,36	57,66	6.126,275	19,61	3.806,290	12,18	3.296,250	10,55	31.242,640

Catatan :

- Sumber Kondisi Jalan Nasional : SNVT P2JN Jawa Tengah, 2018
- Sumber Kondisi Jalan Provinsi : Dinas PU Bina Marga Cipta Karya Prov.Jateng, 2018
- Sumber Kondisi Jalan Kab / Kota : Bappeda Kab/Kota se-Jawa Tengah 2018& 2017
- Kondisi Jalan Kabupaten/Kota Kondisi 2017 (34 Kab./Kota) & Tahun 2016 (1 Kab./Kota)

Kebijakan terkait Tahun infrastruktur di Jawa Tengah yang didalamnya terdapat “Gerakan Jalan Bebas Lubang” telah mampu menghilangkan kondisi rusak pada ruas jalan kewenangan provinsi dari 69,817 km pada Tahun 2016 menjadi 0 km pada tahun 2017. Adanya jalan rusak pada tahun 2016 akibat karena adanya proses alih status dari jalan kewenangan Kabupaten/Kota.

Di Jawa Tengah terdapat 6 ruas pembangunan jalan tol yang merupakan bagian dari Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa dengan total panjang jalan 324,60 km yang akan melengkapi tol di Kota Semarang yang sudah lebih dahulu terbangun sepanjang 24,75 km. Dari 324,60 km pembangunan ruas jalan Tol Trans Jawa yang sudah beroperasi sampai dengan Tahun 2017 sejumlah 5 seksi ruas tol sepanjang 64,64 km atau 19,91% dari total panjang pembangunan Tol Trans Jawa di Jawa Tengah. Ke-5 seksi ruas jalan yang telah beroperasi dimaksud yaitu : Pejagan-SS Brebes, SS Brebes-Tegal Barat, Tembalang-Ungaran, Ungaran-Bawen dan Bawen- Salatiga.

Upaya peningkatan konektivitas antar wilayah, antara lain telah dilakukan peningkatan aksesibilitas ruas jalan provinsi penghubung wilayah utara dan selatan pada 3 koridor, yaitu : Pemalang – Purbalingga – Kebumen; Pekalongan – Kajen – Dieng – Wonosobo – Purworejo dan Kudus – Purwodadi – Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri serta peningkatan jalan di 3 perbatasan antar provinsi. Peningkatan ruas jalan provinsi yang mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain akses kawasan pariwisata (utamanya akses ke Kawasan Dieng dan Candi Borobudur, akses wilayah industri dan perbatasan provinsi) terus dilakukan peningkatan secara bertahap dan terarah.

Dari 6 kawasan industri terpadu yang di rencanakan pada dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah, hanya ada 1 kawasan industri yang terdapat jalan pendukung kawasan industri yaitu di Kawasan Industri Cilacap. Jalan akses untuk 5 kawasan industri lainnya merupakan kewenangan Nasional dan Kabupaten.

Antisipasi terjadinya bottleneck pada inlet/outlet pembangunan jalan Tol Trans Jawa khususnya pada Tol Pantura, terdapat 2 ruas jalan kewenangan provinsi yang perlu untuk di rencanakan penanganannya yaitu pada ruas Pemalang – Randudongkal dan Weleri – Patean.

Mendasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 901 Tahun 2016, terdapat 11 Pelabuhan di Jawa Tengah yang terdiri dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 2 Pelabuhan Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap dan Tegal) dan 8 Pelabuhan Pengumpan Regional. Adapun rincian dari pelabuhan dimaksud sebagaimana berikut.

Tabel 2. 21. Hierarki Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

No.	Pelabuhan	Hierarki	Keterangan
1.	Tanjung Emas Semarang	Utama	2020 menjadi Pelabuhan Utama
2.	Tanjung Intan Cilacap	Pengumpul	2020 menjadi Pelabuhan Pengumpul
3.	Tegal	Pengumpul	2020 menjadi Pelabuhan Pengumpul
4.	Batang	Pengumpan Regional	2020 menjadi Pelabuhan Pengumpul
5.	Sluke Rembang	Pengumpan Regional	2020 menjadi Pelabuhan Pengumpul
6.	Tasik Agung Rembang	Pengumpan Regional	2020 menjadi Pelabuhan Pengumpan Regional
7.	Jepara	Pengumpan Regional	2020 menjadi Pelabuhan Pengumpan Regional
8.	Karimunjawa Jepara	Pengumpan Regional	2020 menjadi Pelabuhan Pengumpan Regional
9.	Juwana Pati	Pengumpan Regional	2020 menjadi Pelabuhan Pengumpan Regional
10.	Pekalongan	Pengumpan Regional	2020 menjadi



No.	Pelabuhan	Hierarki	Keterangan
			Pelabuhan Pengumpan Regional
11.	Brebes	Pengumpan Regional	2020 menjadi Pelabuhan Pengumpan Regional

Sumber : Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 901 Tahun 2016 Tentang RIPN

Sedangkan mendasarkan proses Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, rencana hierarki pelabuhan sebagai berikut: Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang dan Tanjung Intan Cilacap), 6 Pelabuhan Pengumpul (Kendal, Tegal, Jepara, Batang, Sluke Rembang dan Juwana Pati), sisanya merupakan Pelabuhan Pengumpan Regional sejumlah 6 pelabuhan dan Pelabuhan Pengumpan Lokal sejumlah 15 pelabuhan. Pelabuhan ini dimanfaatkan untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayaran dalam provinsi (pengumpan regional) atau dalam kabupaten (pengumpan lokal).

Tabel 2. 22. Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

No	Kelas Pelabuhan	Jumlah	Lokasi Pelabuhan
1.	Utama	2	Tanjung Emas Semarang dan Tanjung Intan Cilacap
2	Pengumpul	6	Kendal, Tegal, Jepara, Batang, Sluke Rembang dan Juwana Pati.
3.	Pengumpan Regional	6	Tasikagung & Sluke Rembang, Karimunjawa Jepara, Brebes, Pemalang, Kendal
4.	Pengumpan Lokal	15	Wiradesa Kab. Pekalongan; Legonbajak Jepara; Celong, Roban dan Seklayu di Batang; Losari Brebes; Bunton, Tegalkamulyan Cilacap; Morodemak Demak; Bangsri, Desa Kemujan, Kelet, Kartini di Jepara; Jongortegalsari dan Larangan di Kab. Tegal.
	Jumlah	29	

Sumber: Diolah dari Revisi RTRW Prov. Jateng Tahun 2005 - 2025, 2018

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas saat ini adalah Pengembangan Dermaga Samudera sebagai Terminal Peti kemas, Perluasan Terminal Peti Kemas tahap 2, Pemindahan Terminal Log dan Batubara ke hasil Reklamasi Tahap 1, Revitalisasi dan Penataan Kawasan Perkantoran dan Jasa maritim, Pembangunan Landmark dan Pengembangan Sistem Drainase tahap 2. Sedangkan rencana Pengembangan kedepan yaitu Pengembangan Terminal Penumpang Tahap 1, Pembangunan jalan akses terminal penumpang sisi timur, Pengembangan terminal GC, Pembangunan fasilitas pelabuhan pelabuhan rakyat, Relokasi secara bertahap aktivitas pelabuhan rakyat, Pengembangan Kawasan Logistik tahap 1, Reklamasi lanjut untuk zona curah dan docking kapal, Pemeliharaan alur dan kolam pelabuhan, Pengembangan intermoda Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Terminal Kendal tahap 1.

Terdapat 4 bandara komersial yang sudah beroperasi yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang, Adi Sumarmo Surakarta, Dewadaru Karimunjawa Jepara dan Tunggul Wulung Cilacap serta dan 2 rencana pengoperasian dan pengembangan bandara yaitu Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga (Wirasaba) dan Bandara Ngloram Kabupaten Blora.

Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang dibagi menjadi 5 paket, dimana paket pematangan lahan dan jalan akses serta paket pekerjaan apron dan taxi way telah tercapai 100%, paket pekerjaan bangunan terminal dan fasilitas penjunjang baru mencapai 29,32% dari rencana 20,24%. Paket pekerjaan bangunan pendukung dan landsekap dan water management masih dalam tahap proses lelang dan perencanaan.

Untuk Bandara Adi Sumarmo Surakarta saat ini sedang dilakukan pengembangan intermoda transportasi dengan membangun Kereta Api, Bandara yang menghubungkan bandara Adi Sumarmo dengan Stasiun Solo Balapan, dimana telah dilaksanakan pembebasan lahan, Pembangunan Jalur KA menuju bandara Adi Sumarmo, serta pembangunan jembatan pendukung jalur kereta api.

Sebagai dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Karimunjawa, telah dikembangkan Bandara Dewadaru dimana saat ini telah dilaksanakan perpanjangan runway dari 1.200 meter menjadi 1.400 meter agar dapat memenuhi kebutuhan jasa angkutan udara terkait dengan kepariwisataan dan penyusunan pembaharuan studi terkait dengan pengembangan bandara.

Bandara Tunggul Wulung Cilacap melayani penerbangan reguler dengan rute Jakarta – Cilacap (Susi Air dua kali sehari dan Pelita Air dua kali seminggu). Selain melayani penerbangan reguler, juga digunakan sebagai sarana pendidikan lima sekolah penerbangan (*flying school*) termasuk milik Kementerian Perhubungan. *Run way* sepanjang 1.400 m dengan lebar 30 meter dapat dilandasi oleh pesawat sejenis ATR 72 atau CN 235 (kapasitas 60 – 70 penumpang) atau yang lebih kecil.

Sedangkan progres pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman Kabupaten Purbalingga, telah dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* antara kementerian Perhubungan, PT. Angkasa Pura II, TNI AU, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Untuk mendukung pengembangan Jawa Tengah khususnya untuk wilayah timur akan dilakukan Pengembangan Bandara Ngloram Kabupaten Blora, dimana sampai dengan saat ini sedang dilakukan penyusunan studi kelayakan, AMDAL dan proses pembahasan pembagian hak serta kewajiban antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Blora.

Di Jawa Tengah terdapat kegiatan pembangunan rel ganda kereta api (*double track*) yang terdiri dari Lintas Utara dan Lintas Selatan. Progres pembangunan double track lintas utara Jawa sampai pada peningkatan sistem persinyalan kereta api jalur ganda di stasiun Semarang Poncol - Semarang Tawang tahap II dan dilakukan studi perencanaan pembangunan stasiun Kereta Api Bandara Ahmad Yani Semarang.

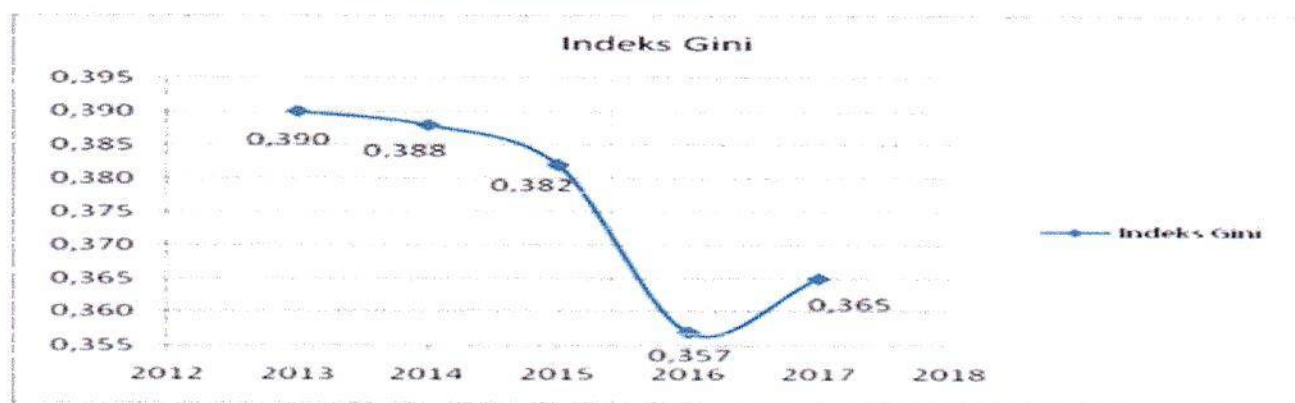
Double track lintas selatan Jawa terdiri dari *double track* Purwokerto - Kroya dan Solo - Sragen (Palur – Kedungbanteng) yang direncanakan selesai pada tahun 2018. Progres fisik pembangunan *double track* Purwokerto – Kroya pada Tahun 2017 sebesar 72,62%, sedangkan untuk Kroya – Kutoharjo sebesar 15,211%. Progres fisik pembangunan *double track* Solo – Sragen (Palur – Kedungbanteng) sudah mencapai 100% dengan panjang lintasan 27,9 Km.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 Terminal Tipe B di Jateng berjumlah 24 terminal. Namun demikian dari 24 terminal tipe B dimaksud, terdapat beberapa terminal yang kondisinya belum memenuhi persyaratan minimal operasional terminal dan secara fisik fasilitas utama serta pendukungnya mengalami kerusakan. Dari 24 terminal dimaksud, terminal yang tidak layak untuk menjadi terminal tipe B, yaitu Terminal Suronegaran dan Nampurejo di Kabupaten Purworejo serta Terminal Bintoro Kabupaten Demak.

Disisi lain dari 24 terminal tipe B terdapat 9 terminal yang status asetnya belum sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Provinsi. Gunaantisipasi hal tersebut di atas, pada tahun 2017 telah disusun RIJT Jateng. Dimana dalam salah satu rekomendasinya adalah pembangunan simpul transportasi terminal tipe B. Rencana lokasi pembangunan terminal tipe B ke depan yaitu di 10 kabupaten yaitu Kabupaten Kendal, Rembang, Pati, Jepara, Klaten, Magelang, Kebumen, Brebes, Cilacap Bagian Timur dan Bagian Barat.

2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara

Selama kurun waktu tahun 2013-2017 perkembangan Indeks Gini di Jawa Tengah menunjukkan angka yang cenderung membaik. Di kurun waktu tersebut, Indeks Gini mencapai titik timpang tertinggi pada tahun 2013 sebesar 0,390 dan titik timpang terendahnya pada tahun 2017 sebesar 0,365. Indeks Gini Jawa Tengah termasuk dalam kategori menengah.

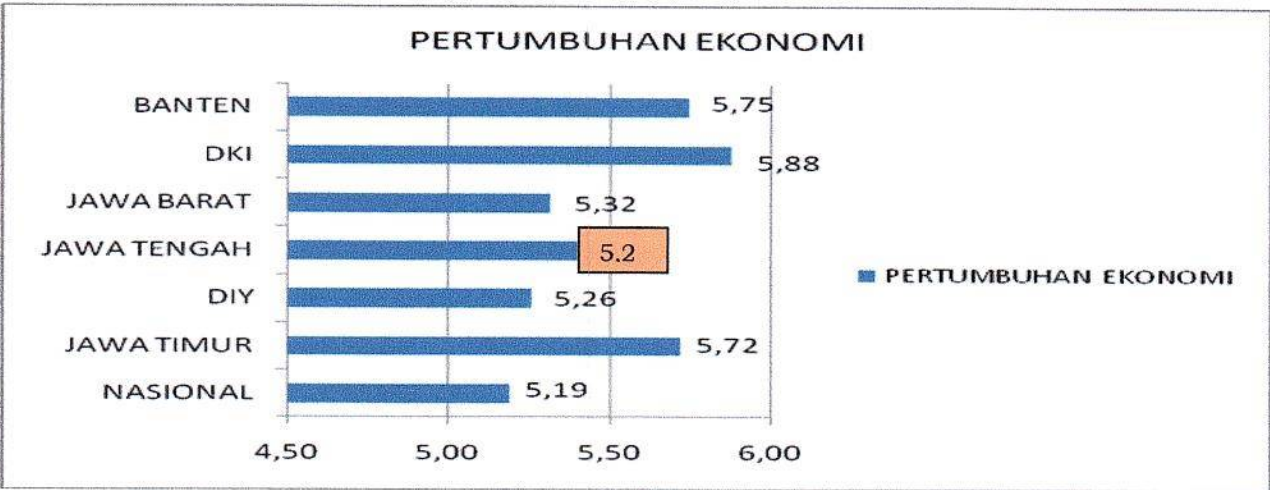


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.39. Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Guna melihat tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah, digunakan Indeks Williamson. Pada kurun waktu tahun 2013-2016, Indeks Williamson Jawa Tengah semakin menurun yaitu dari 0,64 menjadi 0,62. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah yang semakin mengecil.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah apabila dibandingkan dengan provinsi lain se Jawa maka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan DIY, namun lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat, Banten, DKI, serta Jawa Timur.



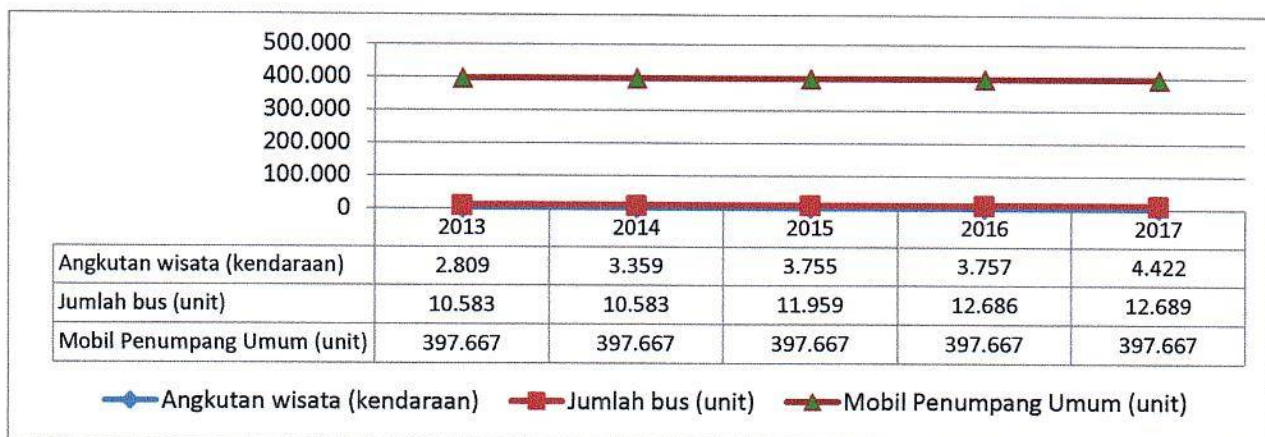
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 39. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Jawa Tahun 2017

2.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sesuai RPJMD Perubahan 2013-2018 untuk indikator SDGs Proporsi rumah tangga yang memiliki hunian yang layak dan terjangkau adalah indikator Rasio Rumah Layak Huni. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meningkatkan rasio rumah layak huni dari 78,67% pada tahun 2015 menjadi 79,63% pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 mencapai 80,31% (melebihi target seharusnya 78,74%). Namun, permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pemenuhan rumah layak huni adalah (1) Penyediaan sarana dasar seperti rumah layak huni, dengan dilengkapi fasilitas sanitasi, air bersih layak, dan listrik; (2) Ketimpangan kebutuhan dan ketersediaan rumah (Backlog); (3) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada masyarakat miskin masih cukup besar dan (4) Terdapatnya Kawasan Permukiman Kumuh.

Selain penyediaan perumahan dan kawasan permukiman, sarana transportasi baik darat, laut maupun udara sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik dikota maupun desa yang wajib disediakan oleh pemerintah. Sektor perhubungan di Jawa Tengah mengalami perkembangan cukup pesat baik perhubungan darat, laut dan udara. Hal tersebut ditunjukkan pada peningkatan jumlah kendaraan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 40. Perkembangan Capaian Jumlah Kendaraan di Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Pelayanan angkutan darat di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016. Angkutan wisata di tahun 2017 sejumlah 4.422 kendaraan meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 sejumlah 3.757 kendaraan. Selain itu, persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan juga mengalami peningkatan dari 47% pada tahun 2015 menjadi 52,23% pada tahun 2017. Demikian halnya dengan perkeretaapian, jumlah penumpang kereta api tahun 2017 sebesar 18.334.400 orang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 19.711.021 orang, namun demikian untuk jumlah stasiun kereta api sebanyak 140. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 41. Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Permasalahan yang dihadapi sektor perhubungan antara lain: (1) Tingkat keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi jalan dengan moda lain (antar moda) relatif rendah, sehingga pelayanan dari pintu ke pintu (*door to door service*) sebagian belum dapat terwujud; (2) Masih banyaknya angkutan umum yang beroperasi usia teknis di atas 10 tahun. Sedangkan tantangannya adalah: (1) Simpul transportasi inter/antar moda (bandara, Pelabuhan, Terminal dan Stasiun) belum terintegrasi dengan jaringan trayek angkutan umum; (2) Rendahnya kesadaran masyarakat dan operator angkutan

terhadap pentingnya keselamatan transportasi dan (3) Belum optimalnya pelayanan perhubungan udara dan laut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (investasi) dan pengembangan wilayah.

Guna mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan salah satunya adalah menciptakan lingkungan permukiman yang bersih melalui pengelolaan limbah dan sampah di perkotaan. Jumlah timbunan sampah berdasarkan data dari instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sebanyak 5.565.804 ton/tahun dan jumlah sampah yang terangkut ke TPA hanya 25,76% (1.434.033 ton/tahun). Berdasarkan pengukuran kualitas udara ambien yang dilakukan tahun 2013-2017 di 35 Kabupaten/Kota, dengan titik sampel pada 3 (tiga) lokasi pengukuran yakni kawasan perumahan, kawasan industri dan kawasan padat lalu lintas dihasilkan bahwa secara umum, kualitas udara ambien di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah hasil pemantauan dengan parameter SO₂, CO, NO₂, dan O₃ masih cukup baik. Namun terdapat 1 parameter hidrokarbon yang hasil pemantauannya kurang baik. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi gas buang yang buruk, karena perawatan yang kurang memadai ataupun dari penggunaan bahan bakar dengan kualitas kurang baik (misalnya kadar timbal yang tinggi). Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan hidup adalah : (1) Pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Tengah masih lemah. (2) Kemampuan penanganan sampah dan limbah di Jawa Tengah masih terbatas dan (3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Tengah masih di bawah nasional.

2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2006 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Proper diberikan dalam bentuk peringkat kinerja yang terdiri atas hitam, merah, biru, hijau dan emas, berturut-turut dari kinerja terendah hingga terbaik.

Hingga tahun 2015 jumlah peserta proper yang minimal mencapai ranking biru sebanyak 87 perusahaan, meningkat pada tahun 2016 sebanyak 103 perusahaan, namun agak turun di tahun 2017 hanya sebanyak 88 perusahaan. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi antara lain pelibatan perusahaan lain dalam program PROPER dan upaya mendorong perusahaan besar melaksanakan pembangunan tanpa menurunkan kualitas lingkungan serta melaksanakan upaya pembangunan berkelanjutan dalam proses bisnisnya.

Pengelolaan sampah dalam mendukung pola konsumsi dan produksi berkelanjutan antara lain melalui 3R yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*. Jumlah usaha/kegiatan skala kecil/menengah/besar, rumah sakit dan hotel di Jawa Tengah yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan berdasarkan hasil inventarisasi instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota tahun 2017 sebanyak 633.608 unit dengan prediksi total beban pencemar yang dibuang ke lingkungan untuk parameter BOD sebesar 26.665.450 ton/tahun; COD sebesar 81.052.400 ton/tahun dan TSS sebesar 205.432.900 ton/tahun. Jumlah industri di Jawa Tengah pada tahun 2017 mencapai 631.695 unit,

berpotensi menghasilkan air limbah sebanyak 628.774.500 m³ yang mencemari lingkungan.

Sedangkan industri yang berpotensi menghasilkan limbah B3 di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 potensi limbah padat B3 sebanyak 1.073.967,64 ton/tahun, meningkat pada tahun 2016 sebesar 1.165.960,97 ton/tahun dan tahun 2017 mencapai 1.139.253,49 ton/tahun. Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang (mendasarkan data dari bank sampah yang dikelola provinsi) sebesar 10 ton/tahun pada tahun 2015, menurun menjadi 8 ton/tahun pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan perusahaan yang memperoleh sertifikasi ISO 14001 sebanyak 200 perusahaan tahun 2015, meningkat menjadi 206 pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 sebanyak 160.

Pola konsumsi dan produksi berkelanjutan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah dapat ditunjukkan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan komponen Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan hutan. Selain itu juga ditambah dengan jumlah pengaduan dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti.

Tabel 2. 23. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengaduan Masyarakat terkait Sengketa Lingkungan

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,85	50,57	56,59	64,12	67,00
	a. Indeks Kualitas Air	44,44	43,85	45,79	48,85	48,17
	b. Indeks Kualitas Udara	45,40	45,61	57,07	77,30	83,91
	c. Indeks tutupan Hutan	59,74	59,70	64,32	65,68	68,35
2.	Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

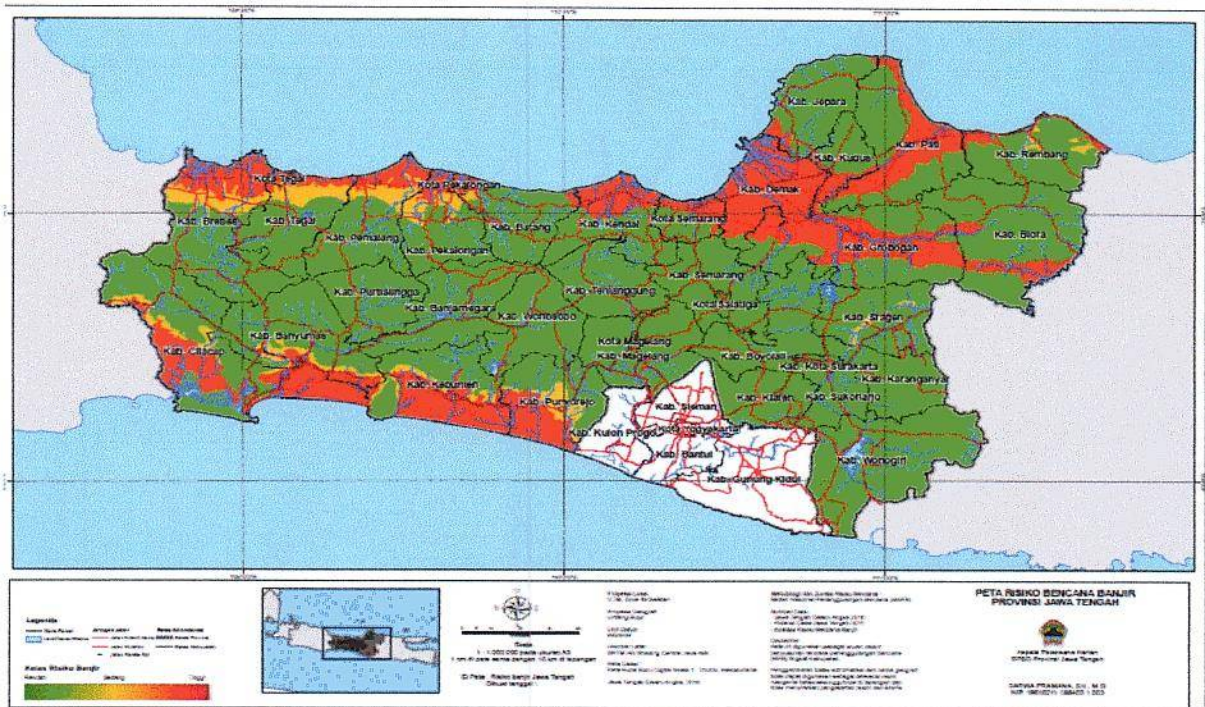
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2018

Pembangunan kota dan permukiman juga harus memperhatikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah menunjukkan trend peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 baik dilihat dari Indeks kualitas air, udara maupun tutupan hutan. Peningkatan paling besar terjadi pada tahun 2016 sebesar 64,12 di mana tahun sebelumnya hanya 56,59 atau naik 7,53, yang disebabkan oleh peningkatan indeks kualitas udara dari 57,07 menjadi 77,3 atau naik 20,23. Sedangkan jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) terpenuhi 100% dari tahun 2013-2017.



2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

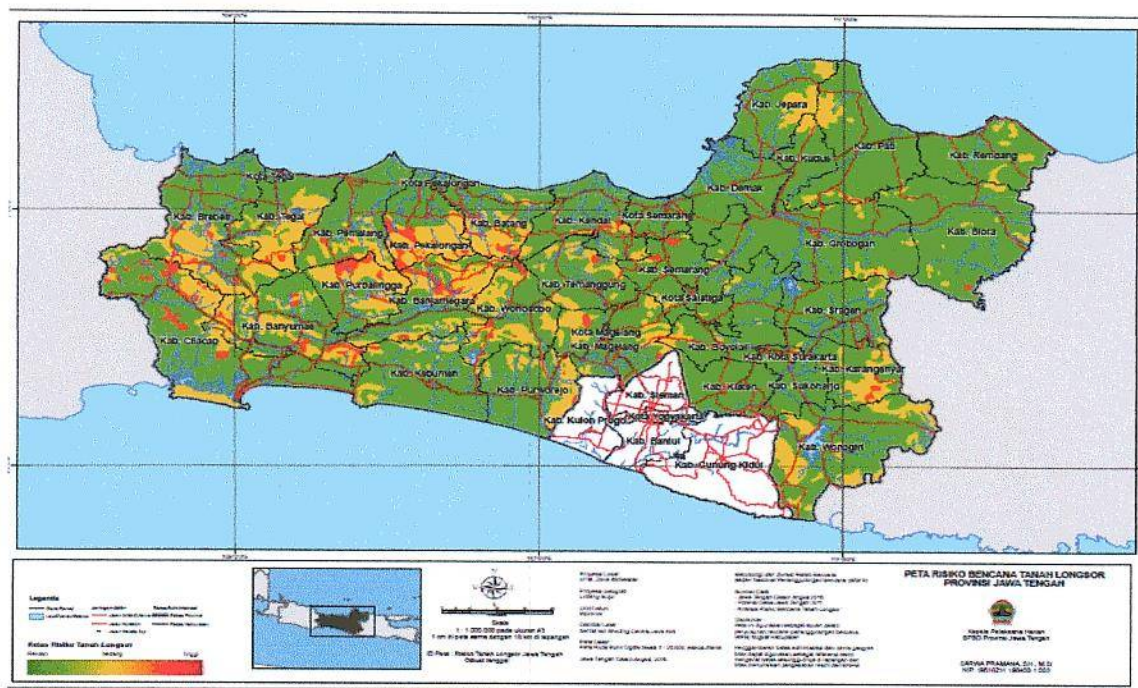
Isu perubahan iklim menjadi hal yang nyata dan benar-benar terjadi di dunia, termasuk Indonesia dan Jawa Tengah khususnya. Hal tersebut ditunjukkan antara lain peningkatan suhu pada kisaran 2,5 hingga 4,7 derajat celcius. Indonesia yang beriklim tropis dan Jawa Tengah khususnya merupakan daerah yang cukup rentan terhadap perubahan iklim. Selain itu, khusus Jawa Tengah memiliki karakteristik potensi bencana yang besar, sehingga mendorong pemerintah dan *stakeholder* untuk melakukan upaya pra bencana, yang mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta peringatan dini, mengingat bencana dapat terjadi secara tiba-tiba. Tantangan Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan iklim yaitu belum terintegrasinya perubahan iklim dalam seluruh aktivitas di sektor pembangunan.



Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 2. 42. Peta Risiko Bencana Banjir

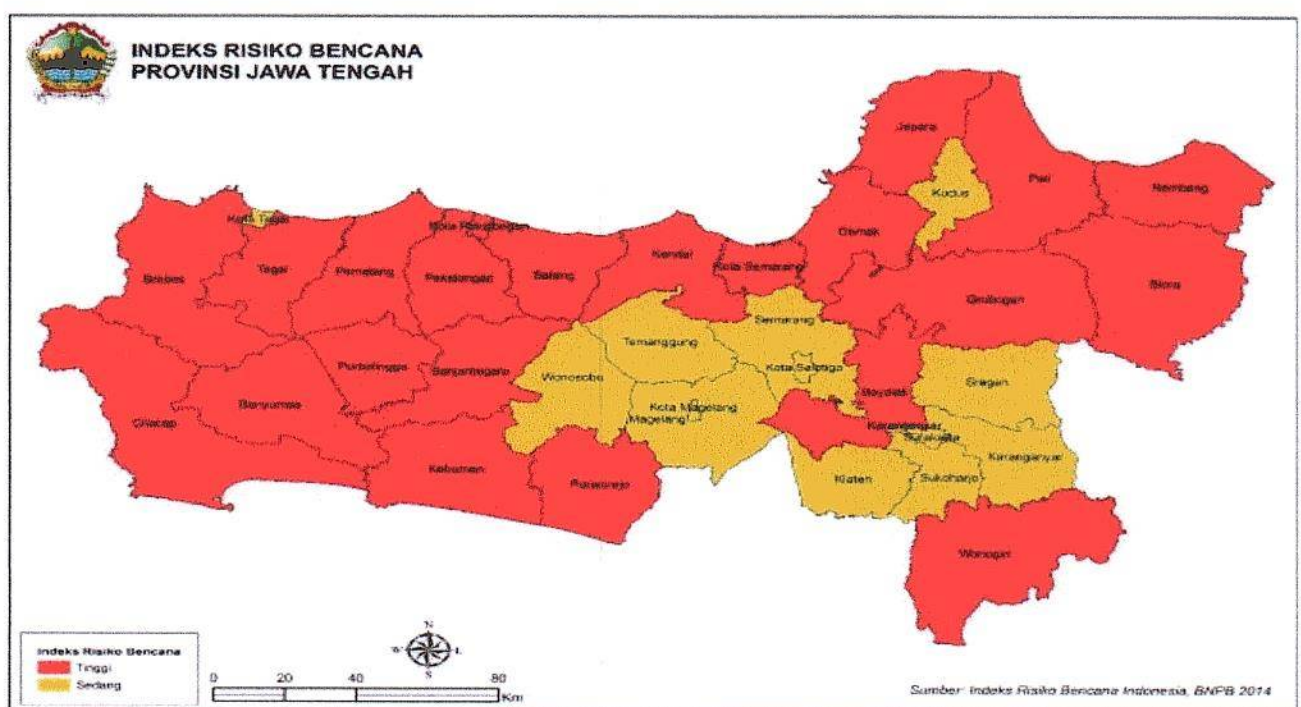
Melihat banyaknya ancaman bencana di Jawa Tengah, setidaknya terdapat 1.674 desa/kelurahan atau 19,5% dari seluruh desa/kelurahan di Jawa Tengah merupakan daerah rawan banjir dan 2.136 desa/kelurahan atau 24,9% rawan tanah longsor. Selain itu, pesatnya pembangunan menyebabkan meningkatnya risiko bencana kebakaran yang terjadi di pusat-pusat pembangunan dan kegiatan masyarakat, baik kebakaran hutan, lahan maupun perumahan. Daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor di Jawa tengah terlihat pada gambar peta berikut :



Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 2. 43. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor

Dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 22 Kabupaten/Kota termasuk risiko tinggi, dan 13 kabupaten/kota lainnya termasuk risiko sedang. Kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi yaitu Kabupaten Cilacap, Purworejo, Tegal, Brebes, Banyumas, Pemalang, Kebumen, Demak, Kota Semarang, Pekalongan, Pati, Rembang, Batang, Kendal, Jepara, Grobogan, Purbalingga, Boyolali, Banjarnegara, Blora, Kota Pekalongan, dan Wonogiri. Sementara 13 kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana sedang meliputi Kabupaten Magelang, Semarang, Temanggung, Sragen, Wonosobo, Kudus, Karanganyar, Klaten, Kota Tegal, Kota Magelang, Sukoharjo, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta.

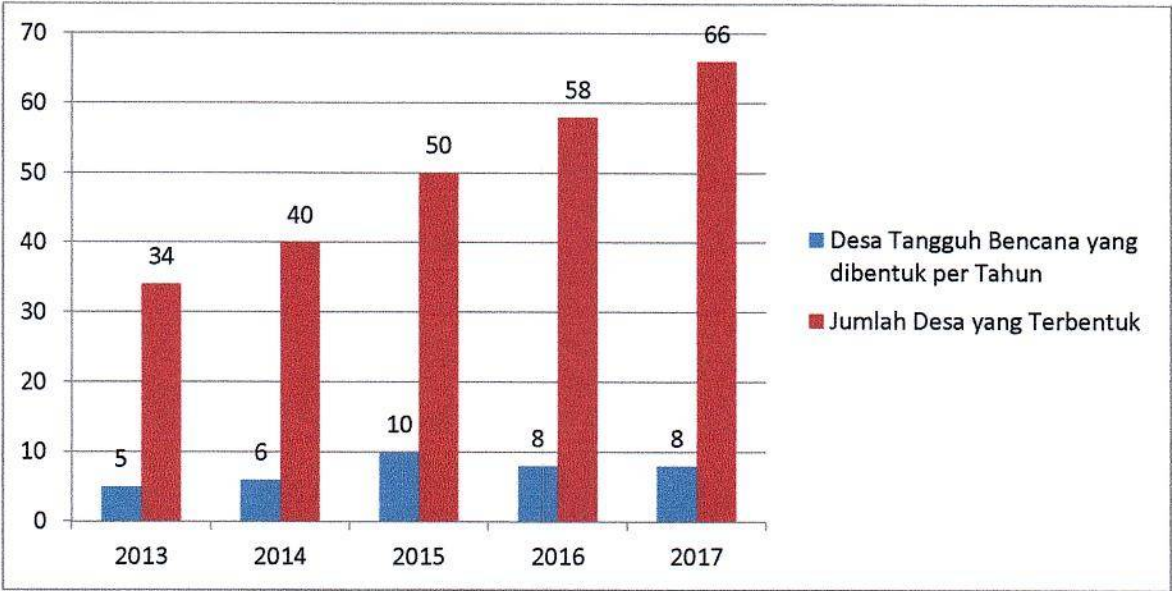


Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2014

Gambar 2. 44. Peta Indeks Risiko Bencana Jawa Tengah

Risiko bencana yang tinggi di Jawa Tengah ditunjukkan dengan jumlah kejadian bencana dari tahun 2013-2017 yang cenderung meningkat. Intensitas kejadian bencana terbesar berada di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Semarang, Wonosobo, Magelang Temanggung dan Kota Semarang dengan kejadian bencana meliputi tanah longsor, banjir, kebakaran. Hal ini masih menunjukkan bahwa kedepan, upaya peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana khususnya di daerah masih terus diperlukan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung kesiapsiagaan dan pengurangan bencana dari tingkat yang paling bawah dengan melibatkan masyarakat desa/kelurahan.

Desa tangguh bencana merupakan salah satu upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana dengan membentuk desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Berikut ini jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk per tahun dan jumlah desa yang terbentuk selama tahun 2013-2017.



Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 2. 45. Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2013-2017

Upaya pengurangan risiko bencana yang efektif dapat dilakukan adalah melalui mitigasi non struktural, antara lain dengan usaha peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dengan penerapan *Early Warning System* (sistem peringatan dini) berbasis masyarakat dilokasi yang rentan terhadap bencana.

Tabel 2. 24. Pemasangan *Early Warning System* (EWS) Tahun 2013-2017

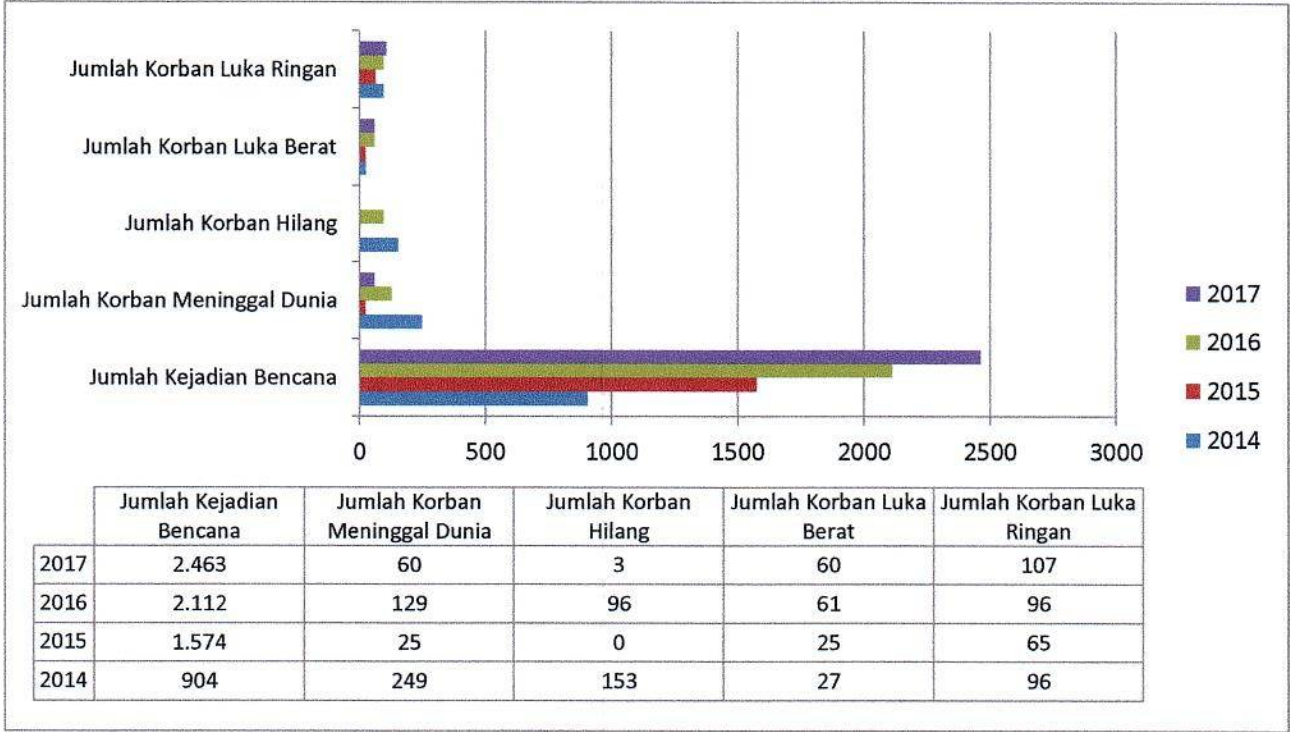
No	Tahun	EWS		Jumlah
		BPBD	ESDM	
1	2013	-	3	3
2	2014	-	14	14
3	2015	2	12	14
4	2016	2	-	2
5	2017	5	-	5
Total Jawa Tengah		9	42	51

Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2017



Berdasarkan tabel tersebut di atas, total pemasangan sistem peringatan dini di Jawa Tengah mencapai 51 unit di mana sebagian besar dipasang oleh Dinas ESDM (42 unit) dan BPBD (9 unit) pada tahun 2013-2017. Walaupun sudah terpasang sistem tersebut, namun masyarakat juga harus tetap waspada dan mematuhi semua tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak jatuh korban yang terlalu banyak.

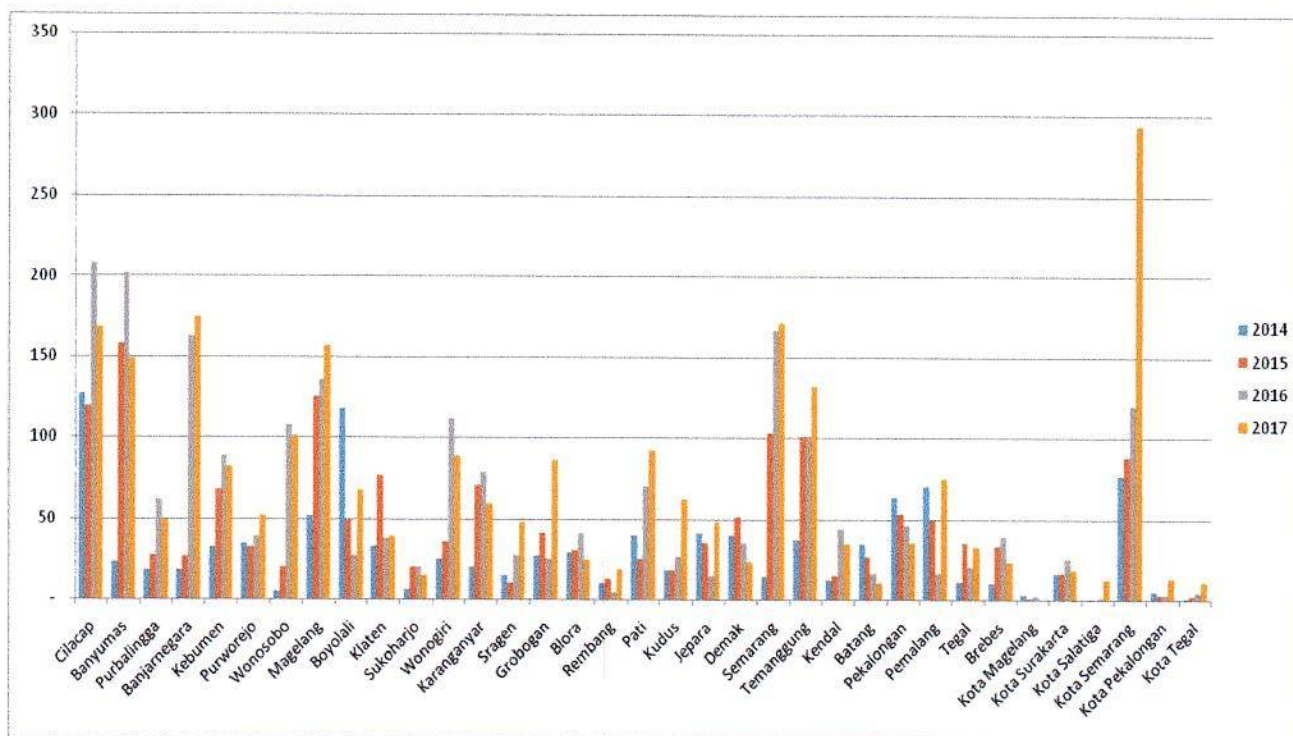
Korban bencana alam merupakan kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan dan bantuan agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara normal serta pemulihan dari dampak bencana yang dilaksanakan secara terpadu diantaranya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana, pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Selama kurun waktu 2014 – 2017, Bencana yang terjadi di Jawa Tengah baik yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia terinci pada gambar berikut :



Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 46. Jumlah Korban Akibat Bencana di Jawa Tengah Tahun 2014-2017

Intensitas terjadinya bencana di Jawa Tengah pada tahun 2014 hingga 2017 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya namun jumlah korban yang meninggal dunia dapat diminimalisir hingga separuhnya pada tahun 2017. Sedangkan jumlah korban hilang dapat diturunkan secara signifikan walaupun jumlah korban luka ringan terus meningkat pada tahun 2017. Berikut ini gambar jumlah kejadian bencana pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2014-2017.



Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 47. Jumlah Kejadian Bencana di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Jumlah kejadian bencana di 35 Kabupaten/Kota dari tahun 2014 – 2017 menunjukkan bahwa intensitas kejadian bencana terbesar berada di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Semarang, Wonosobo, Magelang Temanggung dan Kota Semarang dengan kejadian bencana meliputi tanah longsor, banjir, kebakaran.

Tabel 2. 25. Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah Tahun 2015-2017

No	Jenis Bencana	2015		2016		2017	
		Jum-lah	Kerugian (Rp. 000)	Jum-lah	Kerugi-an (Rp. 000)	Jum-lah	Kerugia n (Rp. 000)
1	Angin Topan	308	3.440.523	419	7.648.565	490	8.016.727
2	Banjir	176	2.481.860	298	1.914.023.342	270	7.731.340
3	Tanah Longsor	491	6.220.084	927	185.627.303	1.091	21.025.867
4	Kekeringan	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Kebakaran	572	35.602.002	468	1.127.741.291	600	40.622.373
6	Gempa Bumi	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	Letusan Gunung Api	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	Lainnya	27	4.152	NA	NA	12	9.771.788
	TOTAL	1.574	47.748.621	2.112	3.235.040.501	2.463	87.168.095

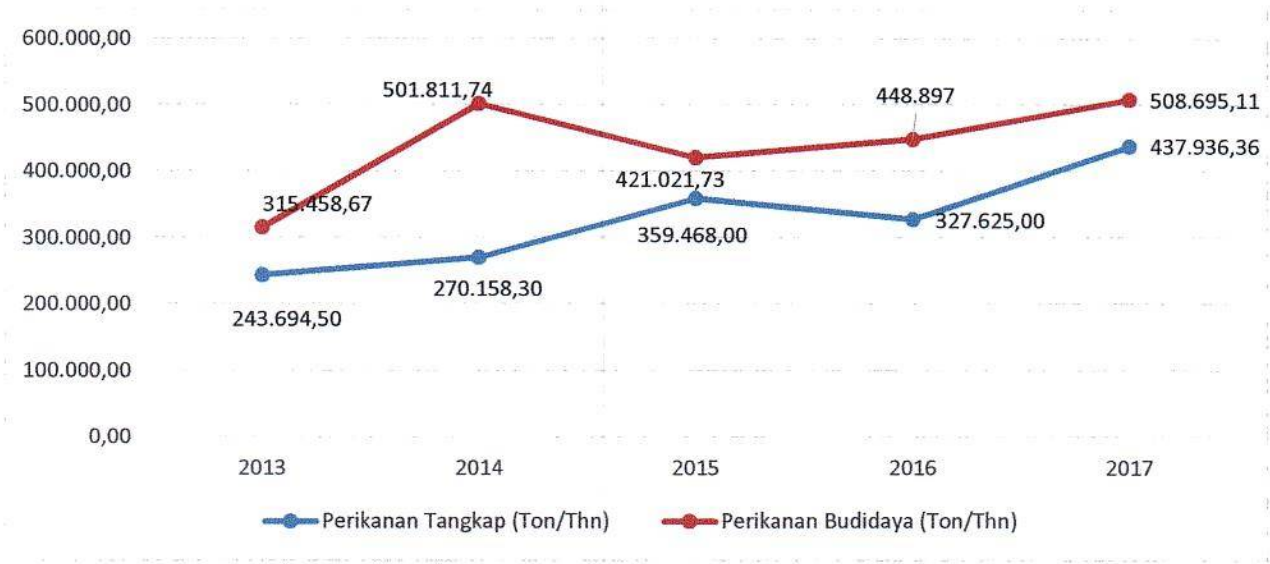
Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kejadian bencana yang paling dominan dilaporkan adalah bencana tanah longsor dan banjir. Sedangkan dari aspek kerusakan/kerugian akibat bencana, jumlah kerugian terbesar akibat bencana adalah bencana kebakaran. Namun, data yang terkait dengan jumlah kejadian bencana gempa bumi dan letusan gunung berapi belum dapat direkapitulasi.

Selain itu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kebencanaan adalah : (1) Belum optimalnya sinergitas pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat untuk mengubah pendekatan tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana; dan (2) Masih banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko serta kurangnya ketersediaan lahan relokasi.

2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

Upaya melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan salah satunya melalui pemanfaatan ekosistem lautan. Pemanfaatan ekosistem kelautan yang dilihat melalui produksi perikanan Jawa tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut ditunjukkan sebagaimana gambar berikut:



Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2018

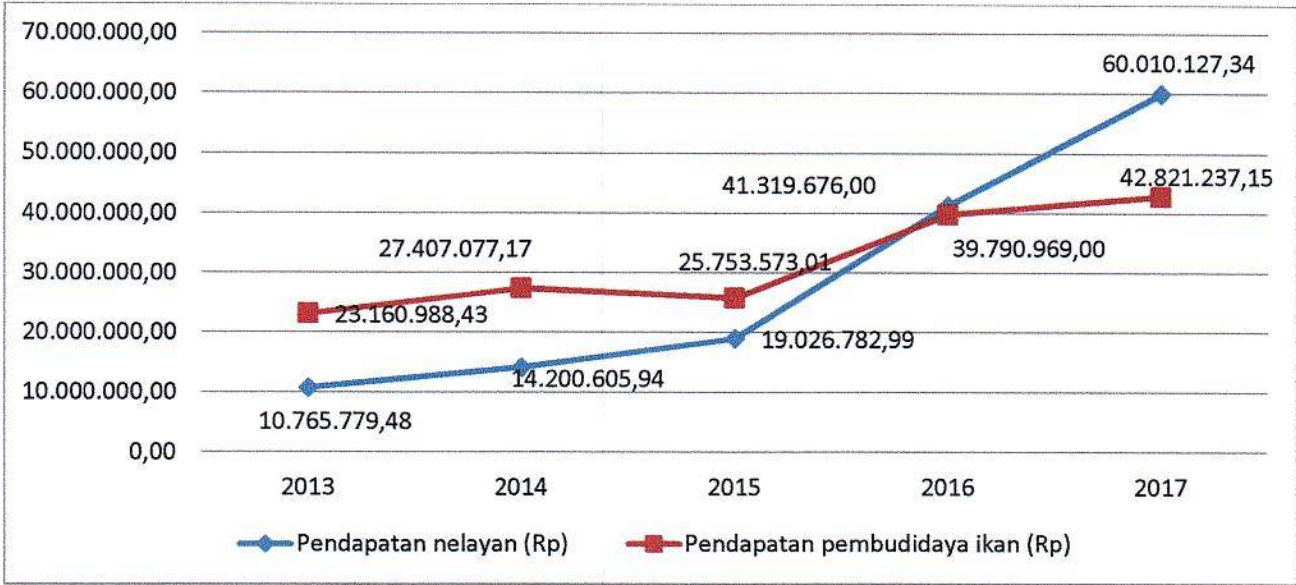
Gambar 2. 48. Produksi Perikanan Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Menurut *International Plan of Action to prevent, Deter and Elimination IUU Fisihing* (IPOA-IUU Fishing), terdapat beberapa kriteria termasuk illegal fishing, yaitu : (1) Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di dalam wilayah hukum suatu negara, tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan dan/atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (2) Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi kegiatan perikanan tersebut dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengelolaan dan konservasi yang diadopsi oleh organisasi tersebut dan (3) Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk kewajiban negara-negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional. Salah satu indikator yang mendekati pengukuran terhadap pengurangan *illegal fishing* adalah Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap

aktivitas *illegal fishing*. Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap aktivitas *illegal fishing* di Jawa Tengah masih pada kisaran 80%, maknanya masih terdapat 20% pelaku usaha belum mentaati peraturan tersebut.

Selain pemanfaatan ekosistem lautan dan penegakan peraturan perundangan di perairan, yang tidak kalah penting adalah keberlangsungan hidup para nelayan. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Jumlah nelayan yang dilindungi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 36.872 nelayan pada tahun 2016 menjadi 46.204 tahun 2017 atau meningkat sebesar 9.332 orang. Peningkatan pemanfaatan ekosistem laut serta teknologi perikanan yang sudah maju diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan maupun pembudidaya ikan di Jawa Tengah.

Peningkatan pendapatan nelayan juga dapat menjadi indikasi peningkatan kesejahteraan nelayan. Hal tersebut ditunjukkan pada gambar berikut :



Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 49. Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Jawa Tahun 2013-2017

Pendapatan nelayan di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga 2017 sebesar Rp.49.244.347,86 dari Rp.10.765.779,48 pada tahun 2013 menjadi Rp.60.010.127,34 pada tahun 2017. Kenaikan pendapatan nelayan paling signifikan/besar terjadi pada tahun 2016 yaitu naik sebesar Rp.22.292.893,01 menjadi Rp.41.319.676 dari sebelumnya Rp.19.026.782,99 pada tahun 2015. Sedangkan pendapatan pembudidaya ikan juga mengalami trend peningkatan dari 2013 sampai 2017 sebesar Rp.19.660.248,72. Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan paling banyak terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.14.037.395,99 dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Walaupun beberapa perkembangan positif ditunjukkan dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan, namun demikian masih banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi Jawa Tengah antara lain : (1) Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan infrastruktur dalam usaha budidaya garam; (2) Perlunya peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan; (3) Masih terdapat konflik nelayan antar daerah dan konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya air di perairan umum; (4) Masih terbatasnya penggunaan benih berkualitas dan



terbatasnya akses dan tingginya harga pakan ikan; (5) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut terkait penyusunan rencana zonasi dan rekomendasi pemanfaatan ruang laut dan pesisir serta (6) Tingginya kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, estuarin sebagai habitat vital.

2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan tidak lepas dari kinerja tata kelola kehutanan dan konservasi serta keanekaragaman hayati. Pada tahun 2017 hutan negara di Jawa Tengah seluas 651.214,02 ha dan hutan rakyat seluas 597.890 ha, sehingga luas lahan yang berfungsi sebagai kawasan hutan seluas 1.249.104,02 ha berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 522/22 Tahun 2014 tanggal 1 April 2014 tentang data dan peta lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah. Maka sesuai dengan SK tersebut, lahan kritis diklasifikasikan sesuai penggunaan lahan dan tingkat kekritisannya. Luas lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah seluas 634.601 ha. Dalam rangka pemulihan lahan kritis dengan meningkatkan tutupan lahan di lahan kritis dan sangat kritis tahun 2017 telah dilakukan penanaman dan pembuatan bangunan sipil teknis pada luasan 181.441 Ha.

Tabel 2. 26. Luas Rehabilitasi Hutan Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No	Luas (Ha)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas hutan (dalam dan luar kawasan)	1.394.006	1.289.104,54	1.289.104,54	1.289.104,54	1.249.104,02
2	Luas lahan kritis	634.601	634.601	634.601	634.601	634.601
3	Lahan yang direhabilitasi	107.095	68.854	109.189	146.108	181.441
4	% Lahan yang direhabilitasi	16,88	10,85*)	17,21	23,02	28,59

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Luas rehabilitasi lahan yang sudah dilakukan di Jawa Tengah selama tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan dari 107.095 hektar pada tahun 2013 menjadi 181.441 hektar pada tahun 2017 atau naik 74.346 hektar (11,71%). Namun luas lahan kritis di Jawa Tengah masih stagnan, belum ada penurunan sama sekali dari tahun 2013-2017.

Masalah lain yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam ekosistem daratan khususnya lingkungan hidup adalah kerusakan hutan. Kerusakan di kawasan hutan disebabkan antara lain karena terjadinya pencurian pohon dan kebakaran hutan.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 50. Kerusakan Kawasan Hutan Jawa Tengah 2013-2017

Luas kebakaran hutan di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai 2017 seluas 105,65 hektar. Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan kebakaran hutan seluas 6.019,8 hektar menjadi hanya 116,2 hektar. Namun pada tahun berikutnya kebakaran hutan meningkat 1.204,76 hektar. Hal ini perlu menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengendalikan kerusakan hutan khususnya yang disebabkan oleh kebakaran.

Selain kebakaran hutan, kerusakan hutan juga disebabkan oleh pencurian pohon oleh oknum tertentu. Selama tahun 2013 sampai 2017, Pemerintah Provinsi belum berhasil menekan pencurian pohon. Namun pada tahun 2015 pencurian pohon berkurang seluas 26,25 hektar. Tetapi pada tahun 2016, luas pencurian pohon bertambah menjadi 31,38 hektar. Oleh sebab itu dibutuhkan keseriusan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Perhutani maupun *stakeholder* terkait untuk mengurangi luas kebakaran hutan dan pencurian pohon agar kerusakan kawasan hutan di Jawa Tengah tidak bertambah parah.

Selain membahas pelestarian lingkungan hidup khususnya kawasan hutan, perlu juga dihitung berapa kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2017. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB dapat dihitung berdasarkan atas harga berlaku (ADHB) dan konstan (ADHK) seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 27. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2011 - 2015

Tahun	ADHB		ADHK	
	Nilai (Juta Rp)	Kontribusi (%)	Nilai (Juta Rp)	Kontribusi (%)
2013	4.936.439,80	0,59	4.093.448,74	0,56
2014	5.282.203,81	0,57	4.073.354,75	0,53
2015	5.653.154,17	0,56	3.997.568,24	0,50
2016	5.516.303,29	0,50	3.823.956,28	0,45
2017 *)	5.591.369,96	0,47	3.830.296,81	0,43

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Jawa Tengah terus mengalami penurunan baik menurut perhitungan harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK) selama tahun 2013-2017. Jika dihitung berdasarkan harga berlaku, walaupun nilai hasil sektor kehutanan terus meningkat setiap tahun namun kontribusinya terhadap PDRB terus menurun sebesar 0,12 pada tahun 2013-2017. Sebaliknya, jika dihitung berdasarkan harga konstan nilai dan kontribusi sektor kehutanan terus menurun setiap tahunnya. Dimana kontribusi sektor kehutanan hanya 0,43 pada tahun 2017 padahal pada tahun 2013 mencapai 0,56. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah produk kehutanan dan peningkatan kinerja tata kelola kehutanan tanpa merusak lingkungan serta penegakan hukum.

Terkait pemanfaatan hasil hutan, jumlah industri pengolahan hasil hutan kayu menunjukkan kecenderungan meningkat. Arah pengembangan selanjutnya adalah mendorong dan meningkatkan unit manajemen hutan rakyat dan industri pengolahan kayu yang bersertifikasi legal kayu (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/SVLK).

2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Pilar Hukum dan Tata Kelola secara global terdiri dari 12 target. Di Jawa Tengah, hanya 8 target yang sesuai dan dirumuskan dalam rencana aksi daerah ini. Capaian target pertama berupa “Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun” terdiri dari indikator: 1). Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir, 2). Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk, 3). Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir, dan 4). Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Capaian kinerja di dalam mengurangi kasus kejahatan pembunuhan terlihat dari menurunnya angka kejahatan pembunuhan di Jawa Tengah sebagaimana dilaporkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yaitu dari 16 kasus pada tahun 2016 menjadi 12 kasus pada tahun 2017.



Sumber : Kepolisian Daerah Jateng, 2018

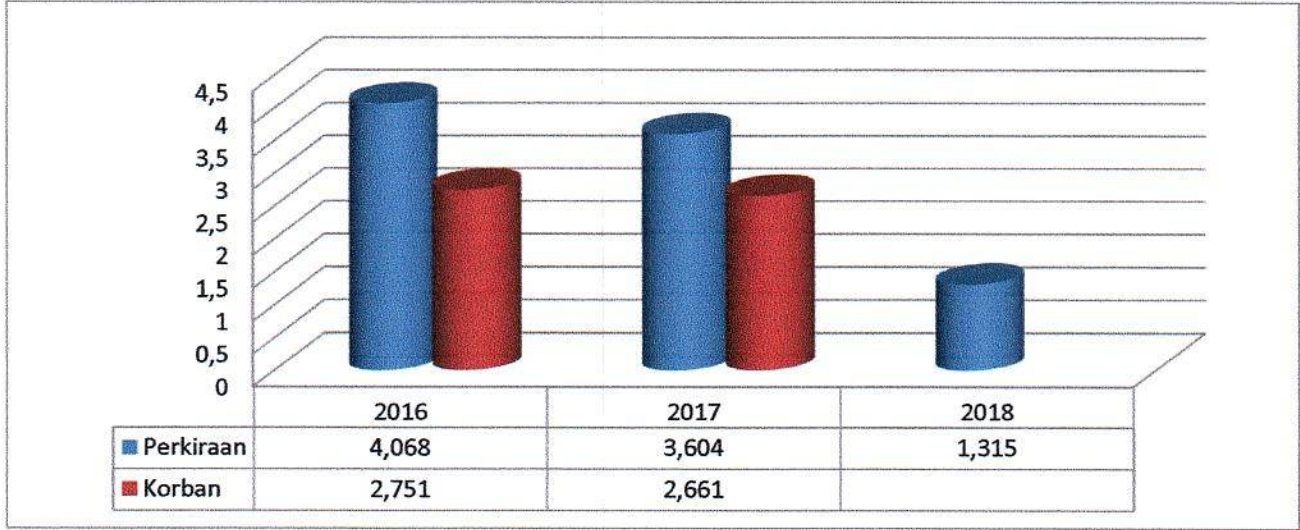
Gambar 2. 51. Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan

Sementara untuk jumlah kematian yang disebabkan konflik per 100.000 penduduk, selama periode 2015-2017 belum terdapat adanya catatan kematian

akibat konflik di Jawa Tengah. Menginjak pertengahan tahun 2018 juga belum terdapat adanya catatan korban meninggal akibat konflik. Hal tersebut menunjukkan adanya situasi kondusif di Jawa Tengah, baik dari aspek politik maupun sosial.

Terkait dengan proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir di Jawa Tengah, menurut laporan Polda Jateng juga terjadi penurunan. Pada tahun 2016 terdapat 2.751 orang yang menjadi korban kejahatan, kemudian menurun menjadi 2.661 orang. Angka tersebut lebih rendah dibanding perkiraan yaitu 4.068 tahun 2016 dan 3.604 tahun 2017. Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya situasi keamanan yang semakin kondusif di Jawa Tengah.

Jika dibandingkan dengan data yang dirilis BPS untuk angka kejahatan di Jawa Tengah tahun 2013 terdapat 17.765 kasus yang dilaporkan dan 11.261 kasus diantaranya terselesaikan. Kasus yang dilaporkan tahun 2014 menurun menjadi 15.855, dan pada tahun 2015 menjadi 14.387. Hal tersebut menunjukkan bahwa di tahun-tahun sebelumnya angka kejahatan cukup tinggi, dan semakin menurun di tahun belakangan. Dari persentase penyelesaian kasus di Jawa Tengah, relatif terjadi peningkatan dari tahun 2013 sebesar 0,63 persen, meningkat tahun 2014 menjadi 0,64 persen dan tahun 2015 sebesar 0,64 persen.

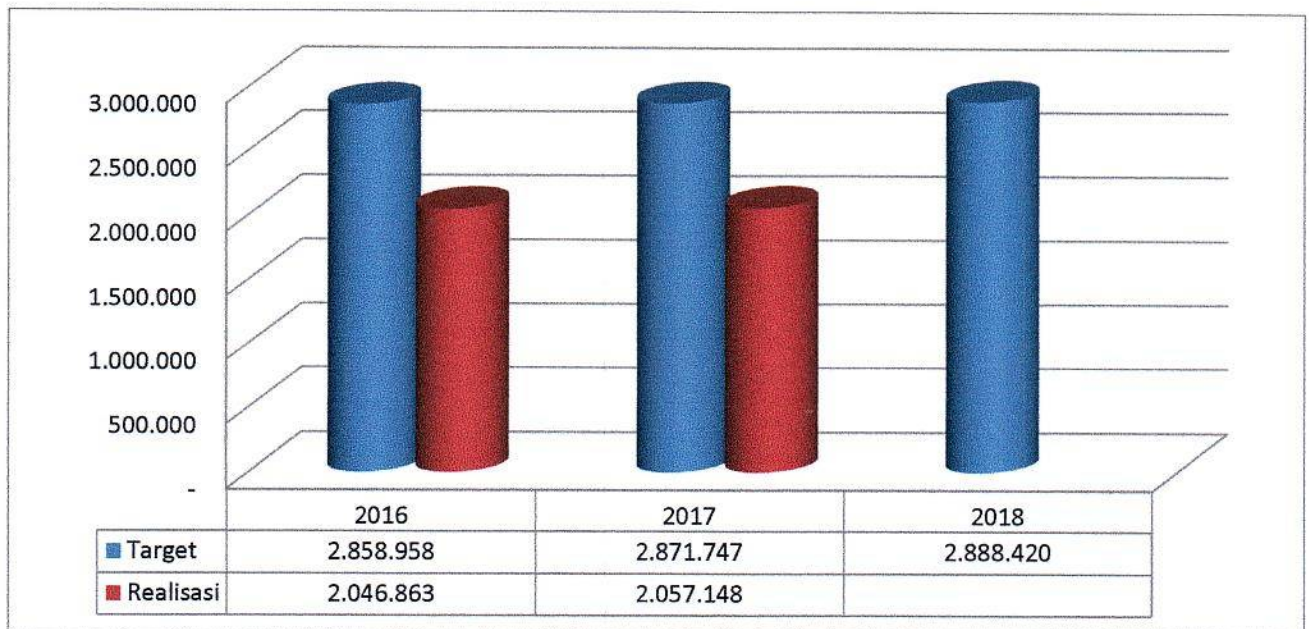


Sumber : Kepolisian Daerah Jateng, 2018

Gambar 2. 52. Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan

Meskipun menurun, menurut data yang dirilis BPS, indeks kejahatan di Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 8.835 kasus yang dilaporkan, dan sebesar 4.625 yang berhasil diselesaikan. Hal tersebut menunjukkan perlunya upaya peningkatan penanganan kasus kejahatan di Jawa Tengah.

Untuk proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, relatif terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan. Angka peningkatan tersebut juga masih lebih rendah dibandingkan harapan atau target. Pada tahun 2016 ditargetkan angka sebesar 2.858.958 orang merasa aman, namun capaian hanya sebesar 2.046.863, begitu juga untuk tahun 2017 hanya tercapai 2.057.148 dari target sebesar 2.871.747. Dari tahun 2016 ke tahun 2017 hanya terjadi peningkatan sebesar 0,5%. Dilihat dari ketersediaan sarana keamanan lingkungan, dari 8,578 desa dan kelurahan di Jawa Tengah, terdapat 80,726 pos keamanan lingkungan (poskamling), sebanyak 40,889 terbilang aktif dan sisanya 39,837 dalam kondisi pasif.

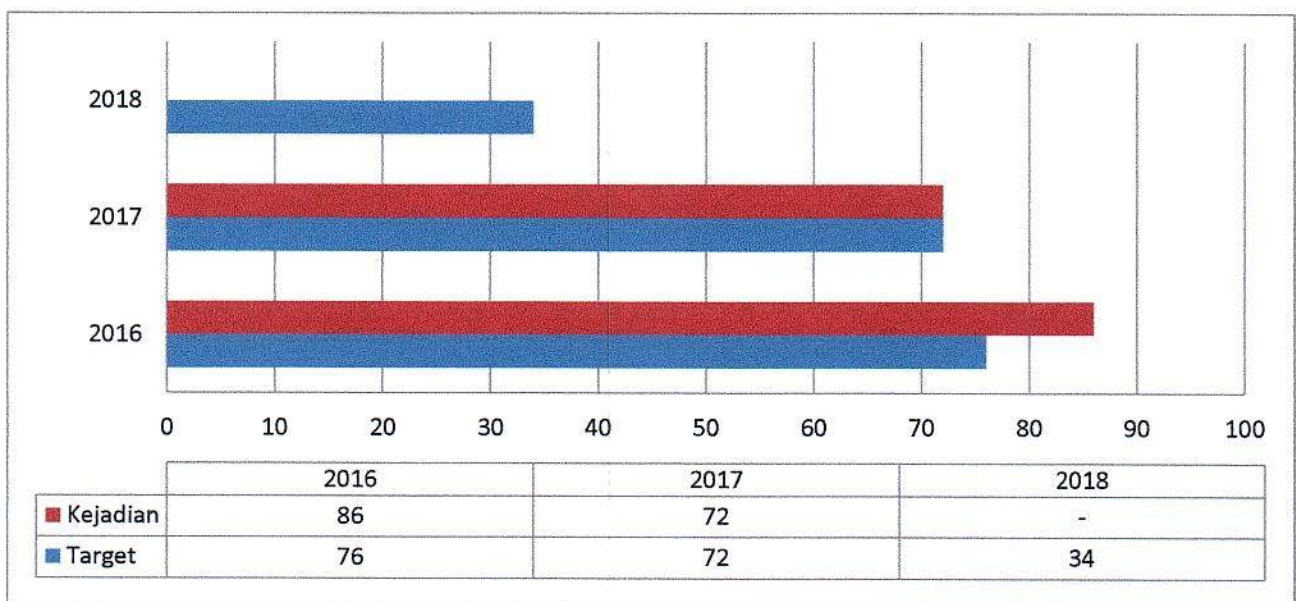


Sumber : Kepolisian Daerah Jateng, 2018

Gambar 2. 53. Proporsi yang Merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya

Capaian target kedua berupa “Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak” dituangkan ke dalam 2 indikator, yaitu : 1). Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir, dan 2) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.

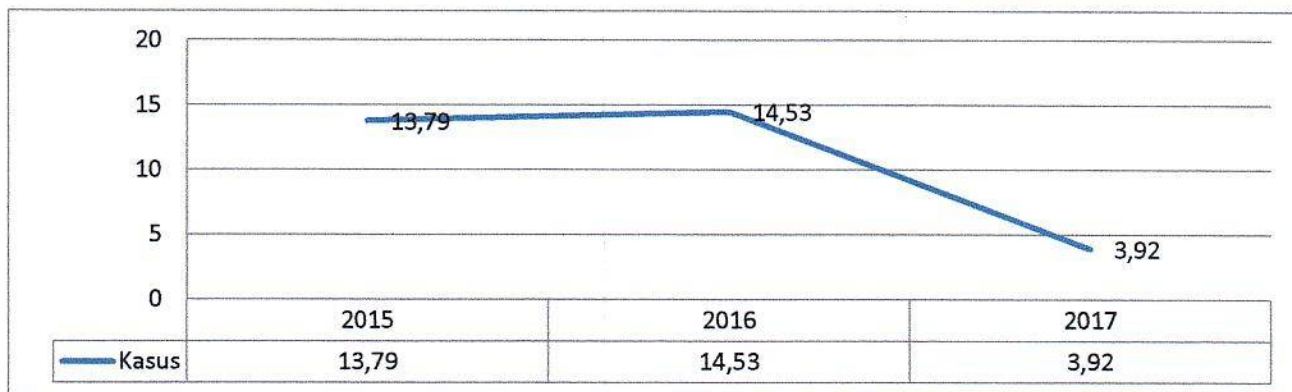
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. Pada tahun 2016 terdapat 86 kejadian atau kasus, kemudian menurun tahun 2017 menjadi 72 kasus. Angka tersebut menunjukkan adanya perbaikan di dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.



Sumber : Kepolisian Daerah Jateng, 2018

Gambar 2. 54. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh

Untuk indikator prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan, terjadi penurunan cukup tajam di tahun 2017. Tahun 2015 tercatat sebanyak 13,79 kasus per seribu penduduk, namun pada tahun 2016 tercatat naik menjadi 14,53 kasus, dan menurun tajam pada tahun 2017 menjadi 3,92 kasus.

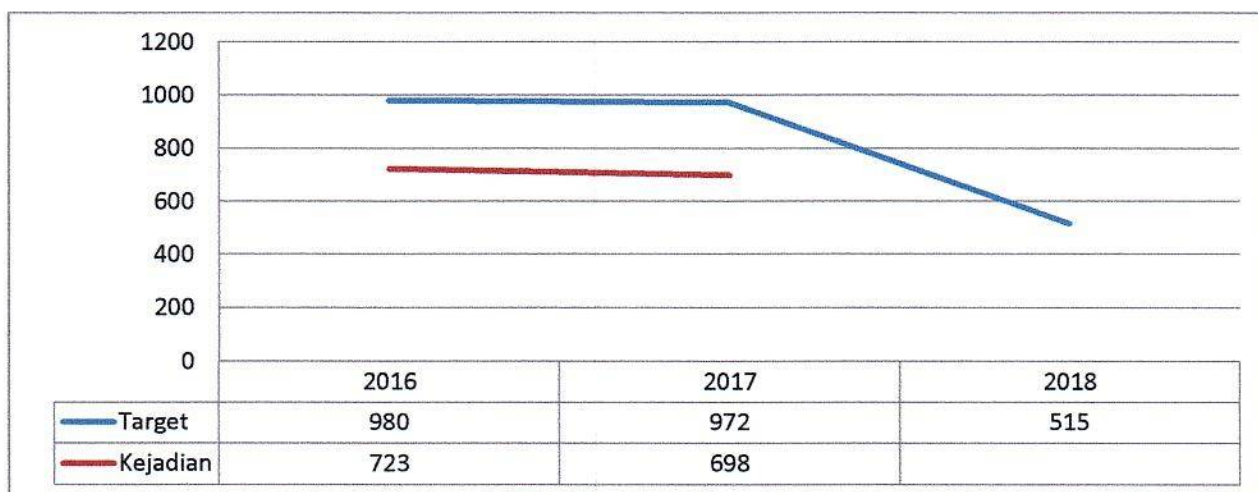


Sumber : DP3AKB Prov. Jateng, 201

Gambar 2. 55. Rasio korban kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan per 1.000 orang

Capaian target ketiga berupa “Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua: tercermin dalam 3 (tiga) indikator, yaotu: 1) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi; 2) Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu; dan 3) Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum.

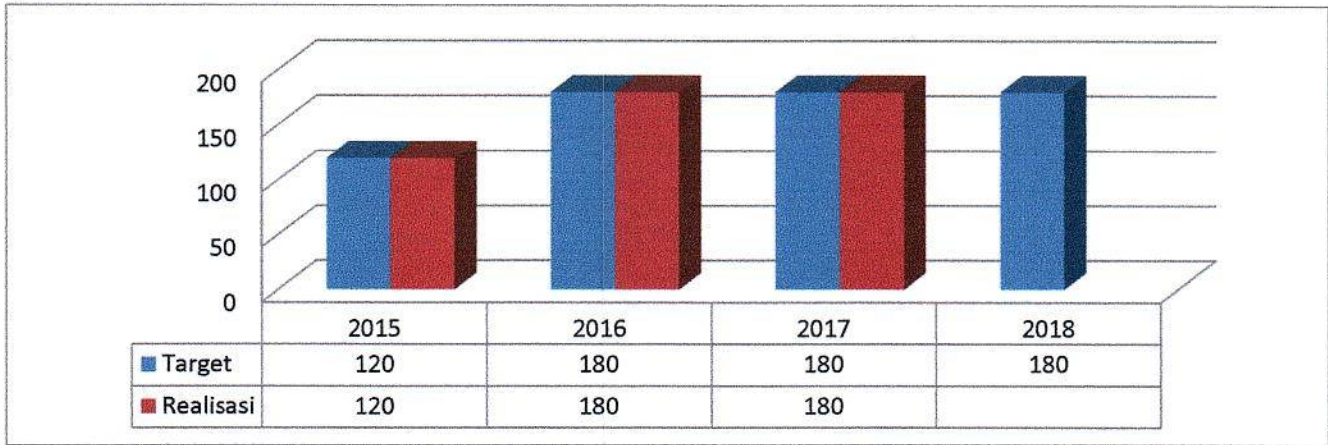
Indikator proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. Pada tahun 2016 terdapat 723 korban kekerasan yang melaporkan kasusnya kepada polisi dan tahun 2017 menurun menjadi 698 laporan. Menurunnya laporan di satu sisi dapat menunjukkan penurunan kasus atau semakin bertambah korban kasus kekerasan yang tidak melapor polisi. Tercatat pada tahun 2013 terdapat 16.872 tindak pidana yang dilaporkan, tahun 2014 menjadi 15.855 dan tahun 2015 sebesar 14.387 kasus. Adapun jumlah terdakwa/tertuduh tercatat sebanyak 6.265 orang pada tahun 2013.



Sumber : Kepolisian Daerah Jateng, 2018

Gambar 2. 56. Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi

Untuk capaian indikator jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tahun selalu terpenuhi sesuai target. Pada tahun 2015 tercapai sebanyak 120 kasus yang ditangani. Mulai tahun 2016-2018 ditargetkan penanganan sebanyak 180 kasus, pada tahun 2016 dan 2017 tercapai 100%.



Sumber : Biro Hukum Setda Prov. Jateng, 2018

Gambar 2. 57. Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu

Untuk jumlah tindak pidana yang tertangani di Jawa Tengah, dari tahun 2013-2017 relatif menurun jumlah laporannya, namun angka penyelesaian semakin meningkat. Tahun 2013 terdapat 17.803 laporan dan tertangani sebesar 11.304 kasus atau 63,5%. Sedangkan tahun 2017 terdapat 11. Untuk jumlah tindak pidana yang tertangani di Jawa Tengah, dari tahun 2013-2017 relatif menurun jumlah laporannya, namun angka penyelesaian semakin meningkat. Tahun 2013 terdapat 17.803 laporan dan tertangani sebesar 11.304 kasus atau 63,5%. Sedangkan tahun 2017 terdapat 11.420 laporan dan tertangani sebanyak 8.489 kasus atau 74,3 %.

Tabel 2. 28. Jumlah Tindak Pidana yang Tertangani di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana		Kinerja
		Lapor	Selesai	
1	2013	17.803	11.304	63,5
2	2014	16.733	10.672	63,8
3	2015	15.245	9.771	64,1
4	2016	13.425	9.176	68,4
5	2017	11.420	8.489	74,3
	Jumlah	74.626	49.412	66,2

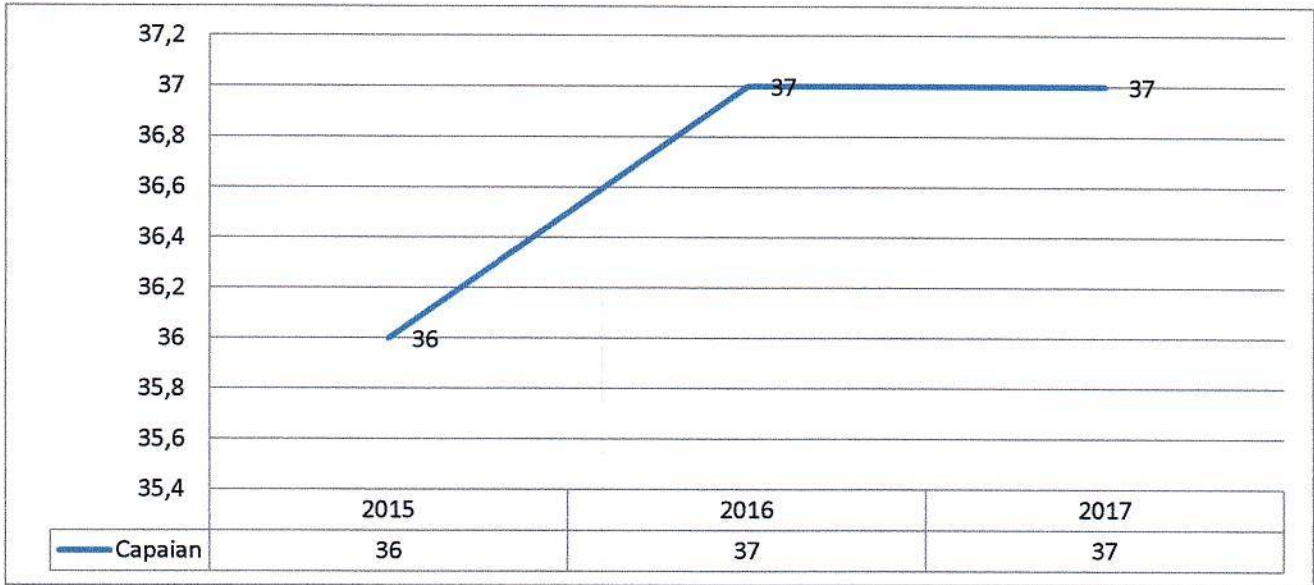
Sumber : Kepolisian Daerah Jateng, 2018

Untuk capaian indikator jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum belum terdapat data dukung yang sesuai. Namun upaya penyelesaian perkara melalui pelibatan masyarakat dalam musyawarah dan berdasarkan hukum lokal/adat terus diupayakan.

Capaian target kelima “Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya”, diimplementasikan melalui indikator Indeks Perilaku Antikorupsi. Menurut data KPK, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Jawa Tengah meningkat dari 35 di tahun 2015 menjadi 37 di tahun 2017.



Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan komitmen penyelenggara negara untuk menjauhi korupsi di berbagai bidang.



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Gambar 2. 58.Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Berdasarkan data yang dirilis BPS, sejak tahun 2011 terjadi fluktuasi penertiban pelanggaran terhadap aparatur di lingkungan pemerintahan di Jawa Tengah. Kasus meningkat di tahun 2012 dan 2013, kemudian menurun di tahun 2014. Diharapkan penurunan tersebut menunjukkan semakin baiknya penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Tengah.

Tabel 2. 29. Banyaknya Penyimpangan yang Terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Menurut Jenis Penyimpangan

No	Jenis Penertiban	2011	2012	2013	2014
1	Pungli				2
2	Indisipliner	13	196	169	12
3	Penyalahgunaan Wewenang	8	51	37	
4	Asusila	2	55		
5	Pidana	7	42	58	2
6	Korupsi	8	30	13	3
7	Lain - lain	2	128	262	1
	Total	40	502	539	20

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016

Capaian teget keenam berupa “Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel,dan transparan di semua tingkat”, dilakukan melalui 5 (lima) indikator, yaitu; 1) Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui; 2) Jumlah laporan keuangan daerah dengan opini WTP; 3) Nilai SAKIP; 4) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan; dan 5) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.

Indikator proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui dapat dilihat pada komposisi anggaran (APBD). Selama kurun waktu 2015-2017, belanja daerah Provinsi Jawa Tengah rata-rata mengalami kenaikan



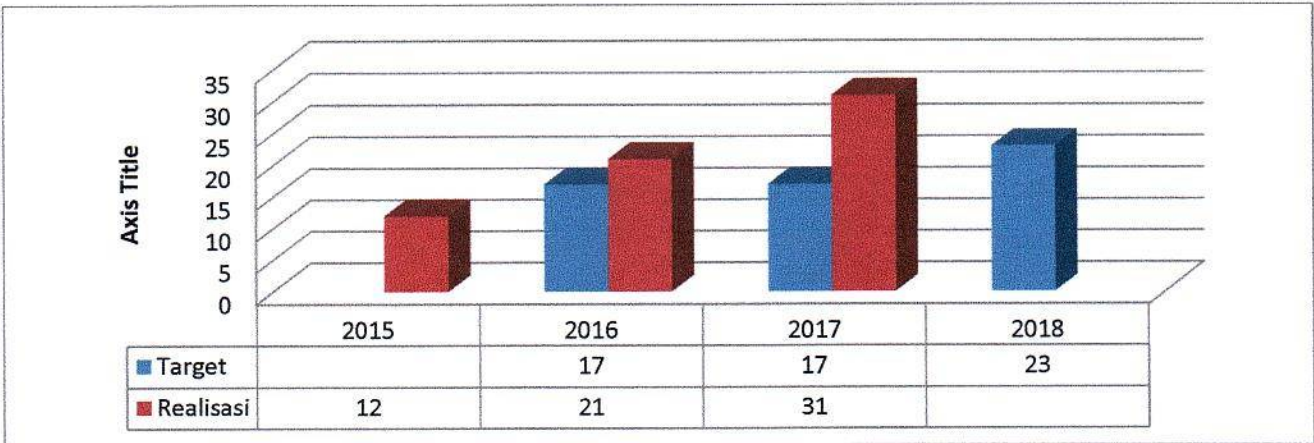
sebesar 14,94% per tahun. Kenaikan tertinggi pada tahun 2017 yang diakibatkan oleh limpahan pegawai dari Kabupaten/Kota, sehingga anggaran gaji dan tunjangan meningkat. Komposisi belanja terbesar adalah belanja tidak langsung, yang antara lain digunakan untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan belanja bantuan keuangan. Adapun porsi belanja langsung rata-rata 27% per tahun. Nilai tertinggi tahun 2016 sebesar 29,13%.

Tabel 2. 30. Realisasi Belanja Provinsi Jawa Tengah (Rp. 000,-)

Belanja	2015		2016		2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Belanja Langsung	12.690.256.149	71,21	13.717.072.628	70,87	17.548.267.444	76,77
Belanja Pegawai	2.480.896.195	13,92	2.239.683.999	11,57	5.622.988.624	24,60
Belanja Hibah	3.745.182.609	21,02	5.246.848.624	27,11	4.920.624.483	21,53
Belanja Bantuan Sosial	18.715.300	0,11	36.531.500	0,19	239.499.500	1,05
Belanja Bagi hasil kab/kota	4.130.087.481	23,18	4.088.437.191	21,12	4.812.323.251	21,05
Belanja Bantuan Keuangan	2.303.371.332	12,93	2.100.703.904	10,85	5.637.302.198	24,66
Belanja Tak Terduga	12.003.231	0,07	4.867.408	0,03	1.130.950	0,005
Belanja Langsung	5.130.504.346	28,79	1.951.700.633	10,08	5.309.433.172	23,23
Total Belanja	17.820.760.495	100	19.354.374.826	100	22.857.700.616	100

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Indikator jumlah laporan keuangan daerah dengan opini WTP terdapat peningkatan realisasi setiap tahun. Dari 35 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang memperoleh opini WTP tahun 2015 hanya 12, namun meningkat menjadi 21 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 31 daerah



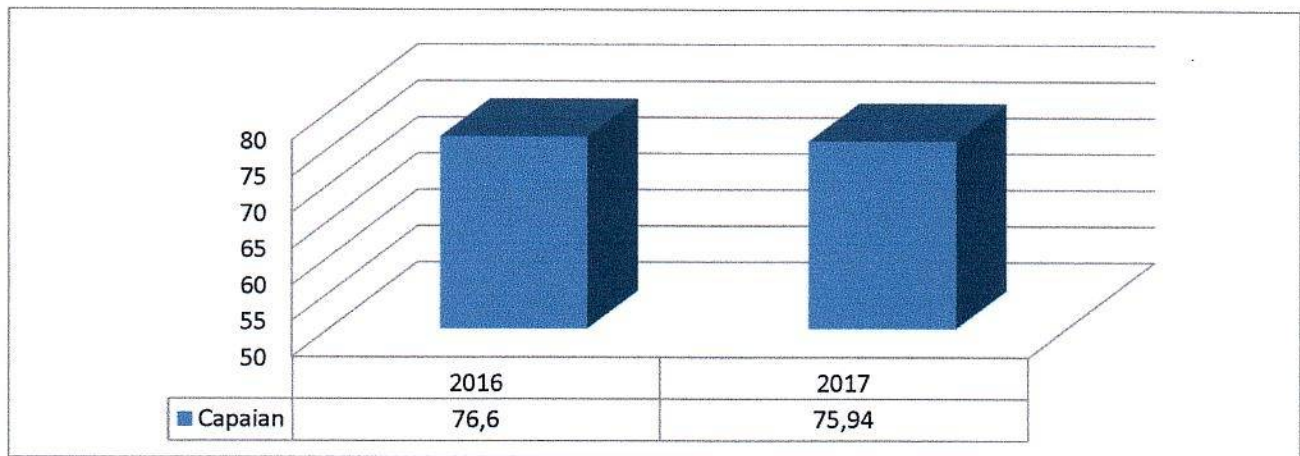
Sumber : Inspektorat & BPK Perwakilan Jateng

Gambar 2. 59. Jumlah Laporan Keuangan Daerah dengan Opini WTP

Untuk capaian indikator nilai SAKIP, terdapat penurunan dari tahun 2016 sebesar 76,6 menjadi sebesar 75,94 pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan

4

perlu adanya penguatan di dalam pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, 2018

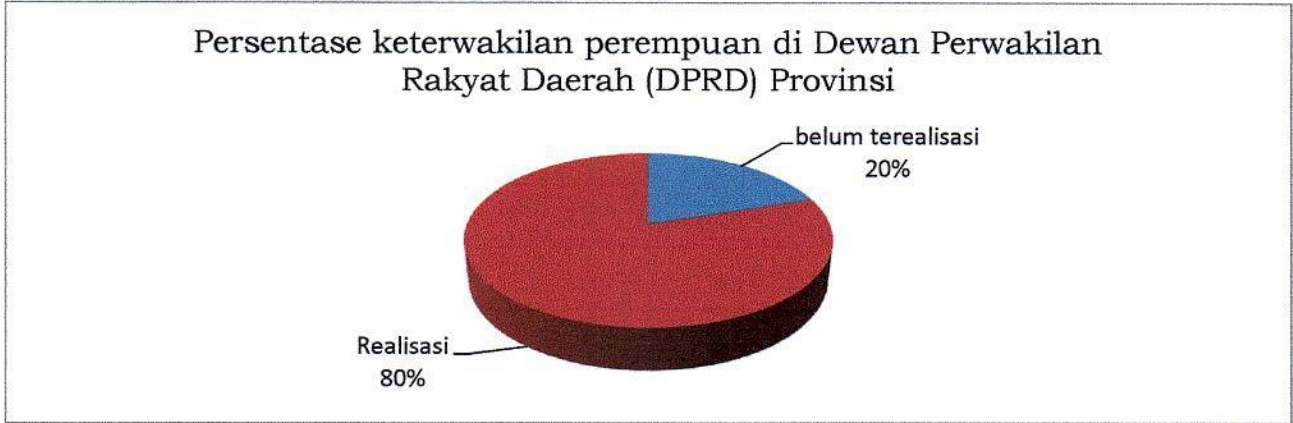
Gambar 2. 60. Nilai SAKIP Jawa Tengah

Indikator persentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan telah tercapai 100%, semua OPD (59 OPD) telah menggunakan sistem elektronik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan *Government Resources Management System* (GRMS) yang merupakan bangunan sistem aplikasi terintegrasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sistem ini merupakan perwujudan dari *e-Government* di Jawa Tengah. Sistem aplikasi yang terdiri atas; system *e-budgeting*, *e-project planning*, *e-HSB*, *e-penatausahaan*, *e-delivery*, *e-controlling*, *e-monev* dan gph. *e-budgeting* merupakan sistem yang dikembangkan untuk merencanakan anggaran daerah dengan tujuan memberikan panduan dalam proses penyusunan APBD. Melalui *e-budgeting* bisa diketahui secara cepat kebutuhan anggaran dalam setiap tahunan, serta memduahkan melakukan pemantauan dan evaluasi. *e-project planning* merupakan sistem yang dikembangkan untuk menyusun rencana pekerjaan pada setiap kegiatan yang telah dianggarkan. Melalui sistem ini pelaksanaan kegiatan bisa dipantau progresnya, serta dengan cepat diketahui masalahnya. *e-delivery* merupakan sistem yang memuat data terkait terbentuknya sebuah kontrak. Dengan demikian perkembangan sebuah kontrak dapat dipantau secara *online*. *e-penatausahaan* merupakan aplikasi yang mengakomodir proses penatausahaan keuangan daerah provinsi Jawa Tengah. Dengan sistem ini penatausahaan keuangan bisa dipantau dan dievaluasi setiap saat. *e-controlling* merupakan sistem yang mencatat pengendalian pelaksanaan kegiatan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan di setiap unit kerja dapat dipantau dengan cepat perkembangannya setiap bulan. *e-monev* merupakan aplikasi yang memuat data target dan realisasi penganggaran seluruh SKPD. Dengan sistem ini, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. *e-shb* sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga dari suatu barang/jasa. Melalui sistem ini pelaksana kegiatan dapat dengan mudah menentukan besaran anggaran dengan tepat sesuai standar yang berlaku.

Pencapaian indikator persentase kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah sudah terbilang baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa organisasi penyelenggara wajib menyelenggarakan pelayanan

sesuai tujuan pembentukan. Pelayanan sudah diberikan dengan baik. Bahkan organsiasi pelayanan publik dituntut melakukan inovasi di dalam memberikan layanan. Sampai dengan tahun 2017 terecatat 17 inovasi pelayanan publik di tingkat provinsi dan 171 inovasi di tingkat Kabupaten/Kota. Beberapa rumah sakit telah mengembangkan pelayanan pendaftaran online dan terpadu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengeluarkan Kartu Jateng Sehat (KJS), Bantuan Siswa Miskin, Rumah Tunggu Kelahiran, serta Jaminan Kesehatan. Bahkan saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang merumuskan Peraturan Daerah tentang inovasi, termasuk di sektor pelayanan publik. Mulai tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga membangun Jaringan Inovasi Pelayanan Publik, yang merupakan saluran untuk melakukan penilaian, evaluasi dan peningkatan pelayanan publik di seluruh Jawa Tengah, baik OPD Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten/Kota.

Indikator capaian persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi pada periode 2014-2019 belum tercapai 100%. Alokasi 30% keterwakilan perempuan atau sebanyak 30 orang baru tercapai sebanyak 24 orang atau 80%.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 61. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi

Dari 9 fraksi DPRD Jawa Tengah, terdapat 2 fraksi yang sama semaki tidak memiliki perwakilan perempuan, yaitu PKS dan NASDEM. Adapun perwakilan perempuan terbanyak dari PDIP, yaito 10 orang dari 27 anggota atau 37%.

Tabel 2. 31. Jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2014-2019

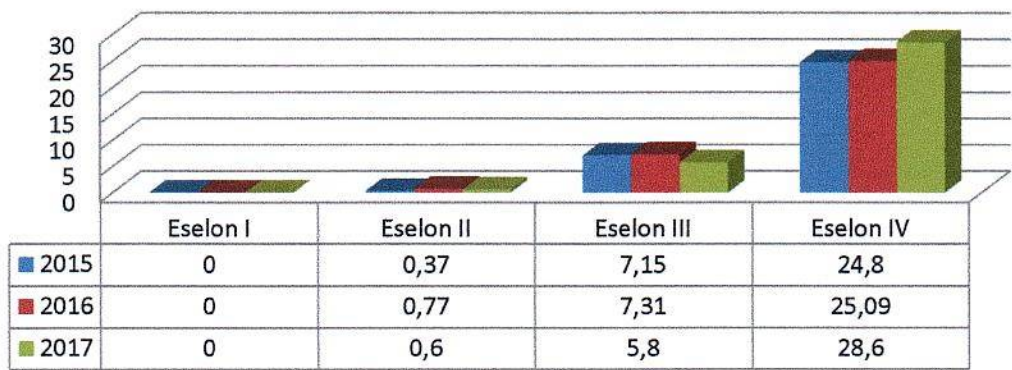
No	Fraksi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PDJ Perjuangan	17	10	27
2	Partai Demokrat	7	2	9
3	Partai Golkar	6	4	10
4	PKS	10	0	10
5	PAN	7	1	8
6	PKB	10	3	13
7	GERINDRA	8	2	10
8	PPP	6	2	8
9	NASDEM	4	0	4
	Jumlah	75	24	99

Sumber: BPS Jawa Tengah

Adapun capaian Persentase perempuan pada jabatan eselon I, II, III, dan IV pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbilang sudah cukup baik. Komposisi



terbesar jabatan yang melibatkan perempuan adalah Eselon IV, yaitu 24,8% pada tahun 2015 meningkat menjadi 28,6% di tahun 2017. Adapun untuk jenjang eselon II dan III relatif mengalami fluktuasi.



Sumber : BKD Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2. 62. Persentase perempuan pada jabatan eselon I, II, III, dan IV di Provinsi Jawa Tengah

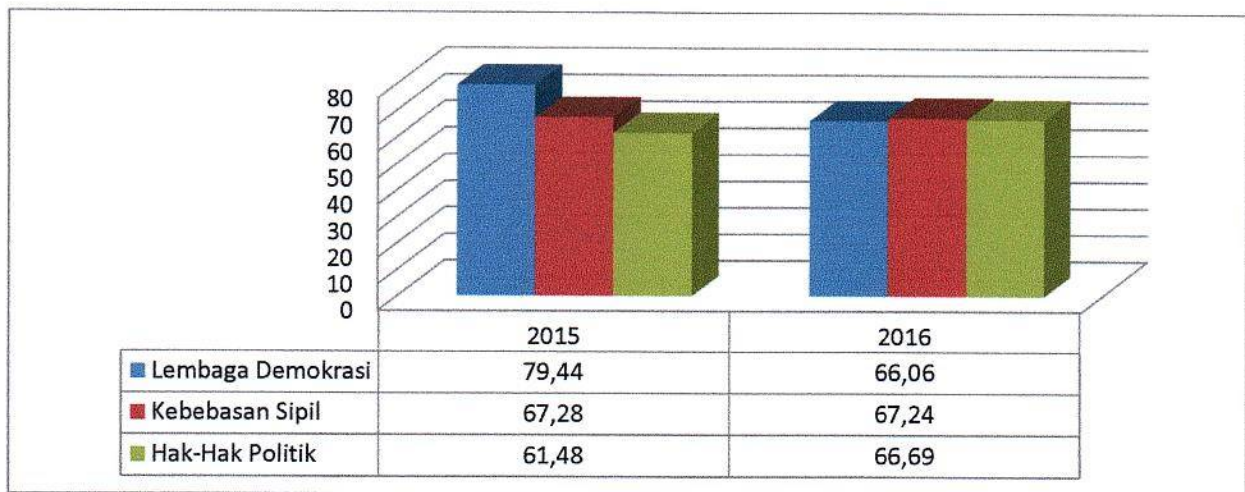
Berdasarkan jumlah nominal, terjadi pergeseran jumlah pejabat antara tahun 20016 dan 2017 yang dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah. Jabatan Eselon 2 yang sebelumnya terdapat 13 orang perempuan, berkurang menjadi 11, dan jabatan Eselon III berkurang dari 123 menjadi 111. Beberapa pejabat juga memasuki masa pensiun pada tahun 2017.

Tabel 2. 32. Jumlah Perempuan yang Menjabat Eselon I, II, III, dan IV di Pemprov Jateng

No	Jabatan	2015	2016	2017
1	Eselon I	0	0	0
2	Eselon II	13	13	11
3	Eselon III	127	123	111
4	Eselon IV	440	422	543

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah

Capaian indeks demokrasi yang terdiri dari lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik di Jawa Tengah terbilang belum begitu baik. Capaian indeks lembaga demokrasi mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 79,44 menjadi 66,06 di tahun 2016. Indeks kebebasan sipil relatif masih sama, hanya seikit penurunan dari 67,28 pada tahun 2015 menjadi 67,24 pada tahun 2016. Indeks hak-hak politik mengalami peningkatan dari 61,48 pada tahun 2015 menjadi 66,69 pada tahun 2016.

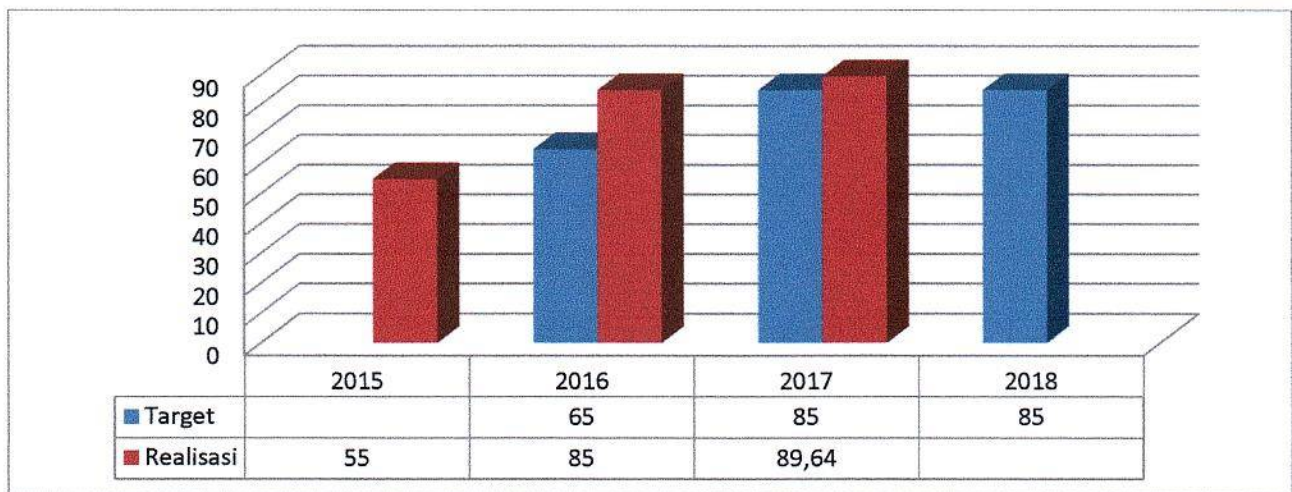


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 2. 63. Indeks Demokrasi Jawa Tengah

Target kesembilan yaitu “Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua termasuk pencatatan kelahiran” dicapai melalui 3 indikator, yaitu: 1) Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur, 2) Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah, dan 3) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.

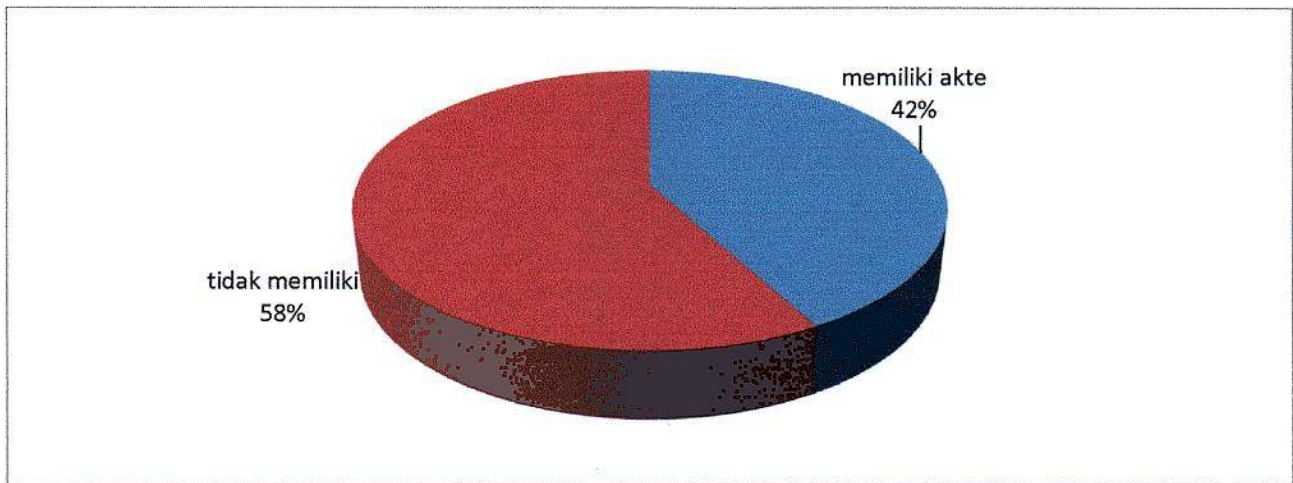
Indikator proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil sudah terbilang baik. Capaian indikator tersebut selalu di atas target. Pada tahun 2013 telah berhasil dilayani sebanyak 995.233 pencatatan kelahiran dan 437 pencatatan adopsi anak di Jawa Tengah. Tahun 2016 ditargetkan 65% anak tercatat, sedangkan realisasinya mencapai 85%. Pada tahun 2017 ditargetkan 85 persen, dan capaiannya sebesar 89,64%. Kinerja tersebut perlu tetap dipertahankan melalui berbagai upaya pelayanan terpadu. Beberapa Kabupaten/Kota telah mengupayakan pencatatan kelahiran terpadu dengan fasilitas kesehatan.



Sumber : Dispermasdes Duk Capil Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 64. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil

Untuk indikator persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah serta persentase anak yang memiliki akta kelahiran masih perlu peningkatan. Sebesar 58% penduduk tidak memiliki akta kelahiran.



Sumber : Dispermasdes Duk Capil Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 65. Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran

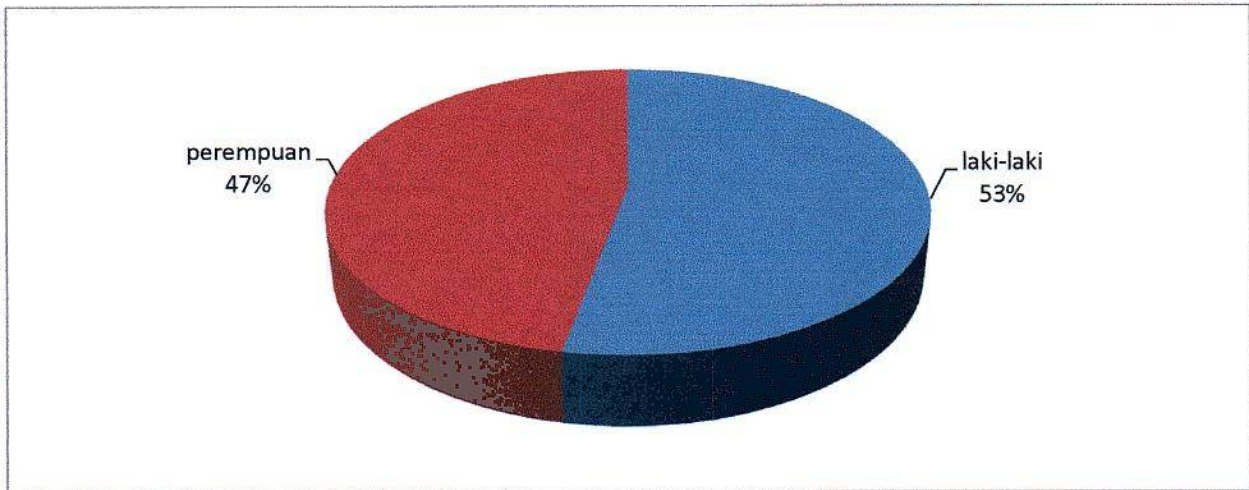
Berdasarkan data BPS, pada tahun 2016 sebanyak 20.593.100 orang di Jawa Tengah tidak memiliki akte kelahiran. Angka tersebut seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 2. 33. Kepemilikan Akte Lahir Penduduk Jawa Tengah Tahun 2016

MEMILIKI AKTE LAHIR			TIDAK MEMILIKI AKTE LAHIR		
Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
7.924.838	7.064.934	14.989.772	10.021.173	10.571.927	20.593.100

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

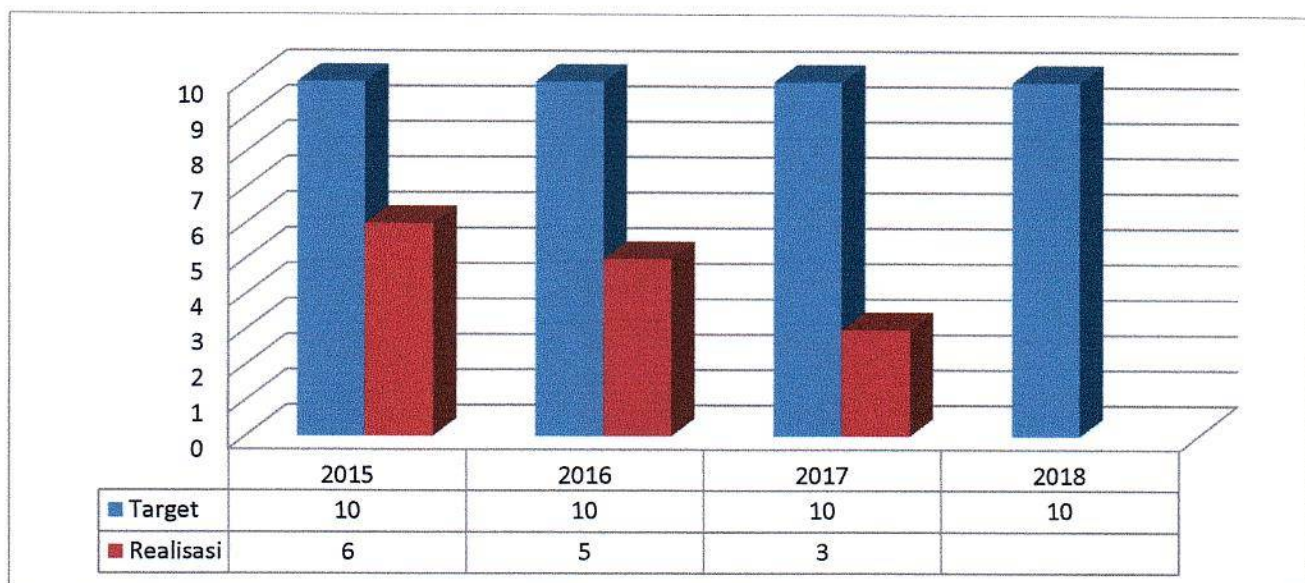
Sesuai dengan laporan mengenai anak yang memiliki akta kelahiran yang masuk, sebanyak 47 persen anak perempuan dan sebanyak 53% anak laki-laki.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2. 66. Laporan Penertiban Akta Pengakuan Anak Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Tahun 2016

Capaian indikator jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir maish perlu ditingkatkan. Setiap tahun ditargetkan ada 10 kasus pengaduan yang diselesaikan,namun tahun 2015 hanya 6 kasus aduan, tahun 2016 berkurang menjadi 5 kasus, bahkan tahun 2017 hanya 3 kasus saja.



Sumber : Biro Hukum Setda Prov. Jateng, 2018

Gambar 2. 67. Penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Untuk capaian indikator persentase SKPD/OPD yang mengembangkan Teknologi Informasi, di Jawa Tengah sudah tergolong sangat baik. Pada tahun 2015 hanya sebanyak 35 persen SKPD/OPD yang mengembangkan Teknologi Informasi dalam menjalankan tugas. Mulai tahun 2016 sampai dengan 2017 capaian sudah sebesar 100 persen, artinya semua SKPD/OPD telah memanfaatkan teknologi informasi. Hal tersebut didukung oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan *Government Resources Management System* (GRMS) yang merupakan perwujudan dari *e-Government* di Jawa Tengah.

Capaian indikator jumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2015 telah tercapai 100 persen. Sebanyak 49 SKPD/OPD dan 12 BUMD telah mengembangkan kebijakan informasi publik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik di setiap unit kerja Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk komite pelayanan informasi publik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 Tentang *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah sebagai landasan pengembangan sistem data dan informasi pembangunan. *Website* satu data yaitu <http://satudata.jatengprov.go.id/> yang berisi data pembangunan di Jawa Tengah juga telah dikembangkan.

2.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Untuk masa mendatang, penerimaan pajak masih akan menghadapi beberapa tantangan terutama berkaitan dengan (i) belum optimalnya penggalan potensi sumber pajak dan efektivitas pengumpulan; serta (ii) rendahnya kesadaran wajib pajak, serta pertumbuhan ekonomi domestik yang diperkirakan masih sekitar 5%. Hal ini disebabkan oleh faktor global seperti (i) pertumbuhan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih karena ada kecenderungan peningkatan proteksi atau inward looking yang semakin menguat; (ii) harga

komoditas di pasar global yang masih rendah; dan (iii) ketidakpastian kebijakan global terkait dengan isu regulasi dan kebijakan fiskal.

Kinerja suatu daerah dapat dinilai dari aspek makro secara ekonomi, yaitu dari (1) kemampuan daerah tersebut untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas pendapatan daerah bruto (*Product Domestic Regional Brutto*) atau pertumbuhan ekonomi, (2) tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita riil (*income regional per capita*) yaitu PDRB per kapita yang telah dikurangi dengan faktor inflasi, dan (3) tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan sumberdaya, yang biasanya diindikasikan oleh pergeseran struktur produksi dan sektor pertanian ke sektor industri. Ketiga aspek tersebut dapat menjadi modal mobilisasi sumber daya domestik. Salah satu target penting dalam mendorong mobilisasi sumber daya domestik adalah melalui rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

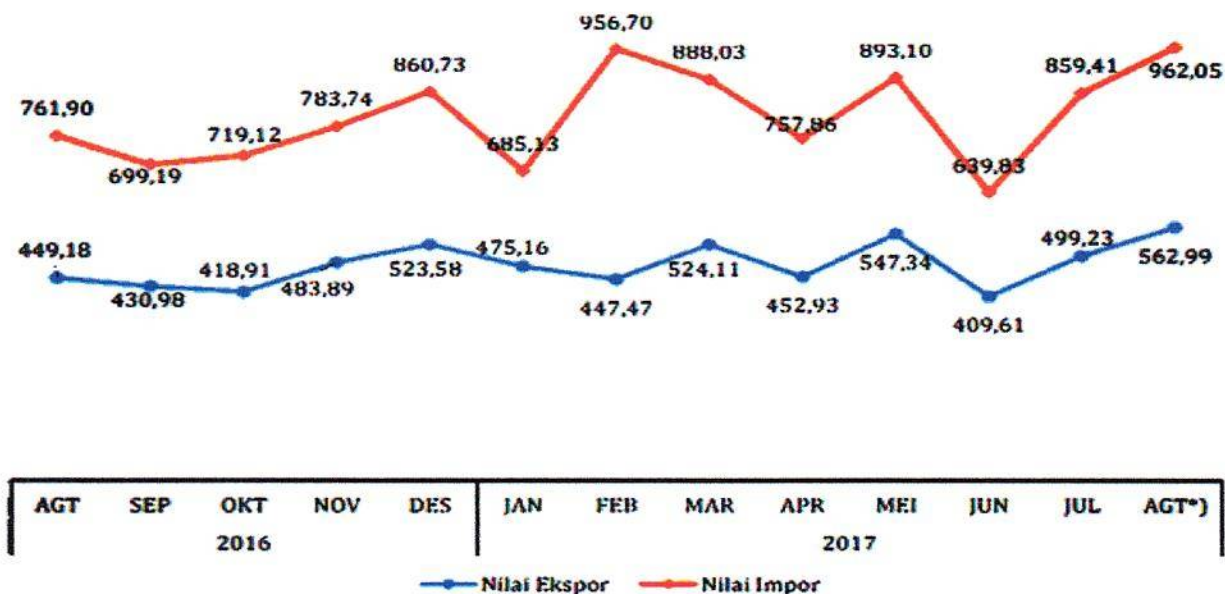
Perdagangan menjadi salah satu sarana pelaksanaan yang penting bagi pencapaian semua target TPB/SDGs adalah peran dari perdagangan, khususnya perdagangan internasional yang mendorong peningkatan penerimaan negara dan daerahserta menunjukkan kemitraan global.

Nilai ekspor Jawa Tengah bulan Agustus 2017 mencapai US\$ 562,99 juta atau mengalami kenaikan sebesar 12,77 persen dibanding ekspor Juli 2017 (US\$ 499,23 juta). Demikian juga bila dibandingkan dengan Agustus 2016 (*year on year*) ekspor Jawa Tengah naik sebesar US\$ 113,81 juta (25,34 persen). Ekspor kumulatif Januari-Agustus 2017 mencapai US\$ 3.918,84 juta naik 10,96 persen dari ekspor kumulatif Januari-Agustus 2016 (US\$ 3.531,77 juta).

Negara pangsa pasar utama ekspor Jawa Tengah selama bulan Agustus 2017 adalah Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok. Ekspor ke Amerika Serikat pada bulan Agustus 2017 mencapai angka terbesar yaitu US\$ 155,09 juta, ekspor ke Jepang sebesar US\$ 64,68 juta, dan ekspor ke Tiongkok mencapai US\$ 48,78 juta. Peranan ketiga negara tersebut terhadap total ekspor Jawa Tengah periode Januari-Agustus 2017 mencapai 46,77 persen.

Tekstil dan barang Tekstil (11), Kayu dan barang dari Kayu (09), serta Berbagai barang hasil pabrik (20) merupakan 3 (tiga) kelompok komoditas utama yang mempunyai nilai ekspor tertinggi selama periode Januari-Agustus 2017. Tekstil dan barang Tekstil (11) memberi andil sebesar 42,56 persen, Kayu dan barang dari Kayu (09) memberi andil 16,13 persen dan Berbagai barang hasil pabrik (20) memberi andil 10,99 persen. Nilai ekspor untuk ketiga kelompok komoditas ini pada bulan Agustus 2017 masing-masing sebesar US\$ 256,51 juta, US\$ 83,44 juta, dan US\$ 57,29 juta.

Menurut jenis komoditas migas dan non migas, pada bulan Agustus 2017 Jawa Tengah melakukan ekspor komoditas migas sebesar US\$ 12,72 juta turun 42,19 persen dari ekspor migas Juli 2017 (US\$ 22,00 juta) sedangkan ekspor komoditas non migas sebesar US\$ 550,27 juta naik 15,31 persen dari ekspor non migas Juli 2017 (US\$ 477,23 juta).



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 68. Perkembangan Nilai Ekspor Imor Jawa Tengah Agustus 2016- 2017

Pangsa pasar utama ekspor komoditas yang berasal dari pelabuhan muat di Jawa Tengah paling banyak tertuju ke negara Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok. Nilai ekspor ke Amerika Serikat pada bulan Agustus 2017 mencapai US\$ 155,09 juta, naik sebesar US\$ 28,77 juta dibandingkan nilai ekspor bulan Juli 2017 (US\$ 126,31 juta). Kontribusi ekspor Jawa Tengah ke Amerika Serikat mencapai 25,84 persen terhadap total nilai ekspor Jawa Tengah periode Januari-Agustus 2017. Dibandingkan ekspor Januari-Agustus 2016 (year on year), ekspor kumulatif ke Amerika Serikat periode Januari-Agustus 2017 meningkat sebesar US\$ 137,98 juta.

Negara Tujuan	Nilai FOB						Persentase terhadap Total Ekspor Januari - Agustus*) 2017
	Juli 2017	Agustus*) 2017	Perubahan Agustus*) 2017 terhadap Juli 2017	Januari - Agustus 2016	Januari - Agustus*) 2017	Perubahan Januari - Agustus*) 2017 terhadap Januari - Agustus 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASEAN	53,18	44,76	-8,42	284,30	400,74	116,44	10,23
Malaysia	10,18	11,45	1,27	121,94	132,41	10,47	3,38
Singapura	23,81	15,44	-8,37	40,91	90,03	49,11	2,30
Thailand	7,25	5,39	-1,86	41,18	86,45	45,27	2,21
ASEAN Lainnya	11,94	12,48	0,54	80,27	91,85	11,59	2,34
UNI EROPA	60,44	69,16	8,72	496,81	533,18	36,37	13,61
Jerman	19,68	21,31	1,63	142,20	161,18	18,98	4,11
Belanda	11,21	12,66	1,44	85,68	95,90	10,22	2,45
Italia	4,57	5,77	1,20	52,26	47,66	-4,61	1,22
Uni Eropa Lainnya	24,97	29,42	4,45	216,67	228,45	11,78	5,83
NEGARA UTAMA LAINNYA	302,45	353,60	51,15	2172,25	2345,49	173,24	59,85
Amerika Serikat	126,31	155,09	28,77	874,50	1012,47	137,98	25,84
Jepang	61,32	64,68	3,36	389,45	459,70	70,25	11,73
Tiongkok	41,69	48,78	7,09	362,44	360,47	-1,98	9,20
Korea Selatan	13,89	23,02	9,13	137,01	136,64	-0,36	3,49
Australia	14,20	12,90	-1,30	91,69	81,76	-9,93	2,09
Taiwan	9,76	11,32	1,56	75,11	80,11	4,99	2,04
Brazil	12,69	15,46	2,76	82,48	76,96	-5,53	1,96
Turki	9,52	10,01	0,49	86,81	75,76	-11,04	1,93
Mesir	13,07	12,35	-0,72	72,77	61,62	-11,14	1,57
Total 15 Negara	416,07	467,52	51,45	2953,36	3279,41	326,05	83,68
Negara Lainnya	83,15	95,47	12,31	578,41	639,43	61,02	16,32
Total Keseluruhan (Migas dan Non Migas)	499,23	562,99	63,76	3531,77	3918,84	387,07	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2. 69. Ekspor Jawa Tengah Menurut Negara Tujuan (Januari – Agustus 2017)

↖

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN SDGs

3.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Tujuan 1 SDGs adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Dalam rangka mencapai tujuan mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun, Jawa Tengah menetapkan 6 target yang diukur melalui 17 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah.

Arah kebijakan Tujuan 1 tertuang dalam RPJMD Perubahan 2013-2018 yang sejalan dengan Misi ke-2 “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran” dan Misi ke-6 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat” yaitu : (1) Mengurangi penduduk miskin diprioritaskan pada kepala rumah tangga miskin tidak produktif dan produktif dengan tingkat kemiskinan tinggi, melalui pola pendampingan charity program dari pemerintah serta pola pemberdayaan dan pengembangan UMKM; (2) Penguatan basis data perencanaan dan sistem informasi terpadu untuk penanggulangan kemiskinan; (3) Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan panganserta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; (4) Meningkatkan pembangunan jaringan listrik perdesaan dan bantuan sambungan rumah listrik murah dan hemat untuk rumah tangga miskin; (5) Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dengan pemberian Bantuan Siswa Miskin pada jenjang pendidikan khusus dan pendidikan menengah; (6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti rehabilitasi sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); (7) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemenuhan prasarana sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta pemerataan tenaga kesehatan dan non kesehatan, serta peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi; (8) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; (9) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta system penyediaan akses aman air minum dan sanitasi; dan (10) Meningkatkan kualitas Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat berpenghasilan rendah/miskin.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 1 yaitu : (1) Program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, melalui kegiatan pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan target jumlah kelompok desa hutan (LMDH) yg meningkat kesejahteraannya pada tahun 2018 sebanyak 25 kelompok; (2) Program peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi, melalui kegiatan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih dengan target pengembangan SPAM Regional pada tahun 2018 sejumlah 3 lokasi serta kegiatan pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS untuk 29 kab/kota pada tahun 2018; (3) Program pendidikan menengah, melalui kegiatan pengelolaan SMK Boarding di 3 lokasi (Pati, Purbalingga dan Semarang) serta Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan target sebanyak 10.000 siswa pada



tahun 2018; (4) Program pelayanan kesehatan, melalui kegiatan pembiayaan kesehatan dengan target proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan pada tahun 2018 sebesar 51% dan kegiatan koordinasi pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan target cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2018 sebesar 82%; (5) Program pencegahan dan pengendalian penyakit, melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dengan target persentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2018 sebesar 92,5%; (6) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terkecil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui kegiatan Peningkatan kemampuan dan ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi dengan target Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial pada tahun 2018 sebanyak 18.444 orang; (7) Program pembangunan perumahan, melalui kegiatan Peningkatan kualitas RTLH Bidang Perumahan, Penanganan kawasan permukiman terdampak bencana dan Perencanaan teknis dan Pembiayaan perumahan dengan target Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2018 sebesar 78,78%; (8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan, melalui kegiatan Pengembangan kawasan permukiman dengan target persentase kawasan permukiman kumuh pada tahun 2018 sebesar 14,13%; (9) Program pelayanan KB, melalui kegiatan Penyediaan distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon), Penyediaan pelayanan medis pemasangan kontrasepsi dan penyediaan sarpras KB dan kesehatan reproduksi dengan target *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)/Peserta KB Aktif pada tahun 2018 sebesar 80%; (10) Program penataan administrasi kependudukan, melalui kegiatan Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan target persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2018 sebesar 82,50% dan (11) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana, melalui kegiatan Perencanaan bidang kebencanaan dengan target jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana pada tahun 2018 sebanyak 2 dokumen.

Tabel 3. 1.Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua								
1.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat Kemiskinan	BPS (Susenas)	%	13,32 (Sept 2015)	12,20-11,73	11,30-10,83	10,40-9,93
Target 1.3. Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai								
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	DINKES	%	32,37	27,57	50	51
1.3.1 (b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	%	105	107	91,01	0
1.3.1 (c)	Presentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase penyandang disabilitas miskin	DINSOS	Orang	PM	785	850	500
1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan	DINSOS	ART	PM	12764	12764	12764

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	bersyarat/Prgram Keluarga Harapan	bersyarat/Prgram Keluarga Harapan						
Target 1.4. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro.								
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	DINKES	%	PM	98,5	79	82
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	DINKES	%	PM	91	92	92,5
1.4.1 (c)	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 tahun-49	CPR/ Peserta KB Aktif	DP3AKB	%	78,24	79	79,5	80

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	tahun yang berstatus kawain							
1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	DPU BMCK	%	68 75,76	67 76,5	71 78	74 83
1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Cakupan Pelayanan Sanitasi	DPU BMCK	%	77	76,94	80	81,5
1.4.1 (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	DISPE-RAKIM	%	14,03	16,92	14,03	14,13
1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	DISKDIKBUD	%	98,43	98,48	98,53	98,62
1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	DISKDIKBUD	%	79,51	79,51	79,75	80
1.4.1 (i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	DISKDIKBUD	%	60	62	64	66
1.4.1 (j)	Persentase	Persentase	DISPER-	%	81,37	65	85	90

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	MASDES DUKCAPIL					
1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Jumlah bantuan sambungan rumah listrik murah dan hemat untuk rumah tangga miskin	DINAS ESDM	Sambungan rumah	1000	907	6163	4754
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan guncangan lingkungan serta bencana								
1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Jumlah Desa Tangguh Bencana	BPBD	Desa	50	56	62	68
1.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD	Rupiah	PM	PM	PM	PM
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi	BPBD	Dokumen	PM	PM	PM	PM

3.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Tujuan 2 SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Dalam rangka menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, Jawa Tengah menetapkan 2 target yang diukur melalui 8 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah.

Arah kebijakan Tujuan 2 tertuang dalam RPJMD Perubahan 2013-2018 yang sejalan dengan Misi ke-2 “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran” yaitu : (1) Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian yang ramah lingkungan serta mendorong penggunaan pupuk organik; (2) Mengembangkan regulasi ketahanan pangan/kedaulatan pangan termasuk alih fungsi lahan pertanian utamanya LP2B dan reformasi agraria dalam rangka mempertahankan produksi dan produktifitas pertanian; (3) Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan panganserta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; (4) Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster; (5) Peningkatan kualitas, keberagaman, produktivitas, dan promosi serta mendorong penerapan standar mutu produk lokal.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 2 yaitu : (1) Program pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan, melalui kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA dengan target Jumlah KWT Pekarangan yang difasilitasi dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan yang B2SA pada tahun 2018 sebanyak 120 kelompok serta kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan target Jumlah kelompok pengolah pangan alternatif yang difasilitasi dalam pengembangan pangan alternatif pada tahun 2018 sebanyak 48 kelompok; (2) Program pelayanan kesehatan, melalui kegiatan koordinasi pelayanan gizi dan masyarakat dengan target Prevalensi gizi kurang pada anak balita (BB/U) sebesar 15,5%, Cakupan ASI eksklusif sebesar 55%, Prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 28% dan Prevalensi Gizi Buruk sebesar 0,04 pada tahun 2018.

Tabel 3. 2. Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 2.1. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun								
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	DISHANPAN	Ton	6.714.715	5.793.026	5.793.026	5.816.198
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	DISHANPAN	kkal/kap/hari	2.003,74	1.850,00	1.850,00	1.850,00
2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	BPS	%	PM	PM	PM	PM
Target 2.2. Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta orang tua pada tahun 2025								
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun	DINKES	%	PM	24,5	24	23,5
2.2.2*	Prevalensi Malnutrisi (berat	Prevalensi Gizi	DINKES	%	0,04	0,05	0,04	0,04

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)	Buruk						
2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil	DINKES	%	PM	30	29	28
2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Cakupan ASI eksklusif	DINKES	%	38,41	PM	53	55
2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor Pola Pangan Harapan	DISHANPAN	Skor	91,45	91,5	86	87

3.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Dalam rangka menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, Jawa Tengah menetapkan 8 target yang diukur melalui 25 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah.

Arah kebijakan Tujuan 3 tertuang dalam RPJMD Perubahan 2013-2018 yang sejalan dengan Misi ke-6 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat” yaitu : Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemenuhan prasarana sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta pemerataan tenaga kesehatan dan non kesehatan, serta peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 3 yaitu : (1) Program pelayanan kesehatan, melalui kegiatan koordinasi pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan target AKI sebesar 116, Angka Kematian Balita sebesar 11% dan Angka kematian Bayi sebesar 11% pada tahun 2018; (2) Program pencegahan dan pengendalian penyakit, melalui : (a) kegiatan surveilans epidemiologi, penanganan KLB dan Bencana, penyiapan pelayanan kesehatan haji dan imunisasi dengan target Cakupan UCI desa sebesar 99% pada tahun 2018; (b) kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan target Angka Kesakitan Malaria sebesar 0,06, Angka penemuan kasus baru kusta sebesar 6 dan Angka kasus filaria yang ditangani sebesar 100 pada tahun 2018; (c) Kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular dengan target proporsi kasus hipertensi di fasilitas layanan kesehatan <20% pada tahun 2018.

✓

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINKES	per 100.000 pddk	111.16	117	117	116
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan	DINKES	%	98.09	98	98.5	98.5
3.1.2 (a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	DINKES	%	PM	98.5	79	82
Target 3.2. Pada 2030, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	%	11.64	11.8	11.75	11
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Cakupan neonatal komplikasi yang ditangani	DINKES	%	87.63	83	84	85
3.2.2 (a)	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	1000 KH	10	12	11.5	11
3.2.2 (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Cakupan UCI desa	DINKES	%	99.95	99	99	99
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan serta								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, dan penyakit menular lainnya								
3.3.3 (a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria.	Angka Kesakitan Malaria	DINKES	per 1000 pddk	0.06	0.07	0,06	0.06
3.3.4.(a)	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	DINKES	%	NA	NA	NA	NA
3.3.5*	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Kusta)	Angka penemuan kasus baru kusta	DINKES	per 100.000 pddk	5.3	7	5,5	6
3.3.5 (b)	Jumlah kab/kota dengan eliminasi filarissis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap 1)	Angka kasus filaria yang ditangani	DINKES	%	100	100	100	100
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat dari penyakit tidak menular (NCD), melalui pencegahan dan pengobatan, serta mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan								
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Proporsi kasus hipertensi di fasyankes	DINKES	%	23.4	<25	<20	PM
3.4.1 (c)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	DINKES	%	NA	NA	NA	NA
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan berbahaya alkohol								
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	BNN JATENG	Orang	PM	550	378	195
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses	Jumlah yang mengakses	BNN	Orang	120	1180	510	210

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	layanan pasca rehabilitasi	layanan pasca rehabilitasi	JATENG					
3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	BNN JATENG	Orang	PM	PM	253	220
3.5.1 (d)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	BNN JATENG	Lembaga	PM	3	18	22
3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN JATENG	%	1,94	PM	PM	PM
Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional								
3.7.1 (a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	CPR/ Peserta KB Aktif	DP3AKB	%	78.24	79	79.5	80
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	BKKBN	Jumlah anak per WUS (15-49 tahun)	2.42	2.34	2.22	2.18
3.7.2 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MJKP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MJKP)	BKKBN	%	25.7	25.8	25.87	26.37

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		cara modern						
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	BKKBN	Kelahiran Per 1000 perempuan (15-19 tahun)	34	32	30.6	31
Target 3.8. Mencapai universal health coverage, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan akses kepada obat-obatan								
3.8.1(a)	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	Unmeet Need	DP3AKB	%	10.48	9.5	9.25	9
3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah	DINKES & BPJS Kesehatan	%	32,37	20	22,85	25,71
Target 3.a. Memperkuat pelaksanaan FCTC WHO di seluruh negara secara tepat								
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	%	PM	PM	PM	PM

3.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Dalam rangka menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua, Jawa Tengah menetapkan 7 target yang diukur melalui 13 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah.

Arah kebijakan Tujuan 4 tertuang dalam RPJMD Perubahan 2013-2018 yang sejalan dengan Misi ke-2 “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran” dan Misi ke-6 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat” yaitu : (1) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; (2) Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; (3) Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pendidikan; (4) Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pendidik; (5) Meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan pemuda.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 4 yaitu : (1) Program pendidikan menengah, melalui kegiatan pengembangan kelembagaan SMA dengan target APK SMA/SMALB/MA/SMK/Paket C sebesar 80% dan kegiatan pemenuhan sarana prasarana SMA dengan target sebesar 90% pada tahun 2018; dan (2) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, melalui kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SMA/SMK dengan target persentase pendidik SMA/SMALB/MA dan SMK bersertifikat pendidik sebanyak 70% pada tahun 2018.

✓

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 4.1. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, adil, dan berkualitas, yang mengarah pada pembelajaran yang relevan dan efektif								
4.1.1 (a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persentase SD/MI yang terakreditasi	DISDIKBUD	%	100	100	100	100
4.1.1 (b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persentase SMP/MTs yang terakreditasi	DISDIKBUD	%	100	100	100	100
4.1.1 (c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Persentase SMA/MA yang terakreditasi	DISDIKBUD	%	100	100	100	100
4.1.1 (d)	APK SD/MI sederajat	APK SD/MI sederajat	DISDIKBUD	%	109.31	109.31	109.36	100.39
4.1.1 (e)	APK SMP/MTs sederajat	APK SMP/MTs sederajat	DISDIKBUD	%	100.69	100.69	100.72	100.74
4.1.1 (f)	APK SMA/SMK/MA sederajat	APK SMA/SMK/MA sederajat	DISDIKBUD	%	74.01	76	78	80
Target 4.2. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan dan pendidikan anak usia dini, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasarnurukan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000								
4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DISDIKBUD	%	75.12	77	79	80
Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua wanita dan pria, terhadap pendidikan teknis, kejuruan dan tersier yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas								
4.3.1 (a)	Persentase APK SMA/SMK/MA sederajat	Persentase APK SMA/SMK/MA sederajat	DISDIKBUD	%	74.01	76	78	80
4.3.1 (b)	APK Perguruan Tinggi (PT).	APK Perguruan Tinggi (PT).	BPS	%	PM	PM	PM	PM
Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat adat, dan anak-anak dalam kondisi rentan								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat ; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	BPS	%	PM	PM	PM	PM
Target 4.6. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki dan perempuan, mampu membaca dan menghitung								
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Angka melek huruf	BPS	%	93.12	PM	PM	PM
Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, penyandang cacat dan gender, serta memberikan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua								
4.a.1	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	% Ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar nasional pendidikan	DISDIK BUD	%	84.33	86	88	90

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 4.c. Pada tahun 2030, Secara bermakna meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya LDCs dan SIDS								
4.c.1	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	Persentase pendidik SMA/SMALB/MA/SMK bersertifikat pendidik	DISDIK BUD	%	64.97	66	68	70

3.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Jawa Tengah menetapkan 5 target yang diukur melalui 10 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah.

Arah kebijakan Tujuan 5 tertuang dalam RPJMD Perubahan 2013-2018 yang sejalan dengan Misi ke-2 “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran” yaitu : (1) Mendorong percepatan implementasi PUG dan PUHA; (2) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; (3) Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, anak dan *trafficking*; (4) Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap perempuan dan anak.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 5 yaitu : (1) Program kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, melalui kegiatan peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan hak anak pada seluruh pengambil kebijakan eksekutif, legislatif dan *stakeholders* dengan target Jumlah kabupaten mengimplementasikan SBA sebanyak 2 dan target kab/kota yang mendapatkan penguatan jaringan perlindungan anak desa/kelurahan sebanyak 2 pada tahun 2018; (2) Program peningkatan kualitas hidup, dan perlindungan perempuan dan anak melalui : (a) kegiatan advokasi layanan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan target Jumlah layanan pendampingan psikologis ABH secara reguler yang dilakukan petugas TESA 129 sebanyak 12 kali pada tahun 2018; (b) kegiatan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan, anak dan *trafficking* dengan target persentase korban kekerasan berbasis gender dan anak yang melapor dan rujukan, dilayani layanan di Pelayanan Terpadu sebesar 100% pada tahun 2018; dan (c) kegiatan peningkatan partisipasi perempuan dan lembaga-lembaga pengambil keputusan dengan target Jumlah perempuan yang dilatih memiliki kapasitas memadai dan ketertarikan sebagai kader politik sebanyak 1.000 orang pada tahun 2017; (3) Program peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui kegiatan peningkatan kualitas pengelola KRR dan PIK KRR dengan target Jumlah pengelola PIK KRR yang diadvokasi tentang kesehatan reproduksi, HIV/AIDS dan NAPZA sebanyak 100 orang pada tahun 2018.

Tabel 3. 5. Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responisf gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD	DP3AKB	%	65.99	69.28	72.74	76.37
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan gadis di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia dan seksual, dan berbagai								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	DP3AKB	%	0,016	0,014	0,017	0,034
5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	BPS	%	0.74	PM	PM	PM
5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan terlayani	DP3AKB	%	100	100	100	100
Target 5.3. Menghilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan dini dan paksa serta sunat perempuan								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus	Persentase usia perkawinan perempuan	DP3AKB	%	1.05	2.19	2.18	2.17

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun						
5.3.1 (c)	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/SMK/MA sederajat	DISDIK BUD	%	74.01	76	78	80
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif dari perempuan, dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan publik								
5.5.1 *	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	DP3AKB	%	24	30	24	24
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	BPS (PMBG 2017)	%	47.72	PM	PM	PM
Target 5.6. Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi yang disepakati sesuai dengan Program Aksi ICPD dan Beijing platform for Action serta dokumen-dokumen hasil konvensi lainnya								
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KByang tidak terpenuhi)	Unmet need KB	DP3AKB	%	10.48	9.5	9.25	9
5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	BKKBN	%	34	32	30.6	31

KETERANGAN:

PM (Prememory = Tidak Ada Angka Target)

3.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, Jawa Tengah menetapkan 6 target yang diukur melalui 17 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah.

Arah kebijakan Tujuan 6 tertuang dalam RPJMD Perubahan 2013-2018 yang sejalan dengan Misi ke-6 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat” dan Misi ke-7 “Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan” yaitu : (1) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan akses aman air minum dan sanitasi (SPAM dan TPA Regional); (2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana jaringan irigasi serta pengembangan tampungan air baku secara berkelanjutan; dan (3) Meningkatkan kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipasi, penyediaan akses aman air minum dan sanitasi serta air baku berbasis pemberdayaan; dan (4) Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan pantai kritis di muara sungai utamanya pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 6 yaitu : (1) Program dan penyediaan air baku melalui kegiatan perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku, dengan target jumlah prasarana dan sarana air baku yang diperbaiki atau dibangun sebanyak 31 embung pada tahun 2018; (2) Program Rehabilitasi hutan dan lahan, melalui kegiatan pengembangan usaha hutan rakyat dan aneka usaha kehutanan dengan target tahun 2018 seluas 134.370 ha serta kegiatan bantuan bibit, perbenihan dan pengembangan budidaya tanaman kehutanan di 6 DAS. (3) Selain itu, dari unsur non pemerintah juga melaksanakan program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Garang secara Terpadu dan Berkelanjutan dengan pembiayaan bersumber dari salah satu NGO yaitu Erca Japan; (4) Program pengembangan pertambangan dan air tanah melalui 2 kegiatan yaitu: Pengawasan dan penertiban air tanah yang ditargetkan pada tahun 2018 untuk 600 obyek sumur dan Peningkatan pelayanan perizinan/rekomendasi air tanah bagi dalam bentuk kajian teknis terhadap permohonan ijin air tanah dengan target sejumlah 558 kajian pada tahun 2018; (5) Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam melalui kegiatan pembangunan sumur pantau air tanah dengan target sebanyak 7 unit dan kegiatan pembangunan sumur resapan sebanyak 6 unit pada tahun 2018; (6) Program pengelolaan limbah komunal berbasis masyarakat melalui kegiatan Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rumah Tangga yang telah dilaksanakan bagi 85 KK pada tahun 2016; (7) Dari unsur non pemerintah, melaksanakan program penguatan ketangguhan masyarakat pesisir Kota Semarang melalui rehabilitasi mangrove dan peningkatan ekonomi. Bentuk riil kegiatan adalah membangun sistem peringatan dini iklim untuk masyarakat pesisir Semarang.



Tabel 3. 6. Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua								
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	DPU BMCK	%	68 75,76	67 76,5	71 78	74 83
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Kapasitas Prasarana air baku	Dinas PU SDA TARU	%	54.49	56.2	58.5	60.8
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan perempuan dan anak perempuan serta kelompok masyarakat rentan								
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Cakupan pelayanan sanitasi	DPU BMCK	%	77	76,97	80	81,5
6.2.1.(c)	Jumlah Desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah Desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	DINKES	Desa/Kelurahan	4.392	2.447	2.547	2.697
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar	DINKES	Desa/Kelurahan	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Sembarangan (SBS)						
6.2.1 (e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur airlimbah dengan sistem terpusatskala kota, kawasan dan komunal	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusatskala kota, kawasan dan komunal	DPU BMCK/SA TKER PPLP	Kab/Kota (Skala)	35	35	35	35
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah, dan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global								
6.3.1 (a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	DPU BMCK/SA TKER PPLP	%	54,29	PM	PM	77,14
6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	DPU BMCK/SA TKER PPLP	%	PM	77	80	81,5
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara bermakna meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin keberlanjutan penggunaan dan pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara bermakna mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air								
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air	Pengendalian dan penegakan hukum	DINAS ESDM	Obyek sumur	500	400	500	600

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	tanah	bagi penggunaan air tanah						
Target 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat								
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	DLHK	Dokumen	21	21	21	21
6.5.1 (b)	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	BMKG	Pos Kerjasama	850	850	850	850
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	DPU SDA TARU	Unit	7	7	7	7
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	DLHK	Ha	13225	13295	13320	134370
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat	DLHK	DAS	11	8	6	6

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan						
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	DLHK	Unit	12	PM	8	115
Target 6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi sumber daya air pada ekosistem, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, dan danau								
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	PERHUTANI	Hektar	13,665.75	PM	PM	PM
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	DLHK	DAS	11	8	6	6

KETERANGAN:

PM (Prememory = Tidak Ada Angka Target)

3.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

Tujuan 7 TPB/SDGs adalah menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Dalam rangka menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua, Jawa Tengah menetapkan 2 target yang diukur melalui 5 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah.

Arah kebijakan Tujuan 7 tertuang dalam RPJMD Perubahan 2013-2018 yang sejalan dengan Misi ke-2 “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran” yaitu : (1) Meningkatkan pemanfaatan potensi panas bumi dan energi alternatif; (2) dengan penggunaan pilihan teknologi sederhana, tepat guna dan ramah lingkungan; (3) Meningkatkan pembangunan jaringan listrik pedesaan dan bantuan sambungan rumah listrik murah dan hemat untuk rumah tangga miskin; dan (4) Meningkatkan budaya hemat energi.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 7 yaitu : (1) Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas melalui kegiatan pembangunan jaringan listrik pedesaan dengan target Jumlah kms pembangunan jaringan listrik pedesaan pada tahun 2017 sebesar 9,40 dan kegiatan pengembangan listrik murah dan hemat dengan target Jumlah bantuan sambungan listrik pada tahun 2018 sebesar 4,754 sambungan rumah; (2) Program pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi melalui kegiatan : (a) Pembangunan PLTS SHS dengan target Jumlah PLTS SHS yang dipasang pada tahun 2018 sebanyak 87 unit; Jumlah PLTS PJU yang dipasang pada tahun 2017 sebanyak 27 unit; dan Terpasangnya 1 unit PLTS rooftop; (b) Identifikasi dan Pengembangan Potensi Gas Rawa dengan target Terbangunnya demplot pemanfaatan gas rawa; (c) Pengembangan Desa Mandiri Energi dengan target Jumlah Pembangunan demplot biogas pada tahun 2018 sebanyak 10 unit; (d) Pembangunan PLTMH dengan target Jumlah Pembangunan PLTMH pada tahun 2018 sebanyak 2 unit.

Tabel 3. 7.Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 7.1. Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, handal, dan modern								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	ESDM	%	91.1	90.01	91.7	94
7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita akan	PLN	Konsumsi/Perkapita	NA	NA	NA	NA
7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	PLN	Sambunga s Gas	NA	NA	NA	NA
7.1.2 (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga	PLN	%	NA	NA	NA	NA
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan	ESDM	%	7,8	8,54	9,38	10,2

KETERANGAN:

NA (Not Available = Data Tidak Tersedia)

3.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Tujuan 8 TPB/SDGs adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif & menyeluruh, serta pekerjaan yang layak. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yg inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif & menyeluruh, serta pekerjaan yang layak, Jawa Tengah menetapkan 7 target yang diukur melalui 14 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah.

Arah kebijakan Tujuan 8 tertuang dalam RPJMD Perubahan 2013-2018 yang sejalan dengan Misi ke-2 “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran” yaitu: (1) Mengurangi penduduk miskin diprioritaskan pada kepala rumah tangga miskin tidak produktif dan produktif dengan tingkat kemiskinan tinggi, melalui pola pendampingan charity program dari pemerintah serta pola pemberdayaan dan pengembangan UMKM; (2) Optimalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan destinasi wisata; (3) Memprioritaskan pendidikan kejuruan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi; (4) Mengembangkan kondusivitas hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja; (5) Mengembangkan wirausaha baru diarahkan pada usaha kreatif bernilai tambah tinggi; (6) Meningkatkan kapasitas dan produktivitas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) diarahkan pada fasilitas akses modal kerja pembimbingan teknis dan pendampingan manajerial berbasis sumber daya lokal; (7) Optimalisasi kelembagaan ekonomi perdesaan; (8) Optimalisasi pengembangan akses dan informasi pasar melalui perkuatan jejaring sentra dan klaster; (9) Peningkatan kualitas, keberagaman, produktivitas, dan promosi serta mendorong penerapan standar mutu produk lokal; (10) Membangun kesadaran bersama untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri; (11) Pengembangan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 8 yaitu : (1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja melalui kegiatan Pelayanan, Penempatan, Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri dengan target Jumlah Masyarakat yang Mendapat tentang Pekerjaan Mekanisme dan Prosedur Kerja pada tahun 2018 sebesar 11800 Orang; (2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan Pelatihan bagi Calon tenaga kerja berbasis kompetensi di bidang industri dengan target Meningkatnya kompetensi pencari kerja di bidang industri pada tahun 2018 sebesar 160 orang (3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan melalui kegiatan Pengawasan dan pembinaan norma ketenagakerjaan dengan target Jumlah perusahaan yang pengawasan dan pembinaan penarikan pekerja anak Pada tahun 2018 sebesar 60 anak; (4) Program Pemasaran Pariwisata melalui kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata didalam negeri dengan target 11 *event* pada tahun 2018 sebesar 27,60%; dan (5) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata melalui kegiatan Pengembangan potensi keunikan lokal masyarakat dan alam menjadi atraksi wisata dengan target 194 DTW/Desawisata pada tahun 2018 sebesar 15,39%.

✓

[illegible]

[illegible]

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
dan jasa keuangan untuk semua masyarakat								
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	BI JATENG dan OJK	Unit	NA	NA	NA	NA
8.10.1. (a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS	Km	PM	PM	PM	PM

3.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Tujuan 9 TPB/SDGs adalah membangun infrastruktur yg tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Dalam rangka membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi, Jawa Tengah menetapkan 4 target yang diukur melalui 10 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah.

Arah kebijakan Tujuan 9 tertuang dalam RPJMD Perubahan 2013-2018 yang sejalan dengan Misi ke-7 "Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan" yaitu :

- (1) Meningkatkan struktur, pelebaran, rehabilitasi dan pemeliharaan berkala serta menjaga kondisi baik jalan dan jembatan, dengan mengupayakan peningkatan kecepatan penanganan kerusakan jalanan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan untuk menuju jalan bebas lubang;
- (2) Meningkatkan penuntasan penanganan secara bertahap dan terarah pada ruas jalan dan jembatan utamanya untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan pengembangan wilayah (ruas perbatasan provinsi, akses wisata, akses penghubung Pantura- Pansela, pembangunan perkotaan dan perdesaan, alternatif jalan nasional dan akses langsung jalan arteri, daerah rawan bencana dan strategis lainnya);
- (3) Meningkatkan ketersediaan peralatan yang mendukung pemeliharaan jalan dan SDM teknis kebinamargaan; pengembangan sistem informasi manajemen dan publik menyesuaikan perkembangan teknologi dan struktur konstruksi jalan; meningkatkan fungsi perencanaan, pengawasan dan monitoring evaluasi serta mempersiapkan rencana penanganan infrastruktur strategis diantaranya rencana pembangunan perlintasan tidak sebidang dan pengembangan akses menuju kawasan wisata unggulan;
- (4) Meningkatkan penataan sistem transportasi antar moda, pengembangan angkutan massal (mass rapid transport) di wilayah perkotaan, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu bersama dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (5) Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan pantai kritis di muara sungai utamanya pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal;
- (6) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam pengembangan, penyediaan dan penanganan infrastruktur strategis utamanya kewenangan pemerintah dan kabupaten/kota (jalan tol, jalan strategis pendukung perekonomian, waduk/embung, irigasi, pengendalian daya rusak air); transportasi (bandar udara, pelabuhan, terminal, kereta api dan ASDP); pengembangan infrastruktur lintas kabupaten/kota dan penanganan rob utamanya di wilayah Pantura);
- (7) Meningkatkan upaya dukungan pembiayaan dan penanganan dari Pemerintah dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*), *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta mengupayakan dukungan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan kondisi infrastruktur Kabupaten/Kota dan desa;
- (8) Meningkatkan pengendalian pembangunan infrastruktur dengan meminimalkan pemanfaatan LP2B, kawasan resapan air, dan pengurangan emisi GRK;
- (9) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
- (10)



Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan (11) Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 9 yaitu :

- (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, melalui kegiatan penanganan mitigasi, adaptasi dan pencegahan pencemaran serta kerusakan lingkungan akibat bencana/gangguan lingkungan dan pemanasan global dengan target Perubahan emisi CO_2 /emisi gas rumah kaca pada tahun 2017 sebesar 45.984 Gg CO_2 e; (2) Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Alih Status jalan Kab/Kota ke Provinsi, melalui kegiatan Peningkatan jalan dan penggantian jembatan dengan target Persentase panjang jalan dengan lebar ≥ 6 m pada tahun 2018 sebesar 77,87%; Persentase panjang jembatan dengan lebar ≥ 9 m pada tahun 2018 sebesar 84,27%; dan Persentase panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor (MST ≥ 8 ton) pada tahun 2018 sebesar 82,3%; (3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan melalui kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan target Persentase jalan dalam kondisi baik pada tahun 2018 sebesar 89,60%; Persentase jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2018 sebesar 85,80%; (4) Program Pengembangan Perhubungan Darat melalui kegiatan Peningkatan manajemen lalu lintas jalan (keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan pelayanan angkutan umum dengan target Jumlah desa yang terlayani angkutan pedesaan perintis pada tahun 2018 sebanyak 2 trayek (7 desa); Jumlah Kabupaten/Kota yang mengembangkan angkutan umum dan massal pada tahun 2018 sebanyak 2 kota; dan (5) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa, melalui kegiatan Forum Komunikasi Media Tradisional dengan target Jumlah Kabupaten/ Kota yang membentuk Lembaga Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) pada tahun 2018 sebanyak 6 Kabupaten/Kota.

Tabel 3. 9. Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 9.1. Mengembangkan kualitas, kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan infrastruktur, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua								
9.1.1. (a)	Kondisi mantap jalan nasional	Persentase Kondisi jalan baik	DPU BMCK	%	86.54	88,88	88,92	89,6
Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pangsa tenaga kerja dan produk domestik bruto industri, sejalan dengan kondisi nasional, dan setidaknya dua kali lipat di negara kurang berkembang								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	BPS	%	35.27	PM	PM	PM
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	DISPERINDAG	%	33.5	32.5	35	35.1
Target 9.4. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi teknologi dan proses industri yang bersih dan ramah lingkungan, semua negara mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan masing-masing								
9.4.1*.	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri	DLHK	%	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		manufaktur						
9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Perubahan Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca	DLHK	Gg CO ₂ e	52805	57537	61427	65620
Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020								
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	DISKOMINFO	%	PM	PM	PM	PM
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	DISKOMINFO	%	PM	PM	PM	PM
9.c..1. (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	DISKOMINFO	%	PM	PM	PM	PM

3.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

Tujuan 10 TPB/SDGs adalah mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Dalam rangka mengurangi kesenjangan intra dan antar negara Jawa Tengah menetapkan 4 target yang diukur melalui 8 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah.

Arah kebijakan Tujuan 10 tertuang dalam RPJMD Perubahan 2013-2018 yang sejalan dengan Misi ke-2 “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran” yaitu : (1) Peningkatan kualitas, keberagaman, produktivitas, dan promosi serta mendorong penerapan standar mutu produk lokal; (2) Optimalisasi kelembagaan ekonomi perdesaan; (3) Mengembangkan kondusivitas hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja; dan (4) Peningkatan kualitas dan ketrampilan masyarakat.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 10 yaitu : (1) Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa, melalui kegiatan Rintisan Model Desa Berdikari dengan target Pendampingan 100 desa pada tahun 2018; (2) Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat, melalui kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan target Jumlah BUMDes yang difasilitasi pada tahun 2018 sebanyak 29 unit; (3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, melalui kegiatan Penetapan Upah minimum 1 milyar dengan target Rasio upah minimum Kabupaten/Kota dibanding KHL pada tahun 2018 sebesar 97,8%; (4) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, melalui kegiatan Pelembagaan pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas keluarga yang responsive hak anak dengan target Rasio Kabupaten/Kota menuju Kota Layak Anak pada tahun 2018 sebesar 100%; Rasio Kabupaten/Kota yang memenuhi perlindungan anak, kesejahteraan dan hak-hak anak pada tahun 2018 sebesar 28,6/14,3.

Tabel 3. 10. Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional								
10.1.1	Koefisien Gini	Koefisien Gini	BPS	Indek	0.382	PM	PM	PM
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat kemiskinan	BPS	%	13,32 (Sept 2015)	12,20 - 11,73	11,30 - 10,83	10,40 - 9,93
10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	DISPERMA SDES DUKCAPIL	Desa	100	100	100	100
Target 10.3. Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan dari hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat								
10.3.1. (a)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	Indeks	79.44	PM	PM	PM
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	BIRO HUKUM	Aduan masyarakat	6	10	10	10
10.3.1. ©	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama	DP3AKB	%	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		kekerasan terhadap perempuan						
Target 10.4. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar								
10.4.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	BPJS/KET ENAGA KERJAAN	%	105%	107%	91,01%	0%
Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik								
10.7.2.(b)	Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan dikelola dengan baik	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	DISNAKER TRANS	Fasilitasi TKLN	57.107	85.500	50.000	60.500

3.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Tujuan 11 TPB/SDGs adalah menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan pada tahun 2030, Jawa Tengah menetapkan 7 target yang diukur melalui 12 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah.

Arah kebijakan Tujuan 11 tertuang dalam RPJMD Perubahan 2013-2018 yang sejalan dengan Misi ke-6 “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat” dan Misi ke-7 “Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan”, yaitu : (1) Meningkatkan kualitas Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat berpenghasilan rendah/miskin; (2) Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; (3) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan manfaat penataan ruang sebagai langkah awal sebelum penerapan sanksi atas penegakan Perda; (4) Meningkatkan pengelolaan dan sebaran Ruang Terbuka Hijau; (5) Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi).

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 11: (1) Program Pembangunan Perumahan antara lain dalam bentuk kegiatan: (a) Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni, dengan target 2018 sebanyak 25.667 unit; (b) Peningkatan Kualitas Menuju Rumah Sehat dan Berwawasan Lingkungan, dengan target 2018 sebanyak 245 unit; (c) Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan relokasi program pemerintah beserta PSUnya, dengan target 2018 sebanyak 300 unit; dan (d) Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya; (2) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam bentuk kegiatan koordinasi peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan di kabupaten/kota dalam rangka Adipura dan pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau atau daerah industri hasil tembakau. Dari 2 kegiatan tersebut, ditargetkan pada tahun 2018 untuk persentase sampah perkotaan yang ditangani sebesar 1.434.033 ton/ha. Selain itu, ditargetkan untuk 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menjadi Kabupaten/Kota hijau dan menerapkan *green waste* di kawasan perkotaan metropolitan.

Tabel 3. 11.Target Pencapaian Indikator Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta merata kawasan kumuh								
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki hunian yang layak dan terjangkau	Rasio rumah layak huni	DISPERAKIM	%	78,67	76,75	78,74	78,78
Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses pada sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang rentan, wanita, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang tua								
11.2 .1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Jumlah kendaraan bus AKDP di Jawa Tengah	DISHUB	%	47	47	52	57
Target 11.4. Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia								
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	DISDIKBUD	PM	PM	PM	PM	PM
Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus pada melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Orang	PM	PM	PM	PM
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BPBD	PM	PM	PM	PM	PM
11.5.1.(b)(	Jumlah desa tangguh bencana	Jumlah desa tangguh	BPBD	Desa	50	62	68	68

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ini, sesuai dengan Sendai Framework untuk pengurangan risiko bencana 2015-2030								
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	BPBD	%	PM	PM	PM	PM
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	PM	PM	PM	PM

3.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Tujuan 12 TPB/SDGs adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada tahun 2030, Jawa Tengah menetapkan 3 target yang diukur melalui 4 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah.

Arah kebijakan Tujuan 12 tertuang dalam RPJMD Perubahan 2013-2018 yang sejalan dengan Misi ke-2 “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran” dan Misi ke-7 “Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan” yaitu : (1) Meningkatkan pemanfaatan potensi panas bumi dan energi alternatif dengan penggunaan pilihan teknologi sederhana, tepat guna dan ramah lingkungan; (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan (3) Meningkatkan pengendalian pembangunan infrastruktur dengan meminimalkan pemanfaatan LP2B, kawasan resapan air, dan pengurangan emisi GRK.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 12 antara lain program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui 4 kegiatan yaitu : (1) Pengelolaan kualitas air dan penetapan kelas air sungai untuk memenuhi kebutuhan standar minimal bidang lingkungan hidup bagi masyarakat dengan indikator kegiatan jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU mencapai 188 (target 2018); (2) Perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 pada usaha/kegiatan dengan indikator kegiatan Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah; (3) Koordinasi peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan di kabupaten/kota dalam rangka Adipura dengan indikator kegiatan jumlah timbulan sampah yang didaur ulang sebesar 5.565.804 ton (target 2016) dan (4) Pelatihan keefisiensi dan produksi ramah lingkungan dengan indikator kegiatan jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 sebanyak 188 perusahaan (target 2018).

Tabel 3. 12. Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah secara ramah lingkungan melalui siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan								
12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	DLHK	perusahaan/kegiatan	87	103	88	188
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	DLHK	Ton/th	1,073,967.64	1,076,306.60	1,078,703.91	1,081,161.27
Target 12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali								
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLHK	Ton/th	10	7.8	7.9	18
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DLHK	Perusahaan	200	206	160	188

KETERANGAN:

PM (Prememory = Tidak Ada Angka Target)

3.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Tujuan 13 SDGs adalah penanganan perubahan iklim dan penanggulangan kebencanaan. Dalam rangka mencapai tujuan penanganan perubahan iklim dan penanggulangan kebencanaan, Jawa Tengah menetapkan 2 target yang diukur melalui 2 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah.

Arah kebijakan Tujuan 13 yang tertuang dalam RPJMD Perubahan 2013-2018 sejalan dengan Misi ke-7 “Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan” yaitu Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi).

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 13 antara lain: (1) Program penyelenggaraan penanggulangan bencana; (2) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam salah satunya dalam bentuk kegiatan penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca dan (3) Program peringatan dini banjir dengan pilot project di Sungai Bringin Semarang, yang dilaksanakan oleh Organisasi Non Pemerintah yaitu BINTARI. Bentuk konkrit kegiatan yang dilakukan adalah pembentukan penguatan Kelompok Siaga Bencana (KSB) dengan target 5 kelurahan di DAS Bringin.

Tabel 3. 13.Target Pencapaian Indikator Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara								
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	BPBD	Dokumen	PM	PM	PM	PM
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Orang	PM	PM	PM	PM
Target 13.2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional								
13.2.1.(a) (*)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	DLHK	Buku	1 buku	1	1	1

3.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

Tujuan 14 TPB/SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan adalah melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, Jawa Tengah menetapkan 3 target yang diukur melalui 3 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah.

Arah kebijakan Tujuan 14 yang tertuang dalam RPJMD Perubahan 2013-2018 sejalan dengan Misi ke-7 “Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan” yaitu (1) Meningkatkan penanganan lahan kritis dan kerusakan wilayah pesisir dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 14 yaitu (1) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dengan Luas tanaman penghijauan di wilayah pesisir sejumlah 40 ha (tahun 2018); (2) Program rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan, dengan target pada tahun 2018 yaitu Luas penanaman mangrove sejumlah 8,5 ha dan Luas terumbu karang buatan sejumlah 6,48 ha dan (3) Dalam rangka penyediaan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pasar, dilakukan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Melalui upaya tersebut, ditargetkan pada tahun 2018 Jumlah nelayan yang terlindungi sebanyak 54.000 nelayan, serta peningkatan rata-rata pendapatan wanita pesisir dan taruna pesisir menjadi 7.600.000 Rp/Kapita/Tahun dan 10.000.000 Rp/Kapita/Tahun.

Tabel 3. 14.Target Pencapaian Indikator Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 14.5. Pada tahun 2020, melakukan konservasi setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia								
14.5.1*	Cakupan kawasan konservasi laut	Cakupan kawasan konservasi laut	DKP	Ha	12,426.13	PM	PM	PM
Target 14.6. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan overfishing, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) dan menahan jenis subsidi baru, mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan setidaknya negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada Organisasi Perdagangan Dunia								
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Persentase kepatuhan pelaku usaha	DKP	%	80	PM	PM	PM
Target 14.b. Menyediakan akses untuk buruh nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pasar								
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi	DKP	Orang	PM	55.020	53.700	54.000

3.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Tujuan 15 SDGs adalah pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Dalam rangka mencapai tujuan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, Jawa Tengah menetapkan 3 target yang diukur melalui 5 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah.

Arah kebijakan Tujuan 15 yang tertuang dalam RPJMD Perubahan 2013-2018 sejalan dengan Misi ke-7 “Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan” yaitu : (1) Meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH; (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (3) Meningkatkan pengendalian pembangunan infrastruktur dengan meminimalkan pemanfaatan LP2B, kawasan resapan air, dan pengurangan emisi GRK.

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 15 yaitu : (1) Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan target Jumlah luas RTH di wilayah perkotaan pada tahun 2018 sebesar 40 hektar; (2) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam melalui penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan hutan, seluas 220 ha (target 2018) dan penanaman tanaman unggul lokal daerah/tanaman langka sebanyak 15 jenis (target 2018).

Tabel 3. 15. Target Pencapaian Indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin konservasi, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering yang sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional								
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	DLHK	%	0,44	0,45	0,45	0,45
Target 15.2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global								
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya ekosistemnya	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya ekosistemnya	DLHK	Hektar	Kajian pemulihan	PM	PM	PM
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	DLHK	Hektar	PM	PM	PM	PM
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	DLHK	Unit	20	20	20	20
Target 15.3. Pada tahun 2020, mengurangi penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi								
15.3.1(a) (*)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	DLHK	%	4.99	5	5	5

3.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 TPB/SDGs adalah mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Dalam rangka mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh, Jawa Tengah menetapkan 8 target yang diukur melalui 28 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah.

Arah kebijakan Tujuan 16 yang tertuang dalam RPJMD Perubahan 2013-2018 sejalan dengan Misi ke-3 “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*” yaitu : (1) Mengembangkan sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompetendan/atau tersertifikasi, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera, dan sistem pembinaan karier yang terbuka; (2) Memprioritaskan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik; (3) Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; (4) Meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perijinan; (5) Meningkatkan investasi pada seluruh kabupaten/kota; (6) Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; (7) Mengimplementasikan aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran serta transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah; (8) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (9) Meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang handal; (10) Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi APIP; (11) Menerapkan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; (12) Mengoptimalkan proses ; penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah; (13) Penanganan pelanggaran peraturan daerah melalui tindakan-tindakan preventif dan represif.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 16 yaitu : (1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dengan target pemeriksaan Kabupaten/Kota sebanyak 9 Kabupaten/Kota dan pemeriksaan Provinsi sebanyak 34 pada tahun 2018; (2) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan target Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa sebesar 100% pada tahun 2018; (3) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan melalui kegiatan peningkatan pemenuhan aksi HAM dan APPK dengan target Jumlah Penanganan aduan masyarakat menurun; (4) Program Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui kegiatan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi dengan target Terkelolanya, terfasilitasinya dan terlaksananya pengelolaan baranga daan jasa sebesar 100%; (5) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum dan sengketa hukum dengan target jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu meningkat.

✓

[illegible]

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
bagi semua								
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	POLDA	%	PM	980	972	515
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	BIRO HUKUM	Orang	120	180	180	180
16.3.1.(c)	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum	POLDA	Perkara	NA	NA	NA	NA
Target 16.5. Secara substansial mebgurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya								
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	KPK	Indeks	3.59	0	0	0
Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat								
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BAPPE DA	%				
16.6.1 (a)	Prosentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan daerah dengan opini WTP	Inspektorat dan BPK Perwakilan Jawa Tengah	Prov/Kab/ Kota	12	17	17	23

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	Nilai SAKIP	BIRO ORAGANISASI	Nilai /Persentase	PM	PM	PM	PM
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	DISKOMINFO & BIRO BANGDANA	%	59 SKPD	PM	PM	PM
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	BIRO ORAGANISASI	%	PM	PM	PM	PM
Target 16.7. Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan								
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	DP3AKB	%	24	30	24	PM
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	BKD	Es. I (0) 0% ES. II (13) 0,37% ES. III (127) 7,15% ES. IV (440) 24,8%	0	0	0	0
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS	Indeks	69.75	PM	PM	PM

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	Indeks	79.44	PM	PM	PM
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Hak-hak Politik.	BPS	Indeks	67.24	PM	PM	PM
Target 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas hukum bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran								
16.9.1.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	DISPERMAS DES DUK CAPIL	%	55	65	85	85
16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	DISPERMAS DES DUK CAPIL	%	NA	NA	NA	NA
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	DISPERMAS DES DUK CAPIL	%	81,37	65	94	100
Target 16.10. Memastikan akses publik pada informasi dan melindungi kebebasan fundamental, yang sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional								
16.10.1.(a)	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	BIRO HUKUM	Aduan masyarakat	6	10	10	10
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	DP3AK B	%	PM	0,022	0,019	PM

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, stautori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	Persentase SKPD yang mengembangkan Teknologi Informasi	DISKO MINFO	%	35	100	100	100
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di Provinsi	KIP	Badan Publik	49 SKPD 12 BUMD	49 SKPD 12 BUMD	41 SKPD 12 BUMD	41 SKPD 12 BUMD
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	DISKO MINFO & KIP	%	5%	5%	8%	11%

3.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Tujuan 17 TPB/SDGs adalah memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, Jawa Tengah menetapkan 6 target yang diukur melalui 9 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan dan program/kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah.

Arah kebijakan Tujuan 17 yang tertuang dalam RPJMD Perubahan 2013-2018 sejalan dengan Misi ke-6 "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat" dan Misi ke-7 "Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan" yaitu : (1) Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas serta partisipasi swasta dalam penyelenggaraan pendidikan; dan (2) Meningkatkan upaya dukungan pembiayaan dan penanganan dari Pemerintah dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*), *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta mengupayakan dukungan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan kondisi infrastruktur Kabupaten/Kota dan Desa.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian target pada Tujuan 17 yaitu : (1) Program peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor, melalui kegiatan peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor luar negeri pada tahun 2018 sebesar 13,57%; Nilai ekspor non migas pada tahun 2018 sebesar 1.159 juta US\$; Nilai impor non migas pada tahun 2018 sebesar 5.729 juta US\$ (2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, melalui kegiatan Forum Komunikasi Media Tradisional dengan target Jumlah kabupaten/kota yang membentuk lembaga Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) pada tahun 2018 sebanyak 6 kabupaten/kota.

Tabel 3. 17. Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 17.1. Penguatan mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional untuk negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDM menurut sumbernya	BPS	%	1.66%	PM	PM	PM
17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	BPS	%	0.90%	PM	PM	PM
Target 17.6. Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan triangular regional dan internasional pada akses sains, teknologi dan inovasi dan meningkatkan saling berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan yang saling timbal balik, termasuk melalui peningkatan koordinasi antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.2 (c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	DISKOM-INFO	%	PM	PM	PM	PM
Target 17.8. Beroperasinya secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas yang inovatif dan teknologi untuk negara-negara kurang berkembang pada 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang mendukung, khususnya teknologi informasi dan komunikasi								
17.8.1*	-	Proporsi individu yang menggunakan internet	DISKOM-INFO	%	PM	PM	PM	PM
Target 17.11. Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara-negara berkembang, khususnya peningkatan bagian negara-negara kurang berkembang dalam ekspor global								
17.11.1 (a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Jumlah ekspor non migas	DISPER-INDAG	Juta US \$	5.261,66	5.482	5.811	6.159

[illegible]

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Daerah	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
					Baseline (2015)	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17.18.1 (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	BPS	%	PM	PM	PM	PM
17.18.1 (d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	BPS	%	PM	PM	PM	PM

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

RAD tidak berhenti hanya sampai pada tersusunnya arah kebijakan, indikator TPB/SDGs provinsi, dan rencana program aksi /kegiatan, tetapi juga perlu menggaransi bagaimana target pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi terwujud. Untuk itu diperlukan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang menjadi tahapan penting dari keseluruhan rangkaian kegiatan rencana aksi (renaksi) pelaksanaan TPB/SDGs tahun 2017-2018. Sebagai bagian integral dari siklus renaksi pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat provinsi, kegiatan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan perlu dilaksanakan oleh para pelaksana baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah.

Landasan Peraturan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi wajib dilaksanakan karena telah menjadi mandat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Secara nasional, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 Pasal 7 huruf b, kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB/SDGs dikordinasikan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PPN/Kepala BAPPENAS. Sementara, di tingkat provinsi, berdasarkan Peraturan Presiden yang sama pasal 17 angka (2) dinyatakan, Gubernur menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB/SDGs Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Khusus untuk unsur pemerintah, kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan wajib mengacu pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan bagi organisasi non pemerintah, kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporannya dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tersendiri.

Tujuan Pemantauan dan Evaluasi. Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

Diagram 4.1 Indikator TPB/SDGs Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Pilar Pembangunan



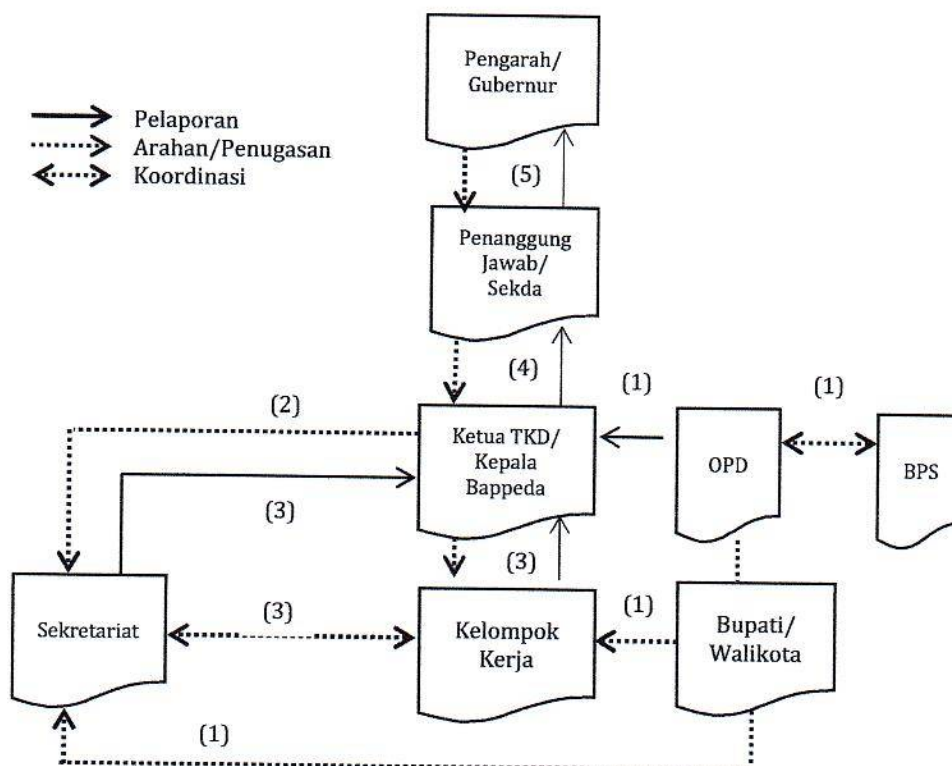
Lingkup Pemantauan dan Evaluasi. Secara nasional, TPB/SDGs mencakup 17 goals, 94 target/sasaran, dan 319 indikator. Berdasarkan indikator TPB/SDGs nasional itu, pemetaan di Jawa Tengah menunjukkan ada 233 indikator SDGs yang mempunyai disagregasi pada wilayah administrasi provinsi dan/atau kabupaten/kota. Keseluruhan jumlah indikator tersebar ke dalam pilar pembangunan sosial sebanyak 93, pilar pembangunan ekonomi sebesar 72, pilar pembangunan lingkungan sebanyak 40, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola sebanyak 20 indikator. Sebagian besar indikator sudah tercantum dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA dan Dokumen/Laporan Teknis lainnya) sekalipun ada pula yang belum tercantum.

4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

4.1.1. Mekanisme Pemantauan RAD

Alur pemantauan RAD dilakukan dengan mengikuti alur pembagian kewenangan dan tugas yang telah dinyatakan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 050/13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Mekanisme pemantauan pelaksanaan TPB/SDGs diatur mengikuti diagram 4.2 seperti berikut.

Gambar 4. 1. Alur Informasi Pemantauan untuk RAD



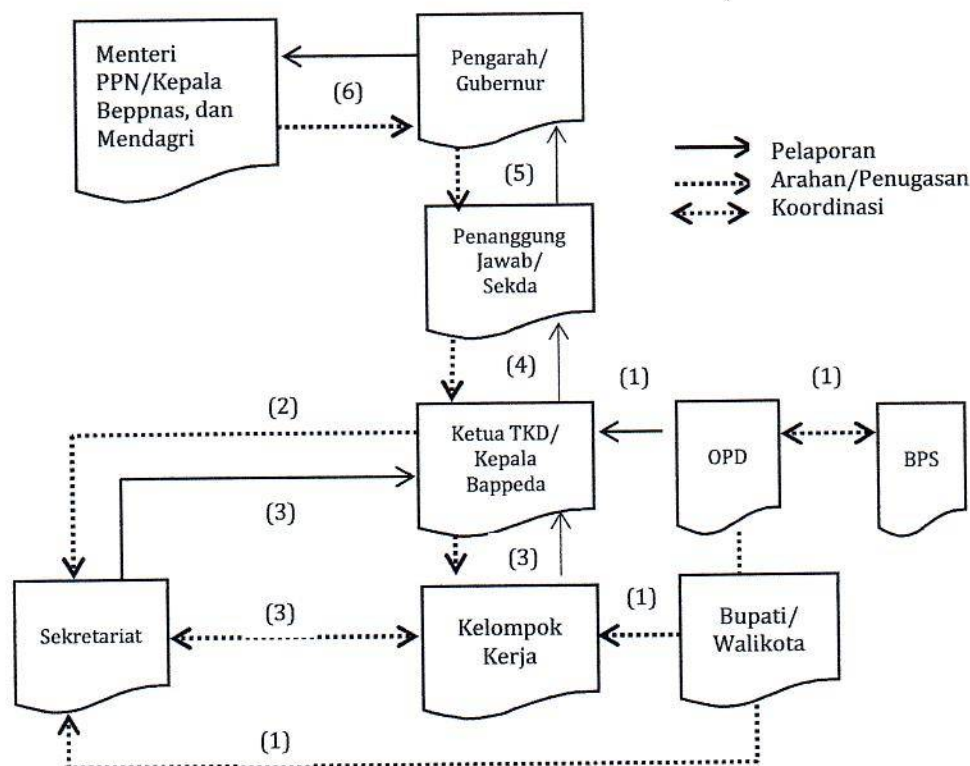
Alur pelaporan dalam pemantauan RAD (Gambar 4.2) mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: (1) OPD dan bupati/walikota menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs dengan menggunakan format standar kepada Ketua Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB/SDGs dalam hal ini Kepala BAPPEDA dengan memberi tembusan dan berkoordinasi dengan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja (Langkah-1). (2) Ketua TKD mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk mengkaji dan memvalidasi laporan kemajuan yang disampaikan OPD dan

bupati/walikota dibantu dan berkoordinasi dengan Sekretariat (Langkah-2). (3) Masing-masing Kelompok Kerja dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua TKD (Langkah-3). (4) Ketua TKD menyampaikan keseluruhan laporan kepada Sekretaris daerah selaku penanggungjawab TKD (Langkah-4). (5) Penanggungjawab menyampaikan hasil pemantauan kepada Gubernur untuk diberikan *feedback* (Langkah-5). (6) Gubernur melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat provinsi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri minimal sekali dalam setahun, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan (Langkah-6).

4.1.2. Mekanisme Evaluasi RAD

Sejalan dengan pemantauan, evaluasi RAD juga mengacu kepada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Evaluasi RAN dilakukan paling sedikit dua kali dalam periode 5 tahun sesuai dengan periode kaji ulang RPJMN (kaji ulang pertengahan dan akhir) atau sewaktu-waktu bila diperlukan dan ditujukan untuk menilai pencapaian seluruh indikator TPB/SDGS serta menganalisa upaya untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antara target dan realisasi dari indikator-indikator yang ada.

Gambar 4. 2. Alur Informasi Evaluasi untuk RAD



Alur pelaporan dalam evaluasi RAD mengikuti langkah-langkah (Gambar 4.3) sebagai berikut: (1) OPD dan Bupati/Walikota menyusun laporan evaluasi

pencapaian indikator TPB/SDGs dengan menggunakan format yang standar (dapat menggunakan data capaian Badan Pusat Statistik) untuk kemudian disampaikan kepada Ketua TKD TPB/SDGs dalam hal ini Kepala BAPPEDA dengan memberi tembusan dan berkoordinasi dengan Sekretariat dan Kelompok Kerja (Langkah 1). (2) Ketua TKD TPB/SDGs mengarahkan empat kelompok kerja (pokja) untuk mengkaji dan memvalidasi laporan evaluasi pencapaian yang disampaikan OPD untuk mengetahui status pencapaian setiap target dan indikator dengan dibantu sekretariat. Selain itu, pokja juga akan mengevaluasi keterpaduan pencapaian TPB/SDGs dengan pencapaian TPB yang tercantum dalam RPJMD (Langkah 2). (3) Masing-masing pokja dibantu sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua TKD (Langkah 3). (4) Ketua TKD melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari pokja kepada sekretaris daerah selaku penanggungjawab pelaksanaan TPB/SDGs untuk disampaikan kepada gubernur (Langkah 4). (5) Gubernur melaporkan laporan evaluasi TPB/SDGs Jawa tengah kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS (Langkah 5). (6) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri diharapkan dapat memberikan *feedback* untuk perbaikan pelaksanaan TPB/SDGs di Jawa Tengah (Langkah-6).

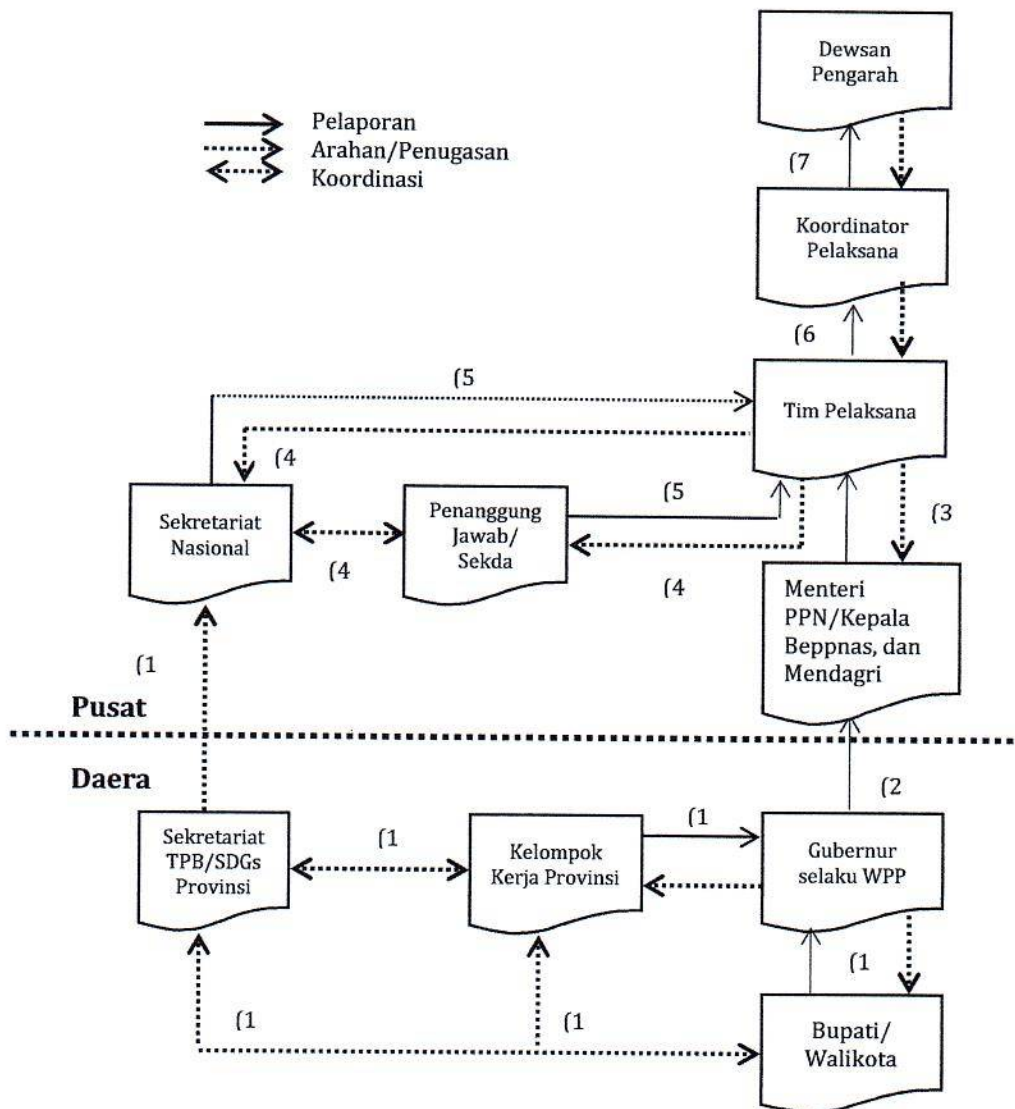
4.1.3. Mekanisme Pemantauan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Kewajiban menyusun RAD TPB/SDGs Pemerintah Provinsi, tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 pasal 15 ayat (1) yang secara eksplisit dinyatakan, untuk pencapaian sasaran TPB daerah, Gubernur berkewajiban menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya. Sementara, laporan pencapaian pelaksanaan target TPB/SDGs di daerah disampaikan Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga Mendagri sesuai pasal 17 ayat 2 Perpres 59/2017.

Proses pemantuan RAD di pemerintahan provinsi, diatur sedemikian rupa menjadi bagian dari proses pemantauan yang dikelola secara nasional. Untuk itu, mekanisme pemantauan RAD-nya pun akhirnya mengikuti 2 (dua) ruang, yakni: (1) ruang pemantauan yang dilakukan di pemerintah provinsi; dan (2) ruang pemantauan yang dilakukan pemerintah pusat atas dasar data pelaporan pemantauan yang dilakukan pemerintah provinsi.

Adapun mekanisme pemantauan RAD-nya dapat dilihat dalam gambar 4.5 sebagai berikut.

Gambar 4. 3. Alur Informasi untuk Pemantauan RAD TPB/SDGs



Alur pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti langkah-langkah (Gambar 4.4) sebagai berikut: (1) Pokja dengan dibantu sekretariat TPB/SDGs provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs di tingkat Provinsi (termasuk tingkat kabupaten/kota) yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu sekretariat TPB/SDGs melaporkan capaian RAD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (WPP) dan ditembuskan kepada sekretariat TPB/SDGs pusat (Langkah 1). (2) Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/BAPPENAS melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Langkah 2).

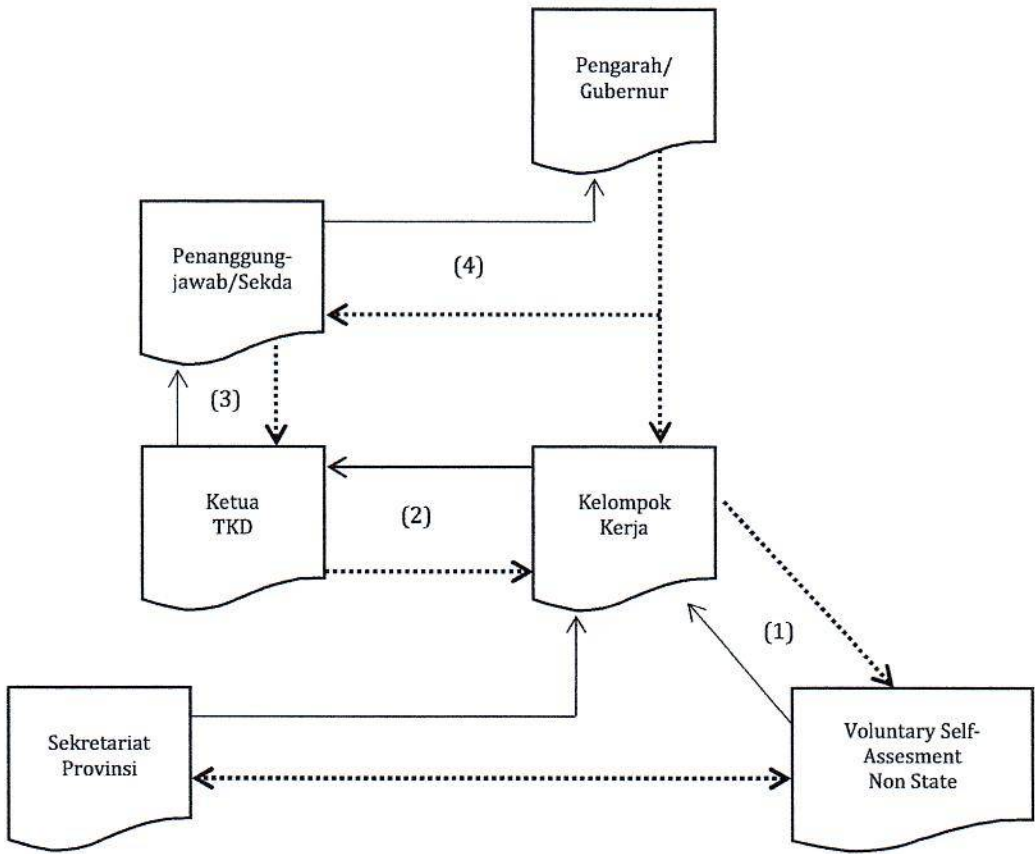
Kemudian sesampai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, (3) oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui ketua tim pelaksana yang dalam hal ini Deputi Bidang

Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS (Langkah 3). (4) Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh sekretariat TPB/SDGs (Langkah 4). (5) Masing-masing Kelompok Kerja Pusat yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 5). (6) Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Kelompok Kerja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (Langkah 6). (7) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam 1 tahun sekali sesuai pasal 17 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 (Langkah 7).

4.1.4. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renaksi Unsur Non Pemerintah

Pada prinsipnya, tata cara pemantauan dan evaluasi unsur nonpemerintah, berbeda dari mekanisme yang dilakukan pemerintah. Mengingat program/kegiatannya bersifat sukarela (*voluntary*), maka dari itu mekanisme pelaporannyapun bersifat sukarela. Tetapi sekalipun sukarela, sebaiknya sistem pelaporannya tetap harus akuntabel. Sistem pelaporan dapat dilakukan melalui mekanisme *penilaian diri sukarela (voluntary self-assessment)* dengan format pelaporan melalui *self-assessment tool (SAT)* yang disepakati.

Gambar 4. 4. Alur Informasi Monitoring Unsur Organisasi Non Pemerintah



Alur pelaporan dalam pemantauan unsur non pemerintah mengikuti langkah-langkah (Gambar 4.5) sebagai berikut: (1) Organisasi non pemerintah melakukan *voluntary self assessment* atas program/ kegiatan yang dilaksanakan

dengan menggunakan format *self-assessment tool*, lalu disampaikan kepada kelompok kerja masing-masing pilar terkait, dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan (Langkah 1). (2) Kelompok kerja dibantu Sekretariat TPB/SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua TKD (Langkah 2). (3) Ketua TKD kemudian menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah selaku penanggungjawab (Langkah 3). (4) Penanggungjawab melaporkan pencapaian atas pelaksanaan target TPB/SDGS kepada gubernur selaku 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan (Langkah 4).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui forum tim atau kelembagaan yang dibentuk secara *ad hoc* oleh TKD TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

4.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS 2017-2019

Jadwal waktu pemantauan dan evaluasi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 pasal 20 dan ketentuan periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi; serta Surat Keputusan Gubernur Nomor 050/13 Tahun 2018, sebagai berikut: 6 (enam) bulan sejak perpres diberlakukan, Rencana Aksi Nasional 2017-2019 harus dapat disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGS kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu 10 Januari 2018. Sementara Rencana Aksi Daerah harus sudah dilaporkan setelah satu tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 diundangkan. Dengan begitu, batas waktu penyerahan RAD TPB/SDGS provinsi adalah 10 Juli 2018. Perpres juga mengamanatkan, Peta Jalan TPB/SDGS 2017-2030 harus sudah terselesaikan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Presiden diundangkan.

Dengan periode pelaporan dan pemantauan enam bulanan maka pemantauan RAD TPB/SDGs Tahun 2017-2018 akan dilakukan pada Januari 2019, bersamaan dengan pemantauan/evaluasi tahunan RAN. Laporan pemantauan dari Gubernur disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri 15 (lima belas) hari setelah akhir bulan pelaksanaan pemantauan. Jadi sekitar 15 Februari 2019.

Gambar 4. 5. Diagram Jadwal Pelaporan dan Pemantauan TPB/SDGS Nasional dan Daerah



4.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Publikasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD, menjadi hal penting mengingat karakter dari TPB/SDGs adalah inklusif. Untuk itu, TKD TPB/SDGs Jawa Tengah dengan didukung Kantor BPS telah menyiapkan laman *One Touch SDGs (OTS)* yang akan terintegrasi dalam laman *bappeda.jatengprov.go.id* sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait hasil pemantauan, peraturan, kebijakan, kegiatan TPB/SDGS, dokumen dan informasi publik lainnya. Laman ini akan terus dikembangkan sesuai muatan yang akan dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan TPB/SDGs.***

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi atau kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan non pemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi dan *no one left behind* (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi bagi pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs Jawa Tengah. Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target masing-masing indikator saling berkait, dan/atau tidak akan terlepas dari upaya pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu tujuan/goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari tujuan/goal yang lainnya. Keterkaitan antartujuan tersebut menjadi penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik bagi kegiatan dan sejumlah aksi yang dilakukan pemerintah maupun non pemerintah.

Dalam melaksanakan RAD TPB/SDGs juga diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) perluasan penggunaan teknologi; (2) penguatan kerja sama multipihak; (3) penguatan koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; (5) pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

Perluasan Penggunaan Teknologi. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi non pemerintah. Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

Kemitraan Multipihak. Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat nasional, juga telah diterapkan di Jawa Tengah. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar pemerintah, filantropi dan pelaku usaha, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditematkannya masing-masing unsur dalam keanggotaan Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB/SDGs. Kemitraan ini memberi ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama-sama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Penguatan Koordinasi. Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi. BAPPEDA di tingkat provinsi mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB/SDGs.

Untuk aspek kerangka hukum, koordinasi koheren ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kerangka hukum ini mengatur tentang kelembagaan, strategi implementasi target dan indikator, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan TPB/SDGs serta hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi nonpemerintah. Untuk aspek kelembagaan, telah ditetapkan Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB/SDGs di tingkat provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 050/13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang melibatkan peran unsur pemerintah maupun organisasi nonpemerintah, serta wewenang, tugas, dan tata cara kerjanya. Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs Provinsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu Tim Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 050.2/6147 Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018.

Dalam aspek substansi program, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Organisasi Non Pemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam aspek pendanaan telah dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dana pemerintah (APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

Peningkatan Kapasitas. Untuk melaksanakan RAD TPB/SDGs diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik di lingkup Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, *workshop* serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.

Penghargaan Kepada Para Pihak. Penghargaan diberikan kepada OPD provinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, serta perguruan tinggi yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TPB/SDGs. Kriteria penilaian dan Tim Penilai akan dibentuk oleh TKD TPB/SDGs provinsi.

Strategi Komunikasi. Agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi.

Telah disusun dokumen model komunikasi TPB/SDGs yang dijabarkan lebih operasional.

Pemutakhiran Dokumen. Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji secara bersama antara pihak pemerintah dan non pemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH

Matriks Bagian 1 : Program dan Kegiatan Pemerintah Pilar Pembangunan Sosial

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Baseline (2015)	Target /Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016		2017		2018				
			T	R	T	R	T				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
TUJUAN 1. MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN											
1.2.1* Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan dan Kelompok Umur											
PROGRAM 1:Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan											
Pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat	Jumlah kelompok desa hutan (LMDH) yg meningkat kesejahteraannya	Kelompok	10	15	15	20	20	25	24.554.677.000	APBD	DLHK
PROGRAM 2: Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi											
Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih	Pengembangan SPAM Regional Jateng	Lokasi SPAM Regional	3	3	3	3	3	3	19.633.560.000	APBD	DPU BMCK
	Pendampingan manajemen teknis pengelola SPAM Perdesaan (Bintek BPSPAM)	Kab/Kota	35	19	19	35	35	17			
	Pendampingan manajemen teknis pengelola SPAM Perkotaan (PDAM)	Kab/Kota	35	35	35	35	35	35			
Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS	Pengelolaan program PAMSIMAS Tingkat Prov. Jateng, dengan tujuan program PAMSIMAS : meningkatkan jumlah warga (kurang terlayani, berpendapatan rendah, di wilayah perdesaan dan peri-urban) yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi	Kab/Kota	31	29	29	29	29	29	1.250.000.000	APBD	
INDIKATOR SDGs: 1.3.1. (b) Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.											
PROGRAM : Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan											
Pembinaan Syarat kerja dan Jamsos di dalam dan di luar hubungan kerja	Jumlah pelaku usaha/pengusaha yang mengikuti pembinaan syarat kerja di perusahaan outsourcing	Orang	210	210	210	95	80	100	428.496.000	APBD	DISNAKERTRANS
	jumlah pelaku usaha/pengusaha mengikuti bimtek PP/PKB	Orang	245	245	175	140	320	70			

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2015)	Target /Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016		2017		2018			
				T	R	T	R	T			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sialisasi kepersertaan jamsostek	Orang	0	0	0	0	0	35			
1.3.1(c) Persentase Penyandang Disabilitas											
PROGRAM 1:Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejateran Sosial (PMKS)											
Peningkatan kemampuan dan ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan KRSE di 35 Kab/Kota	KK	4.500	4.000	4.000	1.700	1.700	6.200	20.961.547.000	APBD	DINSOS
PROGRAM 2: Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial											
Pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat	Terlaksananya pelayanan sosial terhadap LU terlantar	orang	785	850	850	500	500	990	3.020.051.000	APBD	DINSOS
1.4.1 (a) Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
PROGRAM : Pelayanan Kesehatan											
Kegiatan koordinasi Pelayanan kesehatan ibu dan anak	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan			98,5		79	98	82			
1.4.1.(i)* Angka Partisipasi Murni SMA/MA/Sederajat											
PROGRAM 1: Pendidikan Menengah											
Kegiatan Pengelolaan SMK Boarding di Semarang	APM SMA/ SMALB/MA/ Paket C	%	60	62	62,21	64	64,02	66	11.583.000.000	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan Pengelolaan SMK Boarding di Pati									7.528.400.000	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan Pengelolaan SMK Boarding di Purbalingga									11.708.000.000	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan Bantuan Siswa Miskin (BSM)									10.000.000.000	APBD	DISDIKBUD
1.4.1 (b) Persentase Bayi (0-12 bln) yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap											
PROGRAM: Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
Kegiatan pencegahan dan pengendalian Penyakit menular	Persentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	%		91		92	94	93			
TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN											
2.1.2* Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan											

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Baseline (2015)	Target /Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016		2017		2018				
			T	R	T	R	T				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
PROGRAM: Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan											
Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA	Jumlah KWT Pekarangan yang difasilitasi dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan yang B2SA	Kelompok	105	110	112	115	115	120	4.812	APBD	DISHANPAN
Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok pengolah pangan alternatif yang difasilitasi dalam pengembangan pangan alternatif	kelompok	42	44	44	46	46	48	2.355	APBD	DISHANPAN
TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA											
INDIKATOR SDGs.....											
PROGRAM: Pelayanan Kesehatan											
Kegiatan koordinasi Pelayanan Gizi dan Masyarakat	Prevalensi gizi kurang pada anak balita (BB/U)	%			16	15,5	14	15,5			DINKES
	Cakupan ASI eksklusif	%	38,41		45,78	53		55			DINKES
	Prevalensi Gizi Buruk	%	120	0,05	0,03	0,04	0,03	0,04			DINKES
	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%		30		29	12,62	28			DINKES
INDIKATOR SDGs.....											
PROGRAM: Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit											
Kegiatan surveilens epidemiologi, penanganan KLB dan Bencana, Penyiapan Pelayanan Kesehatan haji dan imunisasi	Cakupan UCI desa	%	101,06	99	99,71	99	99,94	99			DINKES
Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Angka Kesakitan Malaria	%	85,71	0,07	0,03	0,06	0,03	0,06			DINKES
	Angka penemuan kasus baru kusta	%	81,54	7	5,5	5,5	5,6	6			DINKES

[illegible]

[illegible]

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2015)	Target /Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016		2017		2018			
				T	R	T	R	T			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
PROGRAM: P4GN											
Penelitian Prevalensi Penyalahguna narkoba	Hasil Prevalensi penyalahguna		1,94	-	-	-	1,16	-		APBN	BNN dan Puslitkes UI
INDIKATOR SDGs:											
PROGRAM: Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga											
Kegiatan Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	Anak	2,42	2,34	2,27	2,22	2,46	2,18	847.057.563.000	APBN	PERWAKILAN BKKBN PROV. JATENG
	Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	%	61,50	63,80	65,30	64.59 (mCPR)	60,60	58.64 (mCPR)			
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	%	9,60	9,40	9,96	9,31	11,71	9,30			
	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	%	25,70	25,80	16,40	25,87	14,20	26,37			
	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	%	29,3	27,3		25,30		23,30			
	Angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 th)	Orang	34	32	26	31	24	31			
	Median Usia Kawin Pertama Wanita	Tahun	20,40	20,50	20,00	20,60	20,00	20,70			
	Persentase pengetahuan keluarga tentang isu kependudukan	%	44,60	44,70	49,10	44,80	49,00	44,90			
	Persentase pengetahuan PUS tentang metoda alat kontrasepsi (semua alat/cara KB modern)	%	24,10	24,20	17,70	24,30	20,20	24,40			
TUJUAN 4. MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MEMPROMOSIKAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT											
1.4.1.(f)* Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/MA/Sederajat											
PROGRAM: Pendidikan Menengah											
Kegiatan Pengembangan Kelembagaan SMA									314.482.315.000	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMA									159.317.357.200	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMA									1.352.257.000	APBD	DISDIKBUD

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Baseline (2015)	Target / Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016		2017		2018			
			T	R	T	R	T			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kegiatan Pembinaan Kesiswaan SMA	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMALB/ MA/ SMK Paket C; - % Ruang kelas SMA/ MA/ SMK sesuai standar nasional pendidikan	74	76	76,42	78	78,01	80	13.979.548.000	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah								489.463.000	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan Penyelenggaraan BOS SMAN								421.260.000.000	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan Pengembangan Kelembagaan SMK								329.525.678.000	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK								195.769.622.800	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMK								1.371.209.000	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan Pembinaan Kesiswaan SMK								9.468.972.000	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Menengah								124.850.202.000	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan BOS Pendidikan Menengah (Pusat)								724.327.800.000	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan Penyelenggaraan BOS SMKN								338.027.800.000	APBD	DISDIKBUD

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Baseline (2015)	Target /Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016		2017		2018				
			T	R	T	R	T				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
PROGRAM: Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Dan Tenaga Kependidikan											
Kegiatan Peningkatan Komptensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan SMK	Persentase Pendidik SMA/ SMALB/ MA dan SMK bersertifikat pendidik	%	64	66	66,83	68	68,5	70	2.115.009.600	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan SMA									1.319.850.400	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik SMA									997.600.000	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan Penghargaan, Perlindungan dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA									2.704.175.600	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA									851.825.000	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan Penghargaan, Perlindungan dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK									2.274.796.400	APBD	DISDIKBUD
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK									557.156.000	APBD	DISDIKBUD
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETERAAN GENDER DAN MEMPERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN											
5.1.1* Rasio Kabupaten/Kota yang Menerapkan Kebijakan Responisf Gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rentra											
PROGRAM: Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak											
Kegiatan Peningkatan Pemahaman tentang Pengarusutamaan Hak Anak pada Seluruh Pengambil Kebijakan	Jumlah Pengambil Kebijakan di SKPD Provinsi yang mendapatkan pelatihan tentang SPA	Orang	30	-	-	-	-	-	334.711.000	APBD	DPPPA DALDUK KB

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2015)	Target /Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016		2017		2018			
				T	R	T	R	T			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Eksekutif, Legislatif dan Stakeholders	Jumlah Pengambil Kebijakan di SKPD Kabupaten/ Kota yang mendapatkan pelatihan tentang SPA	Orang	35	-	-	-	-	-			
	Jumlah Kabupaten mengimplementasikan SBA	Kab/Kota	2	-	-	-	-	-			
	jumlah pengambil kebijakan berpartisipasi dalam Koordinasi PUHA	Orang	60	-	-	-	-	-			
	Jumlah kab/kota yang terdvdokasi upaya pencegahan pekerja anak	Kab/Kota	2	-	-	-	-	-			
	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan ASIA	Kab/Kota	2	-	-	-	-	-			
	Jumlah modul panduan penyelenggaraan Desa/Kelurahan Ramah Anak;	modul	1	1	1	-	-	-			
	dokumen evaluasi pelaksanaan PUHA di Jawa Tengah	dokumen	1	1	1	-	-	-			
	Kabupaten/Kota menginisiasi pelibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan	Kab/Kota	2	2	2	-	-	-			
	Kabupaten/kota yang mendapatkan penguatan jaringan perlindungan anak desa/kelurahan	Kab/Kota	2	2	2	-	-	-			
	kegiatan pelaksanaan rangkaian HAN tingkat provinsi	Kegiatan	1	1	1	-	-	-			
	Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi ujicoba modul peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak.	Kab/Kota	2	-	-	2	2	-			
	Kabupaten/Kota yang diinisiasi pelibatan anak dalam proses pembangunan	kab/kota	2	-	-	2	2				

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2015)	Target /Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016		2017		2018			
				T	R	T	R	T			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Jumlah stakeholder di tingkat Kab/Kota yang terkoordinasi peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak	orang	35	-	-	-	-	35			
	Dialog/Deklarasi anak dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi	Kegiatan	1	-	-	-	-	1			
Kegiatan Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota	perencana SKPD Provinsi yang mampu melakukan PPRG dengan melalui PROBA	Orang	70	-	-	-	-	-	1.270.205.000	APBD	DPPPA DALDUK KB
	orang Tim Teknis PPRG Kabupaten/Kota yang memahami PROBA	kab/kota	35	-	-	-	-	-			DPPPA DALDUK KB
	kali Frekuensi Koordinasi PUG Provinsi dan kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Frekuensi	2	-	-	-	-	-			DPPPA DALDUK KB
	Jenis data dan informasi tentang pelaksanaan PUG di 59 SKPD Provinsi;	SKPD	59	-	-	-	-	-			DPPPA DALDUK KB
	orang FPG yang memahami PUG	Orang	60	-	-	-	-	-			DPPPA DALDUK KB
	Dokumen Evaluasi PUG Provinsi/Kabupaten/Kota tingkat Nasional	Dokumen	60	-	-	-	-	-			DPPPA DALDUK KB
	kali Koordinasi PUG Kab/Kota yang dilaksanakan	Kab/Kota	1	-	-	-	-	-			DPPPA DALDUK KB
	orang pengelolaan Program SKPD Kab/Kota yang menjadi peserta fasilitasi GAP	orang	45	-	-	-	-	-			DPPPA DALDUK KB
	orang pengelola Program SKPD Kab/Kota yang menjadi peserta pelatihan PROBA	orang	30	-	-	-	-	-			DPPPA DALDUK KB
	Kabupaten/Kota yang difasilitasi mengimplementasikan PPRG;	kab/kota	5	-	-	-	-	-			DPPPA DALDUK KB

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Baseline (2015)	Target /Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016		2017		2018			
			T	R	T	R	T			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Jumlah data dan informasi PUG di kabupaten/Kota	kab/kota	5	-	-	-	-	-		DPPPA DALDUK KB
	orang peserta SKPD Provinsi yang mengikuti kegiatan	orang	-	70	70	-	-	-		DPPPA DALDUK KB
	Kabupaten/Kota yang mengikuti kegiatan	Kab/Kota	-	35	35	-	-	-		DPPPA DALDUK KB
	orang perencana SKPD Provinsi yang mampu melakukan PPRG dengan melalui PROBA	orang	-	30	30	-	-	-		DPPPA DALDUK KB
	orang Tim teknis PPRG Kabupaten/Kota yang memahami PROBA;	Orang	-	35	35	-	-	-		DPPPA DALDUK KB
	Kabupaten/Kota yang menjadi peserta fasilitasi GAP	Kab/Kota	-	3	3	3	3			DPPPA DALDUK KB
	Kabupaten/Kota yang mengikuti evaluasi PUG tingkat nasional	Kab/Kota	-	35	35	-	-	-		DPPPA DALDUK KB
	Kabupaten/Kota yang didampingi dalam penyusunan PPRG	Kab/Kota	-	6	6	-	-	-		DPPPA DALDUK KB
	Kabupaten/Kota yang mengikuti evaluasi PUG tingkat nasional	Kab/Kota	-	35	35	-	-	-		DPPPA DALDUK KB
	Kabupaten/Kota yang didampingi dalam penyusunan PPRG	Kab/Kota	-	6	6	-	-	-		DPPPA DALDUK KB
	kali Frekuensi Koordinasi PUG Provinsi yang dilaksanakan	Kab/Kota	-	-	-	1	1	-		DPPPA DALDUK KB
	orang fasilitator PUG Provinsi yang terlatih	Orang	-	-	-	20	20	-		DPPPA DALDUK KB
	orang fasilitator PUG kab/kota yang terlatih	Orang	-	-	-	35	35	-		DPPPA DALDUK KB
	orang perencana SKPD Kabupaten/kota yang mampu melakukan PPRG melalui sistem PROBA	Orang	-	-	-	35	35	-		DPPPA DALDUK KB
	orang perencana SKPD provinsi yang mampu melakukan PPRG melalui sistem PROBA	Orang	-	-	-	35	35	-		DPPPA DALDUK KB

[illegible]

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2015)	Target /Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016		2017		2018			
				T	R	T	R	T			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kabupaten/Kota dilatih perencanaan responsif anak	Kab/Kota		6	6						DPPPA DALDUK KB
	Kabupaten/ Kota memahami Penganggaran Responsive Anak	Kab/Kota				3	3				DPPPA DALDUK KB
	Jumlah Panduan Penyusunan penganggaran responsif anak	Dokumen						1			DPPPA DALDUK KB
	Koordinasi Implementasi Penganggaran Responsif Anak.	Kegiatan						1			DPPPA DALDUK KB
Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender	jumlah dokumen modul pembangunan kualitas keluarga yang responsif gender yang direvisi	Dokumen	-	-	-	-	-	1		APBD	DPPPA DALDUK KB
	jumlah fasilitator yang dilatih mengenai Kualitas Keluarga yang responsif gender	Orang	-	-	-	-	-	35			DPPPA DALDUK KB
	Kabupaten/Kota yang mengikuti evaluasi PUG tingkat nasional	Kab/Kota	-	35	35	-	-	-			DPPPA DALDUK KB
	Kabupaten/Kota yang didampingi dalam penyusunan PPRG	Kab/Kota	-	6	6	-	-	-			DPPPA DALDUK KB
	Kabupaten/Kota yang mengikuti evaluasi PUG tingkat nasional	Kab/Kota	-	35	35	-	-	-			DPPPA DALDUK KB
	Kabupaten/Kota yang didampingi dalam penyusunan PPRG	Kab/Kota	-	6	6	-	-	-			DPPPA DALDUK KB
	kali Frekuensi Koordinasi PUG Provinsi yang dilaksanakan;	Frekuensi	-	-	-	1	1	-			DPPPA DALDUK KB
	orang fasilitator PUG Provinsi yang terlatih	Orang	-	-	-	20	20	-			DPPPA DALDUK KB
	orang fasilitator PUG kab/kota yang terlatih	Orang	-	-	-	35	35	-			DPPPA DALDUK KB
	orang perencana SKPD kab/kota yang mampu melakukan PPRG melalui sistem PROBA	Orang	-	-	-	35	35	-			DPPPA DALDUK KB

[illegible]

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2015)	Target /Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016		2017		2018			
				T	R	T	R	T			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kab./Kota dilatih perencanaan responsif anak	Kab/Kota	3								DPPPA DALDUK KB
	Kab/Kota dilatih perencanaan responsif anak	Kab/Kota		6	6						DPPPA DALDUK KB
	Kab/ Kota memahami Penganggaran Responsive Anak	Kab/Kota			3	3					DPPPA DALDUK KB
	Jumlah Panduan Penyusunan penganggaran responsif anak	Dokumen						1			DPPPA DALDUK KB
	Koordinasi Implementasi Penganggaran Responsif Anak.	Kegiatan						1			DPPPA DALDUK KB
Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender	jumlah dokumen modul pembangunan kualitas keluarga yang responsif gender yang direvisi	Dokumen	-	-	-	-	-	1		APBD	DPPPA DALDUK KB
	jumlah fasilitator yang dilatih mengenai Kualitas Keluarga yang responsif gender	Orang	-	-	-	-	-	35			DPPPA DALDUK KB

5.2.1* Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan

[illegible]

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2015)	Target /Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016		2017		2018			
				T	R	T	R	T			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Lembaga-Lembaga Pengambil Keputusan	Jumlah kader perempuan politik provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilatih;	Orang	100	-	-	-	-	-	7.672.615.000	APBD	DPPA DALDUK KB
	Jumlah perempuan yang diadvokasi tentang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan	Orang	70	-	-	-	-	-			
	Jumlah kebijakan politik responsif gender	Kebijakan	1	-	-	-	-	-			
	Jumlah calon pemilih perempuan	Orang	1000	-	-	-	-	-			
	Jumlah perempuan yang dilatih pendidikan politik perempuan;	-	-	1000	1000	-	-	-			
	Jumlah kader organisasi perempuan yang di advokasi tentang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan	-	-	20	20	-	-	-			
	Jumlah perempuan kader organisasi politik memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan;	-	-	-	-	100	100	-			
	Jumlah perempuan yang dilatih memiliki kapasitas memadai dan ketertarikan sebagai kader politik	-	-	-	-	1000	1000	-			
	Jumlah orang kader organisasi prp yg terlatih dalam menakar kepemimpinan perempuan	-	-	-	-	30	30	-			
	Jumlah peserta advokasi pengambil keputusan dalam kesetaraan gender	-	-	-	-	30	30	-			
	Jumlah Perempuan Kelompok Kerja Pendukung Advokasi Perempuan	-	-	-	-	20	20	-			

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Baseline (2015)	Target /Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016		2017		2018			
			T	R	T	R	T			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Jumlah Perempuan kader organisasi politik yang memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan	-	-	-	-	-	70			
	Jumlah perempuan yang dilatih memiliki kapasitas memadai dan ketertarikan sebagai kader partai politik	-	-	-	-	-	17400			
	Jumlah kader organisasi perempuan yang terlatih dalam menakar kepemimpinan perempuan	-	-	-	-	-	25			
	Jumlah peserta advokasi pengambil keputusan dalam kesetaraan gender	-	-	-	-	-	25			

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2015)	Target /Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016		2017		2018			
				T	R	T	R	T			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penetapan Upah Minimum	Jumlah peserta sosialisasi memahami tentang Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Orang	80	100	100	100	100	100	2.528.222.000	APBD	DISNAKERTRANS
	Jumlah Sidang Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Kali	50	125	125	125	125	5			
	Jumlah peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Pengupahan	Orang	145	140	140	110	110	110			
	Jumlah perusahaan yag dilakukan Survei Identifikasi Struktur dan Skala Upah di perusahaan	Perusahaan	390	700	700	0	0	480			
	Jumlah peserta sosialisasi sistem penerapan pengupahan Penyusunan Struktur dan Skala Upah	Orang						270			
	Jumlah peserta pertemuan yang melakukan Koordinasi dan Konsolidasi Masalah Pengupahan	Orang	350	350	350	350	350	200			
	Jumlah sidang pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Kali	400	400	400	400	400	12			
Forum koordinasi LKS Tripartite	Anggota LKS Tripartit Kab/Kota dan Provinsi dapat memahami tugas, fungsi dan peranan LKS Tripartit (Forum)	Orang		140	0	31	31	132	1.297.464.500	APBD	
	Pemberdayaan LKS Tripartit	Orang		31	31	0	0	0			
	Anggota LKS Tripartit yang dibina kinerjanya lebih memahami tentang Peraturan Perundangan di Bidang Ketenagakerjaan (Kinerja)	Orang		105	35	280	280	100			
8.3.2. Jumlah Penduduk Miskin											
PROGRAM 1: Peningkatan Kualitas dan Produktivitas											
Pelatihan dan Pemagangan dalam dan Luar Negeri	Jumlah Pencari Kerja Mengikuti Pelatihan dan Dalam Negeri	Orang	356					90			

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2015)	Target /Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016		2017		2018			
				T	R	T	R	T			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Jumlah Pencari Kerja mengikuti rekrutmen dan seleksi magang ke Jepang	Orang	100					1.600		APBD	DISNAKERTRANS
Kegiatan Uji Kompetensi, Identifikasi, Data Pilah Responsif Gender yang Tersertifikasi dan Data Base Standarisasi dan Sertifikasi	Jumlah Instruktur Tenaga Kerja yang mengikuti Uji Kompetensi dan Sertifikasi Instruktur dan Tenaga Kerja	Orang	40	60	60	70	70	75	678001650		
	Mengidentifikasi perbedaan tingkat kompetensi yang dimiliki tenaga kerja perempuan dan laki-laki bekerja	Perusahaan/BLK	4	2	2	4	2				
	Data Base di Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas	dokumen	1	1	1	1	1	1			
Pelatihan bagi calon tenaga kerja berbasis kompetensi di bidang industri	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasi kompetensi di bidang industri	Orang	97	180	180	120	192	160	750.000.000	APBD	
Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi DBHCHT di BLKI Cilacap	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasi kompetensi di bidang industri	Orang	160	200	200	220	220	300	1.500.000.000	APBD	
Kegiatan Pelatihan Kerja bagi CTKI LN	Jumlah peserta Pra Calon Magang Jepang yang terbekali pengetahuan, bahasa, etos kerja	Orang	150	80	58	260	260	100			
	Jumlah peserta Calon Magang Jepang yang terbekali pengetahuan, bahasa, etos kerja, ketrampilan dan budaya	Orang						100			
	Jumlah Calon Tenaga Guide Sektor Pariwisata yang terbekali pengetahuannya	Orang						50			
Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah aparatur pembina produktivitas, duia usaha, lembaga	Orang	150		120		30	35	810.000.000	APBD	
	Jumlah SDM produktivitas mengikuti peningkatan teknis dan metode peningkatan produktivitas	Orang	40		30		40	40			
	Jumlah pimpinan perusahaan mengimplementasikan produktivitas di tempat kerja	Orang	40		150		75	25			
Pelatihan, pengukuran dan pemeliharaan produktivitas	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan TQC	Orang	80		80		30	40	1.838.832.716	APBD	
	Jumlah Perusahaan yang diukur tingkat produktivitas tenaga kerjanya	Perusahaan/BLK	2		2		1	1			
	Jumlah UKM yang menerapkan score Modul I	UKM					5	5			

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2015)	Target /Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016		2017		2018			
				T	R	T	R	T			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	7.4 Indikator Output : Jumlah GKM yang mengikuti konversi GKM	GKM					30	30			
PROGRAM 2: Peningkatan Kesempatan Kerja											
Pelayanan Penempatan, Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Massyarakat yang mendapat informasi tentang peluang, mekanisme dan peluang kerja	Orang	2600	4000	210	95	80	11800	6.711.113.000	APBD	DISNAKERTRANS
	Jumlah CTKI yang mendapatkan pembekalan	Orang	1350	400	175	140	320	200			
	Jumlah kerjasama dan sinkronisasi pelayanan penempatan dengan wilayah di luar jawa	Provinsi		0	0	0	0	4			
	Jumlah peserta rapat koordinasi pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) TKI	Orang						360			
	Jumlah stakeholder yang mengikuti rakor dalam rangka sinergitas pelayanan, penenpatan dan perlindungan TKI	Orang	70	150				150			
	Jumlah stakeholder yang bersinergi dalam pelayanan serta fasilitasi penempatan dan perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas	Orang						80			
	Jumlah pengelola cabang PPTKIS dalam pelayanan penempatan TKI keluar negeri	Orang						200			
	Jumlah aplikasi pelaporan PPTKIS/cabang PPTKIS yang dapat diakses secara online	Paket						1			
	Jumlah Informasi tentang prosedur dan peluang kerja serta penempatan kerja yang dapat di akses masyarkat Jawa Tengah melalui media cetak dan elektronik	Paket						1			
Peningkatan Penempatan melalui mekanisme AKAD	Jumlah calon tenaga kerja AKAD yang siap mental dan spritual yang akan bekerja ke luar daerah	Orang	550	400	150	500		125	533.401.000	APBD	DISNAKERTRANS
	Jumlah peluang kerja sektor formal di luar provinsi	Provinsi	2	2	2	2		2			
	Jumlah data identifikasi tenaga kerja AKL dan AKAD	Lokasi	35	27	27	34		15			

Matriks Bagian 1 : Program dan Kegiatan Pemerintah Pilar Pembangunan Lingkungan

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Baseline (2015)	Target /Realisasi						Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2016		2017		2018				
			T	R	T	R	T				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA											
6.1.1.(b) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Baku											
PROGRAM: Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku											
Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku	Jumlah Prasarana dan Sarana Air Baku yang diperbaiki atau dibangun	Embung	6	23	25	36	36	31	189.919.903,000	APBD	Dinas PU SDA TARU
6.4.1.(a) Pengendalian dan Penegakan Hukum Bagi Penggunaan Air Tanah											
PROGRAM: Pengembangan Pertambangan Dan Air Tanah											
Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Air Tanah di Jawa Tengah	Jumlah obyek pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah	Obyek sumur	500	400	473	500	550	600	1.836.475.000	APBD	Dinas ESDM
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan/Rekomendasi Air Tanah	Jumlah kajian teknis terhadap permohonan ijin air tanah	Kajian	998	500	1.373	450	643	558	21.345.000.000	APBD	Dinas ESDM
6.5.1 (e) Luas Pengembangan hutan serta Peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk Pemulihan Kawasan DAS											
PROGRAM 1: Rehabilitasi Hutan dan Lahan											
Pengembangan usaha hutan rakyat dan aneka usaha kehutanan	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan	Ha	13.225	13.295	13.305	13.320	13.325	134.370	11.179.280.000	APBD	DLHK
Bantuan bibit, perbenihan dan pengembangan budidaya tanaman kehutanan	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	DAS	11	8	8	6	6	6	23.027.200.000	APBD	DLHK
PROGRAM 2: Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam											
Kegiatan Pembangunan Sumur Pantau Air Tanah di Jawa Tengah	Jumlah pembangunan sumur pantau	Unit	6	5	5	5	5	7	491.536.000.000	APBD	Dinas ESDM
Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan Dalam di Jawa Tengah.	Jumlah sumur resapan dalam yang dibangun	Unit	10	3	3	4	4	6	1.535.000.000	APBD	Dinas ESDM
TUJUAN 11. MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN											
11.1.1 (a) Rasio Rumah Layak Huni											
PROGRAM: Pembangunan Perumahan											
Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya Menuju Layak Huni	Jumlah rumah yang ditangani	Unit	-	10.000	3.601	20.000	19.591	25.677	492.780	APBD	DISPERAKIM
Peningkatan Kualitas Menuju Rumah Sehat dan Berwawasan Lingkungan	Jumlah rumah sehat yang tertangani dan pembangunan baru rumah sehat dalam satu kawasan	Unit	-	-	-	-	-	245	1.500.000.000	APBD	
Kegiatan Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terkena Dampak Bencana dan Relokasi Program Pemerintah beserta PSUnya	Jumlah rumah terkena dampak bencana yang tertangani	Unit	-	-	-	-	-	300	1.900.000.000	APBD	
Kegiatan Penyediaan Rumah Susun, Rumah Khusus dan PSUnya	Jumlah unit rumah yang dibangun	Unit Rusun/ Rusus	-	-	-	-	-	-	-		
11.6.1 (a) Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani											
PROGRAM: Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan											
Koordinasi Peningkatan pengelolaan Kualitas Lingkungan Perkotaan di Kabupaten/Kota Dalam rangka Adipura	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Ton/Ha	1.250.497	1.434.033	1.434.033	Belum	Belum	Masih proses	1.800.000.000	APBD	

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Baseline (2015)	Target /Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2016		2017		2018			
				T (4)	R (5)	T (6)	R (7)	T (8)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau atau daerah industri hasil tembakau		Orang	60	60	60	60	60	Masih proses	3.400.000.000	APBD	DLHK
Koordinasi Peningkatan pengelolaan Kualitas Lingkungan Perkotaan di Kabupaten/Kota Dalam rangka Adipura	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Kabupaten/Kota	35	35	35	35	35	Masih proses	1.800.000.000	APBD	
TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN											
12.4.1 (a) Jumlah peserta PROPER yang Mencapai Minimal Ranking BIRU											
PROGRAM: Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan											
Pengelolaan Kualitas air dan penetapan kelas air sungai untuk memenuhi kebutuhan standar minimal bidang LH bagi masyarakat	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Usaha/kegiatan	200	206	206	160	160	188	1.870.137.000	APBD	DLHK
Perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 pada usaha/kegiatan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton	-	-	-	-	-	-	1.346.436.000	APBD	
Koordinasi Peningkatan pengelolaan Kualitas Lingkungan Perkotaan di Kabupaten/Kota Dalam rangka Adipura	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Ton	5.393.792	5.565.804	5.565.804	Belum ada	Belum ada	Masih proses	1.800.000.000	APBD	
Pelatihan Ekofisiensi dan Produksi Ramah Lingkungan	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	200	206	206	160	160	188	1.021.676.000	APBD	
TUJUAN 13. MENGATASI LANGKAH SEGERA UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA											
13.2.1 (a) Tersusunnya Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)											
PROGRAM: Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam											
Penanganan Mitigasi, adaptasi dan Pencegahan Pencemaran serta kerusakan lingkungan akibat Bencana/Gangguan Lingkungan dan Pemanasan Global	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	RAD GRK,SIGN SMART	1	1	1	1	1	Masih proses	4.858.844.000	APBD	DLHK

MATRIKS BAGIAN 1 : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Baseline (2015)	Target /Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016		2017		2018				
			T	R	T	R	T				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
TUJUAN 16: PERDAMIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KOKOH											
16.6.1 (a) Laporan Keuangan Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)											
PROGRAM: Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah											
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Reviu LKPD	Objek Pemeriksaan (Obrik)		1	1	1	1	1	28.706.212.000	APBD	INSPEKTORAT
	Pemeriksaan Kab/Kota	Kab/Kota		21	21	15	15	9			
	Pemeriksaan OPD Provinsi	OPD		39	39	38	38	34			
16.6.1.(c) Presentase Penggunaan E Procurement Terhadap Belanja Pengadaan											
PROGRAM: Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi											
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan LPSE dalam pengadaan barang dan jasa	%	59 SKPD	100	100	100	100	-		APBD	DISKOMINFO
	Persentase SKPD yang mengembangkan teknologi dan informasi	%	35	100	100	100	100	-			
	Persentase SKPD yang sudah meng-up date data di websitenya hingga tahun n-1	%	90	100	100	100	100	-		APBD	DISKOMINFO
16.10.1 (a) Jumlah Seluruh Penanganan Pengaduan Pelanggaran HAM dalam Kurun Waktu 12 Bulan Terakhir											
PROGRAM: Penataan Peraturan Perundang-undangan											
Kegiatan peningkatan pemenuhan aksi HAM dan Aksi PPK	Jumlah Penanganan aduan masyarakat	Aduan masyarakat	6	10	5	10	3	10	18.000.000		BIRO HUKUM
16.10.2* Jumlah Laporan Akses Informasi											
PROGRAM: Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi											
Pengelolaan Layanan Sistem Informasi	Terkelolanya, terfasilitasinya dan terlaksananya pengelolaan baranga dan jasa	%		100	100	100	100			APBD	DISKOMINFO
	Pengembangan aplikasi PPID	%	49 SKPD, 12 BUMD	100	100	100	100			APBD	
	Pengembangan Website PPID Utama	%	49 SKPD, 12 BUMD	100	100	100	100			APBD	
	Open Data Jawa Tengah	%	59 SKPD, 35 Kab/Kota	100	100	100	100			APBD	
16.10.2 (b) Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi											
PROGRAM: Penataan Peraturan Perundang-undangan											
Kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum dan sengketa hukum	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	Perkara	120	180	180	180	180		117.000.000	APBD	BIRO HUKUM

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH

MATRIKS BAGIAN 2 : PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target / Realisasi						Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Lembaga Pelaksana
			2016		2017		2018				
			T	R	T	R	T				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
TUJUAN 1: MENGAKIRI BENTUK KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN											
1.2.1* Persentase penduduk yg hidup di bawah garis kemiskinan dan kelompok umur											
PROGRAM : Penurunan Kemiskinan dengan Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Advokasi dan Audit Sosial											
Pelatihan ARG untuk kelompok perempuan	Kelompok perempuan dan CSO dapat melakukan advokasi anggaran responsif gender (ARG)	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	20	60.000.000	Kegiatan didanai oleh Pattiro Semarang	Pattiro Semarang
Pengawasan layanan kesehatan dan pendidikan melalui audit sosial	Kelompok perempuan dan CSO terfasilitasi dengan pengelolaan pengaduan dan audit sosial di sektor pendidikan dan kesehatan	Orang	NA	NA	NA	NA	NA	10	45.000.000	Kegiatan didanai oleh Pattiro Semarang	Pattiro Semarang
PROGRAM: Bedah Rumah											
Pembangunan rumah layak huni	Jumlah KK yg mendapatkan bantuan bedah rumah	KK	Dari tahun 2015-2017 kurang lebih ada 1000 unit RTLH mendapatkan bantuan						3.586.000.000	NON PEMERINTAH	Bank Jateng
Pembangunan rumah layak huni	Jumlah KK yg mendapatkan bantuan bedah rumah	KK	75	75	65	75	70	75	14.400.000.000	NON PEMERINTAH	LAZIZ
PROGRAM: Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia											
Peningkatan kursi roda bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia	Jumlah penyandang disabilitas dan lanjut usia mendapatkan bantuan kursi roda standart	Orang							70.000.000	NON PEMERINTAH	BAZNAS Jateng
TUJUAN 3 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA											
3.7.1. (a) CPR/ Peserta KB Aktif											
PROGRAM 1: KB											
Layanan klinik	Jumlah akseptor KB	Orang	853	730	854	852	787	852		PKBI Jateng	PKBI Jateng
3.7.2. (b) Angka Penggunaan Metode KontrasepsiJangka Panjang (MKJP) cara Modern											
PROGRAM 1:											
Layanan klinik	Jumlah akseptor MKJP	Orang	797	650	740	770	650	770		PKBI Jateng	PKBI Jateng
TUJUAN 4: MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MEMPROMOSIKAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT											
4.4.1* Proporsi Remaja dan Dewasa dengan Ketrampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)											
PROGRAM 1: Pengembangan Kapasitas Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)											
Pengembangan Kapasitas Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		Kwartir Cabang	35	35	35	35	35	35	175.000.000	Dana Hibah Provinsi	Kwarda Pramuka
PROGRAM 2: Peningkatan Ketrampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi											
Menambah kemampuan dan ketrampilan anggota pramuka di bidang teknologi informasi dan ketrampilan		Orang	70	70	70	105	95	140	150.000.000	Dana Hibah Provinsi	Kwarda Pramuka
5.2.1 (a) Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak											
PROGRAM 1 : Perempuan Miskin Korban Kekerasan Mudah Mengakses Layanan yang berkualitas, komperhensif dan berkelanjutan											
Memperkuat kerja-kerja pendampingan hukum yang berkeadilan gender	Jumlah Pendampingan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak perempuan.	Kasus	73	90	97	100	77	119	1.166.400.000	NON PEMERINTAH (MAMPU dan OHCHR)	LRC-KJHAM
	Jumlah Perempuan Korban kekerasan Yang berdaya dan menjadi penyintas	orang	NA	NA	NA	16	3	NA	6.750.000	NON PEMERINTAH (MAMPU dan OHCHR)	LRC-KJHAM

MATRIKS BAGIAN 2 : PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Matriks Bagian 2 : PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL											
		Satuan	Tahun Dasar	Target / Realisasi					Indikator Alokasi	Sumber Pendanaan	
PROGRAM 2: Pemerintah dan Parlemen di Tingkat Nasional dan Daerah Melahirkan Kebijakan Terkait Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Penguatan Mekanisme HAM Perempuan											
Advokasi Kebijakan Pemrintah Daerah Yang Responsif Gender	Jumlah kebijakan yang telah disahkan	Dokumen	1	8	3	8	2	5	416.400.000	NON PEMERINTAH (HIVOS, MAMPU, KJHAM)	LRC-KJHAM
INDIKATOR SDGs: 5.6.1. (b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Metode Kontrasepsi Modern											
PROGRAM 1:											
Layanan klinik (konseling KB)	Jumlah klien yang mendapat layanan konseling KB.	Orang	850	650	678	700	594	700		PKBI Jateng	PKBI Jateng

MATRIKS BAGIAN 2 : PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target / Realisasi						Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Lembaga Pelaksana
			2016		2017		2018				
			T	R	T	R	T				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
TUJUAN 7: MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU HANDAL, BERKELANJUTAN MODERN UNTUK SEMUA											
7.1.1* Rasio Elektrifikasi											
PROGRAM: Program Listrik Hemat dan Murah											
Kegiatan Pengembangan Listrik Murah dan Hemat	Jumlah bantuan sambungan listrik	KK sambungan rumah			26	26		49.000.000	PT Sewu Surya Sejati, PT Alexia Perdana Mineral, PT Cahaya Indah Madya Pratama, CV Selo Putro, PT Arena Agro Andalan dan PT Nesia Pan Pacific Clothing (Wonogiri)		
Kgiatan Pembangunan PLTS Karimunjawa	Jumlah sambungan	KK sambungan rumah					645	16.000.000.000	Donor	DANIDA Denmarak	
TUJUAN 8: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YG PRODUKTIF & MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA											
8.3.1. (a) Presentase Tenaga Kerja Formal											
PROGRAM 1: Pendidikan Pelatihan Ketenagakerjaan											
Advokasi hukum ketenagakerjaan	Terbentuknya kader-kader bantuan hukum ketenagakerjaan	Orang	20	20	5	20	7	25	200.000.000	APBN	SPSI kerjasama dengan KEMENAKER RI
PROGRAM 2: Pendidikan Politik											
Sosialisasi pilkada anggota SBSI	Meningkatkan partisip	Orang	-	-	-	50	50	50	60.000.000	APBN	SBSI
PROGRAM: Pembentukan LSP											
Penambahan dan Pelatihan Asesor Sektor Pelabuhan dan Pelayaran atau Kemaritiman	Tersedianya 61 Asesor Kompetensi dibidang Nautika, Teknik, Logistik, dan Kepelabuhan di Jawa Tengah dan Sumatera Barat	Orang		60	61	-	-	-	160.000.000		Politeknik Ilmu Pelayaran
Didirikannya LSP PIP Semarang, LSP POLIMARIN, dan LSP Politeknik Pelayaran Sumbar	Berdirinya (Lembaga Sertifikasi Profesi) LSP PIP Semarang, LSP POLIMARIN, dan LSP Poltekpel Sumbar	Orang		60	61	-	-	-	500.000		PIP Semarang, POLIMARIN, Poltekpel Sumbar

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target / Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Lembaga Pelaksana
				2016		2017		2018			
				T	R	T	R	T			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penambahan dan Pelatihan Asesor Sektor IT, Teknik Kendaraan Ringan, dan Teknik Logam Mesin	Tersedianya 42 Asesor Kompetensi dibidang IT, Teknik Kendaraan Ringan, dan Teknik Logam Mesin bagi SMK N 4 Kendal dan SMK Islam Al Hikmah Mayong Jepara	Orang		40	42	-	-	-	200.000.000		SMK N 4 Kendal dan SMK Islam Al Hikmah Mayong Jepara
Menyelenggarakan FGD bersama IHK Trier Jerman dan DRD Jateng	Tersedianya SDM Kompeten di Jawa Tengah	Orang		60	65	-	-	-	35.000.000		IHK Jerman
Penambahan Asesor Penyuluh Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	Terbentuknya PTUK Penyuluh Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	Orang		20	18	-	-	-	100.000.000		KEMENDIKBUD
Penambahan dan Pelatihan Asesor Sektor Batik, DKV (Desain Komunikasi Visual), Animasi dan Film, Musik, Fotografi, Kopi, dan Barista	Tersedianya 160 Asesor Sub Sektor Ekonomi Kreatif Batik, DKV (Desain Komunikasi Visual), Animasi dan Film, Musik, Fotografi, Kopi, dan Barista	Orang		-	-	160	154	-	177.000.000		BEKRAF
Menyusun SKKNI bidang musik yang diakui di Internasional	Tersusunnya SKKNI dan Skema di bidang Musik	Orang		-	-	40	40	-	251.500.000.000		BEKRAF
Menyusun SKKNI bidang fotografi yang diakui di Internasional	Tersusunnya SKKNI dan Skema di bidang fotografi	Orang		-	-	40	40	-	251.500.000.000		BEKRAF
Menyusun Skema sertifikasi dan MUK	Tersedianya Skema Sertifikasi dan MUK bidang Musik dan Fotografi	Orang		-	-	60	60	-	131.500.000.000		BEKRAF
Masa berlakunya sertifikat telah habis	Terupgradenya Asesor LSP Politeknik Perkebunan Yogyakarta dan siap melaksanakan uji kompetensi	Orang		20	11	-	-	-	60.000.000		LSP LPP Yogya

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target / Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Lembaga Pelaksana
				2016		2017		2018			
				T	R	T	R	T			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penguatan & perluasan LBK sebagai Bagian dari Gerakan Penghapusan dan Penanganan KTP (kekerasan terhadap Perempuan)	Penguatan LBK (Layanan Berbasis Komunitas)/ Organisasi/ Komunitas Perempuan di Jawa Tengah	Komunitas	11	12	9	11	8	8	166.000.000	NON PEMERINTAH	LRC-KJHAM
	Pembentukan LBK (Layanan Berbasis Komunitas)/ Organisasi/ Komunitas Perempuan di Jawa Tengah	Komunitas	1	1	1	1	1	NA	9.000.000	NON PEMERINTAH	

MATRIKS BAGIAN 2 : PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target / Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Lembaga Pelaksana	
			2016		2017		2018				
			T	R	T	R	T				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA											
6.2.1 (e) Jumlah Kabupaten/Kota yang Terbangun Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan dan Komunal											
PROGRAM 1: Pengelolaan limbah komunal berbasis masyarakat											
Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rumah Tangga	Jumlah Kepala Keluarga (KK) terinstalansi dengan IPAL komunal	KK	NA	85	85	NA	NA	NA	220.000.000	60% Donor 40% Pemda	YAYASAN BINTARI
PROGRAM 2: Waste to Energy											
Pengolahan limbah Cair Tepung Aren di Klaten	Sambungan gas	KK						650	17.000.000.000	Negara Donor 16 M dan Pemkab 1 M	DANIDA Denmark
6.5.1 (a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang di Internalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)											
PROGRAM 2: Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Garang secara Terpadu dan Berkelanjutan											
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Garang secara Terpadu dan Berkelanjutan	Jumlah Desa yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS.	Desa	NA	4	4	5	5	NA	450.000.000	ERCA Japan	YAYASAN BINTARI
6.5.1 (b) Jumlah Stasiun Hidrologi dan Klimatologi yang dilakukan Updating dan Revitalisasi											
PROGRAM: Penguatan Ketangguhan Masyarakat Pesisir Kota Semarang melalui Rehabilitasi Mangrove dan Peningkatan Ekonomi dengan Mata											
Membangun sistem peringatan dini iklim untuk masyarakat pesisir Semarang	Jumlah warga masyarakat yang menerima informasi iklim dan mengaplikasikannya	Orang	NA	50	72	30	31	NA	180.000.000	ROCKEFELLER FOUNDATION USA	YAYASAN BINTARI
TUJUAN 11. MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN											
11.6.1 (a) Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani											
PROGRAM 1: Waste to Energy											
Pembanguna Fasilitas Refuses derived Fuel di Cilacap	Jumlah sampah diolah	ton/hari						120	82.000.000.000	Donor, Kementerian, Pemkab, Pemprov	DANIDA Denmark
Pembangkit Listrik tenaga Gas metana TPA Jatibarang Kota Semarang	Listrik yang dihasilkan	MW						0,89	71.000.000.000	Donor, Kementerian, Pemkot	DANIDA Denmark
PROGRAM 2: Ekonomi Hijau dan Aksi Mitigasi yang tepat di Jateng											
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Strategi Pembangunan Rendah Emisi Sektor Berbasis Lahan	Kemampuan Pemda dalam mengembangkan strategi pembangunan rendah emisi sektor berbasis lahan	org	48	50	38	160	150	0	580.000.000	Donor	GIZ Jerman
Formulasi NAMAs sektor Berbasis Lahan	Demplot Agroforstry	Kab		5	4				385.000.000	Donor	GIZ Jerman
Pengembangan Strategi pembangunan Rendah Emisi	Dokumen Startegi Pembangunan Rendah Emisi Kab	Dok				2	2		730.000.000	Donor	GIZ Jerman

Program/Kegiatan/Indikator Output		Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target / Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan
				2016		2017		2018		
				T	R	T	R	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Formulasi NAMAs sektor Berbasis Lahan	Demplot Agroforstry	Kab		5	4				385.000.000	Donor
Pengembangan Strategi pembangunan Rendah Emisi	Dokumen Startegi Pembangunan Rendah Emisi Kab	Dok				2	2		730.000.000	Donor
TUJUAN 13. MENGATASI LANGKAH SEGERA UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA										
13.1.2* Jumlah Korban Meninggal, Hilang dan Terkena Dampak Bencana per 100.000 Orang										
PROGRAM : Peringatan Dini Banjir di Sungai Bringin Semarang										
Pembentukan penguatan kelompok siaga bencana (KSB) di lima Kelurahan DAS Bringin	Jumlah korban meninggal akibat banjir	Orang	NA	0	0	NA	NA	NA	2.700.000.000	NON PEMERINTAH

MATRIKS BAGIAN 2 : PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target / Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Lembaga Pelaksana	
			2016		2017		2018				
			T	R	T	R	T				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
TUJUAN 16. PERDAMIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KOKOH											
16.3.1.(b) Jumlah Orang atau Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi											
PROGRAM: Layanan Bantuan Hukum LBH Semarang											
Pengaduan dan Konsultasi Hukum	Jumlah penerima manfaat konsultasi hukum	Orang	295	N/A	245	N/A	368	300	12.000.000	LBH Semarang	LBH Semarang
Pendampingan Hukum	Jumlah penerima manfaat layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Orang	34,119	N/A	73,35	N/A	N/A	N/A	250.000.000	BPHN Kemenkumham LBH Semarang	LBH SEMARANG
Penyuluhan/pendidikan Hukum	Jumlah Orang yang mendapatkan pendidikan bantuan hukum	Orang	195	N/A	888	N/A	926	700	66.000.000	BPHN Kemenkumham, LBH Semarang, The Asia Foundation	LBH SEMARANG
16.10.1.(a) Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir											
PROGRAM 1: Dokumentasi Pelanggaran HAM di Jawa Tengah											
Kliping dan analisis media pelanggaran HAM di Jawa Tengah	Jumlah pelanggaran HAM di Jawa Tengah yang terdokumentasikan LBH Semarang	Kasus	183	N/A	221	N/A	137	150	3.600.000	The Asia Foundation	LBH SEMARANG
PROGRAM 2: Advokasi Korban Pelanggaran HAM											
Pendampingan Hukum Korban pelanggaran HAM di Jawa Tengah	Jumlah kasus dan penerima manfaat bantuan hukum LBH Semarang	Kasus	29	N/A	25	N/A	27	25	250.000.000	BPHN Kemenkumham LBH Semarang	LBH SEMARANG
PROGRAM 3: Penguatan Masyarakat											
Pendidikan HAM dan Hukum Kritis di Komunitas	Jumlah Komunitas/organisasi Penerima manfaat pendidikan HAM	Komunitas/Organisasi	6	N/A	24	N/A	22	22	66.000.000	BPHN Kemenkumham, LBH Semarang, The Asia Foundation	LBH SEMARANG

MATRIKS BAGIAN 2 : PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

Matriks Bagian 2 : Program dan Kegiatan Non Pemerintahan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola											
Program/Kegiatan/Indikator Output	Satuan	Tahun Dasar (2015)	Target / Realisasi					Indikatif Alokasi Anggaran 3 Tahun	Sumber Pendanaan	Lembaga Pelaksana	
			2016		2017		2018				
			T	R	T	R	T				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
TUJUAN 16. PERDAMIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh											
16.3.1.(b) Jumlah Orang atau Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi											
PROGRAM: Layanan Bantuan Hukum LBH Semarang											
Pengaduan dan Konsultasi Hukum	Jumlah penerima manfaat konsultasi hukum	Orang	295	N/A	245	N/A	368	300	12.000.000	LBH Semarang	LBH Semarang
Pendampingan Hukum	Jumlah penerima manfaat layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Orang	34,119	N/A	73,35	N/A	N/A	N/A	250.000.000	BPHN Kemenkumham LBH Semarang	LBH SEMARANG
Penyuluhan/pendidikan Hukum	Jumlah Orang yang mendapatkan pendidikan bantuan hukum	Orang	195	N/A	888	N/A	926	700	66.000.000	BPHN Kemenkumham, LBH Semarang, The Asia Foundation	LBH SEMARANG
16.10.1.(a) Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir											
PROGRAM 1: Dokumentasi Pelanggaran HAM di Jawa Tengah											
Kliping dan analisis media pelanggaran HAM di Jawa Tengah	Jumlah pelanggaran HAM di Jawa Tengah yang terdokumentasikan LBH Semarang	Kasus	183	N/A	221	N/A	137	150	3.600.000	The Asia Foundation	LBH SEMARANG
PROGRAM 2: Advokasi Korban Pelanggaran HAM											
Pendampingan Hukum Korban pelanggaran HAM di Jawa Tengah	Jumlah kasus dan penerima manfaat bantuan hukum LBH Semarang	Kasus	29	N/A	25	N/A	27	25	250.000.000	BPHN Kemenkumham LBH Semarang	LBH SEMARANG
PROGRAM 3: Penguatan Masyarakat											
Pendidikan HAM dan Hukum Kritis di Komunitas	Jumlah Komunitas/organisasi Penerima manfaat pendidikan HAM	Komunitas/Organisasi	6	N/A	24	N/A	22	22	66.000.000	BPHN Kemenkumham, LBH Semarang, The Asia Foundation	LBH SEMARANG

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO